



CATATAN INSPIRATIF SISTEM PELAYANAN

Transformasi & Kolaborasi



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



CATATAN INSPIRATIF SISTEM PELAYANAN

Transformasi & Kolaborasi



CATATAN INSPIRATIF SISTEM PELAYANAN

Transformasi & Kolaborasi

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab

Ir. Mohammad Zainal Fatah

Dr. Dadang Rukmana, S.H., CES., DEA.

Koodinator

Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.

Dra. R. Adj. Canka Amprawati Suryadi Putri, M.A.

Budhi Setyawan, S.Kom., M.T.

Agus Sutamin, S.Sos., M.Si.

Ir. Pantja Dharma Oetojo, M.Eng.Sc.

Darwanto, S.Sos., S.T., M.Si.

Nazib Faizal, S.T., M.Sc.

Krisno Yuwono, S.T., M.T.

Penulis

Eko Suhendratma, S.Si., M.A.

Christine Mayavanie, S.T., M.T., M.Eng.

Fransiska Dini Ambarsari, S.IP., M.Si.

Flacidia Gracia Sri Ratna W., M.T.

Rully Dermawati, S.T.

Muhammad Faris Al Bassam, S.E.

Pranoto S.T., M.Dev.Plg.

Muhammad Ridwan S.T., M.E., M.P.M.A.

Jayanti Kartika Putri, S.Kom, M.T.I.

Dewa Aji Ariwanto. S.Sos., MSE.

Adi Sunardi, S.Kom, M.M.

Yudhi Syarif Rachman SE. M.Ak.

Fadjar Agus Wibowo, S.E., M.A.B.

Ahmad Fadillah Adha, S.E., M.Ak.

Ade Novianti Azhar, S.Ak.

Eki Arsita Rizki, S.T.

Prita Yuniarti Ramayani, S.IP.

Domenico Adi Nugroho, S.Si, M.T.

Emma Hapsari, S.Sos.

Mursalim, S.Pd., S.T., M.S.I.

Mutia Karunia Azzahra, A.Md.M.

Maretha Ayu Kusumawati, S.T., M.T., M.Sc.

Dr. Taufan Madiasworo, S.T., M.T.



Catatan Inspiratif Sistem Pelayanan;
Transformasi & Kolaborasi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

200 hlm.; 20cm x 25 cm

ISBN: 00000-0000

Diterbitkan oleh:



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110

Indah Agustina Dewi, S.Sos, M.Strat.PR.

Giantry Rizky Wulandari, S.Sos., M.S.P.

Listya Adi Andarini, S.Sos., M.Si.

Ardhanareswari Probawati, S.T., M.T.

Dr. Andi Suriadi, S.S., M.Si.

Elok Wuri Safitri, S.T., M.Sc.

Ir. Anum Kurniawan, M.Sc.

Hidemiwan, S.T., M.A.

Dimas Sigit Dewandaru, S.Kom., M.T.

Editor

Tito Budiarto, S.T., M.I.L.

Ratri R. Kusumalestari, S.Sos., M.I.Kom.

Desain & Tata Letak

Dian Rosalia

MD Gofar

CATATAN INSPIRATIF SISTEM PELAYANAN

Transformasi & Kolaborasi

DAFTAR ISI

PROLOG

01 —

PELAYANAN

- Apa yang Dimaksud dengan Pelayanan?
- Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal
- Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
- Pelayanan dalam Konteks Kementerian PUPR
- Transformasi Sistem Pelayanan

02 —

MEMBANGUN TATA KELOLA EFEKTIF

- Transformasi Anggaran
- Menuju Opini BPK
- Transformasi Pengelolaan Keuangan
- Penyelenggaraan Tata Persuratan dan Kearsipan
- Meningkatkan Manfaat BMN
- Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Daerah



03 —————

BERADAPTASI DENGAN PROSES DIGITALISASI

- Transformasi Digital untuk Mendukung Konstruksi 4.0
- Menuju Tata Kelola Pemerintahan Digital Melalui SPBE
- Membangun *Branding* Kementerian PUPR yang Kuat dan Matang
- Media Publikasi

04 —————

REGULASI DAN KEBIJAKAN SEBAGAI PAYUNG HUKUM

- Advokasi Hukum
- Membangun Payung Hukum
- Pusaka sebagai Jembatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

05 —————

MENGELOLA KERJA SAMA

- Menguntai Asa dari Bencana
- Menjalin Kerja Sama Luar Negeri
- Kolaborasi dan Orkestrasi untuk Komunikasi Bersinergi

06 —————

PELAYANAN SEBAGAI KUNCI

- Kampus PUPR Asik
- Menjaga Aset, Merawat Fasilitas
- Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prima
- Iprove Sebagai Penguatan Karakter
- Prestasi Itu Milik Bersama

EPILOG

sambutan

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras serta kecepatan Kementerian PUPR atas pembangunan berbagai infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama di masa pemerintahannya.

Infrastruktur memiliki peran penting dengan berbagai manfaat, termasuk efisiensi biaya logistik dan sebagai penyatuan bangsa. Presiden Jokowi meyakini bahwa kehadiran infrastruktur akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan membuat biaya logistik lebih efisien. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dianggap mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru serta mendukung konektivitas sosial dan budaya.

Sejak 2014, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran telah meningkatkan daya saing Indonesia dalam indeks *global IMD Competitiveness* dari peringkat 54 menjadi peringkat 51 saat ini. Semua ini tidak terlepas dari kerja cerdas dan kolaborasi semua komponen yang saling terhubung dalam tubuh Kementerian PUPR.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran adalah bagian integral dari upaya menuju pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sekretariat Jenderal berperan dalam membina dan memberikan dukungan administratif yang melibatkan beragam aspek. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan produktif.

Pembinaan dan penataan organisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan optimalisasi kinerja dan peningkatan efisiensi. Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan advokasi hukum guna menegaskan komitmen terhadap kepatuhan dan integritas.

Dengan keyakinan bahwa Sekretariat Jenderal menjadi garda terdepan dalam mendukung setiap langkah dan kebijakan Kementerian PUPR, saya menghargai dedikasi dan kerja kerasnya dalam memastikan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terwujud dengan sukses.

Buku yang dipersembahkan oleh Sekretariat Jenderal ini memberikan gambaran transformasi dan kolaborasi sistem pelayanan di Kementerian PUPR dalam sepuluh tahun terakhir. Semoga dapat menginspirasi. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2024

BASUKI HADIMULJONO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



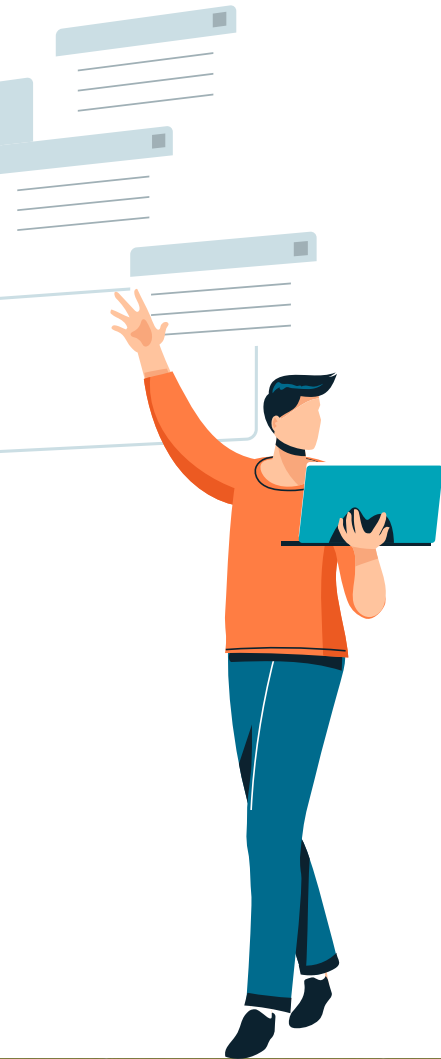
BASUKI HADIMULJONO

pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sepanjang proses penyusunan dan penulisan buku ini. Buku “Catatan Inspiratif Sistem Pelayanan” ini membawa kita menelusuri perjalanan dedikasi Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan transformasi, kolaborasi, dan menciptakan perubahan signifikan dalam peran administratif.

Pada perjalanan transformasi Kementerian PUPR, peran Sekretariat Jenderal tak hanya sebatas pada urusan internal, melainkan menjadi pilar utama pembentukan fondasi yang kokoh. Kompleksitas dan tantangan yang dihadapi berfokus pada tata kelola efektif, transformasi anggaran, pembangunan organisasi yang tangguh, pencapaian opini BPK hingga eksplorasi transformasi pengelolaan keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan manajemen Barang Milik Negara.

Adaptasi terhadap proses digitalisasi menggarisbawahi pentingnya Transformasi Digital Kementerian PUPR. *Roadmap* transformasi digital dijelaskan mencakup aspek data dan statistik infrastruktur, tata kelola bencana, konstruksi 4.0, dan pemerintahan digital.



Perjalanan Sekretariat Jenderal terkait regulasi dan kebijakan, termasuk advokasi hukum, penanganan permasalahan hukum, deregulasi kebijakan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah langkah penting yang mempengaruhi kinerja Kementerian PUPR. Pusaka sebagai Jembatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan indeks kualitas kebijakan menjadi fokus, menunjukkan dedikasi pada reformasi birokrasi.

Sekretariat Jenderal menyoroti pentingnya pelayanan dengan berfokus pada peran Kampus PUPR ASIK, *Smart Card*, hingga upaya menjaga aset bangsa melalui layanan kesehatan, pengendalian COVID, dan kolaborasi dalam pelayanan publik. Korpri juga diangkat sebagai wadah perekat semangat dalam pembangunan dan pelayanan, membangun karakter inovatif dan berjiwa seni. Selain itu, manajemen kerja sama Kementerian PUPR juga memiliki peran yang sangat penting ditinjau dari pembelajaran dampak bencana, harapan yang dibangkitkan, serta kerja sama luar negeri dan kolaborasi yang bersinergi.

Buku ini menjadi jendela yang mengungkapkan perjalanan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dalam mewujudkan visi transformasi dan menjadikan peran administratif sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan Kementerian PUPR, serta melibatkan pembaca untuk meresapi dan memahami setiap tahap perjalanan ini dengan lebih dalam.

Jakarta, Maret 2024

MOHAMMAD ZAINAL FATAH

SEKRETARIS JENDERAL PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

Prolog

Melalui buku ini, kita akan memasuki dunia Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, sebuah entitas yang mengemban tugas dan fungsi krusial dalam menopang kelancaran dan efisiensi seluruh aktivitas kementerian. Prolog ini membuka pintu ke dalam koordinasi yang kompleks namun berjalan dengan baik, melibatkan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PUPR.

Dalam langkah-langkahnya, Sekretariat Jenderal memainkan peran administratif sekaligus menjadi garda terdepan dalam membina dan memberikan dukungan administrasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari ketatausahaan hingga kerjasama dan hubungan masyarakat.

Sekretariat Jenderal tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh melalui pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana yang efektif. Lebih dari sekadar mengurus administrasi, Sekretariat Jenderal juga menjadi garda terdepan dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, menjelma menjadi penjaga integritas dan advokat hukum Kementerian. Keberadaannya tak terlepas dari pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara, mengawal pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan beragam fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Buku ini mengajak pembaca untuk meresapi perjalanan Sekretariat Jenderal dalam melayani dan berdedikasi pada reformasi. Dengan sorotan pada kompleksitas dan tantangan yang dihadapi, Sekretariat

Jenderal Melayani menjadi cermin reformasi dan dedikasi yang mengubah peran administratif menjadi tonggak utama dalam mencapai tujuan Kementerian PUPR. Dimulai dari Bab 1 yang menjelaskan tentang bagaimana Kementerian PUPR membangun tata kelola yang efektif, yakni melalui transformasi anggaran, membangun organisasi yang tangguh, mengelola tata laksana organisasi yang efektif dan efisien, hingga upaya untuk mencapai opini BPK sesuai target yang ditentukan. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana transformasi pengelolaan keuangan telah dilakukan untuk mencapai tujuan tata kelola yang ideal di Kementerian PUPR dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian PUPR. Pada bagian ini dijelaskan tentang Barang Milik Negara (BMN), yaitu meningkatkan manfaat BMN dan tantangan mengelola BMN. Di akhir bab, buku ini memberikan pembahasan tentang fasilitasi pembangunan infrastruktur daerah dengan segala dinamikanya.

Pada Bab 2 dijelaskan tentang hal-hal terkait adaptasi dengan proses digitalisasi yang

menekankan bahwa Transformasi Digital Kementerian PUPR *is a must*. Dijelaskan pula mengenai *roadmap* dari kegiatan transformasi digital yang dilakukan. Digitalisasi dijelaskan dalam bagian ini untuk mewujudkan data dan statistik infrastruktur PUPR yang berkualitas, tata kelola bencana infrastruktur melalui SITABA, data statistik yang modern dan inovatif, konstruksi 4.0 dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta tata kelola pemerintahan digital melalui SPBE. Selain itu, digitalisasi juga dijelaskan dalam konteks membangun *branding* Kementerian PUPR yang kuat dan matang.

Selanjutnya, Bab 3 berisi perjalanan Sekretariat Jenderal terkait regulasi dan kebijakan sebagai payung hukum yang menceritakan advokasi hukum yang pernah dilakukan oleh Kementerian PUPR, penanganan permasalahan hukum dalam pembangunan infrastruktur, deregulasi kebijakan, pembentukan peraturan perundangan tentang jalan, sumber daya air, jasa konstruksi, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, rumah susun, dan ketentuan terkait bidang PUPR dalam UU Cipta Kerja.

Pada bagian ini dipaparkan tentang Pusaka sebagai Jembatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang melakukan penyampaian tindak lanjut kebijakan Presiden RI dan Menteri PUPR dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penyiapan produk kebijakan berkualitas dan berdasarkan hasil riset. Selain itu, ada juga paparan tentang indeks kualitas kebijakan sebagai *tools* Reformasi Birokrasi.

Bab 4 buku berisi pemaparan terkait Pelayanan sebagai Kunci. Pelayanan menjadi kunci utama kerja Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, mulai dari Kampus PUPR ASIK; Smart Satpam dan *Smart Card*; dan Upaya Menjaga Aset Bangsa. Upaya yang

dilakukan Kementerian PUPR untuk menjaga aset bangsa yakni insan PUPR yaitu melalui Layanan Kesehatan, Taman Pengasuhan Anak, Kegiatan Anti Narkoba, Pengendalian COVID pada masanya, serta layanan *Medical Check-Up* untuk memastikan semua pegawai memiliki pola hidup yang sehat. Bagian ini juga kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Terkait pelayanan, bagian ini memaparkan juga tentang Korpri sebagai wadah perekat semangat *corps* (corsa) dalam menyelenggarakan tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain melayani, Korpri juga berkarya dan mengukur prestasi; mengembangkan kepedulian sosial dan memelopori kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya; membangkitkan semangat profesionalisme kinerja, pengabdian dan netralitas serta profesionalisme; melakukan pembekalan bagi calon purnatugas ASN Kementerian PUPR; serta membangun karakter yang berinovasi, bermoral tinggi, dan berjiwa seni sebagaimana dipaparkan dalam bagian pertama buku ini.

Terakhir adalah Bab 5 yang berisi paparan tentang bagaimana Kementerian PUPR mengelola kerja sama. Mengurai Asa dari Bencana menekankan tentang hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dan harapan yang harus dibangkitkan dari sebuah peristiwa bencana. Terakhir, buku ini memaparkan tentang bagaimana Kementerian PUPR menjalin kerja sama luar negeri dan kolaborasi dan orkestrasi untuk komunikasi yang bersinergi.

Buku yang terdiri dari 5 Bab ini diharapkan dapat menjadi sebuah catatan sejarah mengenai pelayanan dan dedikasi yang diberikan oleh Kementerian PUPR kepada seluruh masyarakat Indonesia.





01

Pelayanan

Pelayanan

Pelayanan, dalam konteks Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, merujuk pada upaya menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian.

Apa yang dimaksud dengan pelayanan?

Pelayanan yang efektif dan efisien telah diidentifikasi sebagai elemen utama yang mendukung pelaksanaan fungsi Kementerian PUPR dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, Sekretariat Jenderal menjadi unsur sentral yang berperan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan berbagai aspek pelayanan untuk memastikan kinerja dan keberhasilan Kementerian.

Pelayanan, dalam konteks Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, merujuk pada upaya menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki tanggung jawab utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, dan menyediakan dukungan administratif kepada seluruh entitas yang berada dalam lingkungan

Kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menjalankan sejumlah fungsi kunci.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, fungsi Sekretariat jenderal Kementerian PUPR adalah:

- 1. Koordinasi kegiatan Kementerian**
Sebagai bagian dari fungsinya, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan Kementerian. Koordinasi ini melibatkan pengelolaan sinergis berbagai inisiatif dan program, sehingga tujuan Kementerian dapat dicapai dengan efektif. Pelayanan koordinatif ini juga mencakup penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian, yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan operasional.
- 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian**
Proses ini melibatkan sinkronisasi berbagai kebijakan, program, dan anggaran guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Koordinasi antarunit di Kementerian

PUPR sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan proyek berjalan sejalan dengan visi dan misi kementerian. Selain itu, penyusunan rencana, program, dan anggaran juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, dan potensi sumber daya yang ada. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik di bidang pekerjaan umum dan perumahan.

3. Pembinaan dan Dukungan Administrasi

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diberikan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; Pelayanan Sekretariat Jenderal juga mencakup aspek pembinaan dan dukungan administrasi. Ini melibatkan manajemen ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi. Dengan menyelenggarakan aspek-aspek administratif ini secara baik, Sekretariat Jenderal berkontribusi pada kelancaran operasional Kementerian.

4. Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Sejalan dengan tujuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal, Sekretariat Jenderal terlibat dalam pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Kementerian PUPR. Ini mencakup pengembangan struktur organisasi yang efisien, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika tugas Kementerian. Langkah-langkah pembinaan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh bagian Kementerian dapat beroperasi secara sinergis dan efektif sesuai dengan misi dan visi organisasi. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya sekadar

mengoptimalkan kinerja internal, tetapi juga bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban oleh Kementerian PUPR secara keseluruhan.

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum di Kementerian PUPR memegang peranan krusial dalam pengembangan sektor pekerjaan umum dan perumahan. Proses koordinasi melibatkan kolaborasi antarunit untuk memastikan konsistensi peraturan dengan tujuan dan visi Kementerian. Sekretariat Jenderal memiliki peran sentral dalam fasilitasi penyusunan peraturan, memastikan konsultasi menyeluruh, dan menyelaraskan rancangan peraturan dengan arah kebijakan. Selain itu, Sekretariat Jenderal juga memastikan agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan standar hukum dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Advokasi hukum oleh Kementerian tidak hanya berkaitan dengan penegakan kebijakan internal, tetapi juga dengan menjaga reputasi dan integritas di mata publik serta lembaga-lembaga terkait. Melalui langkah-langkah ini, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menjalankan perannya secara holistik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor PUPR.

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa

Fungsi ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup tanggung jawab yang melibatkan koordinasi, keberlanjutan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sekretariat

Jenderal memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan barang milik negara, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan memonitor proses pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan standar transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, Sekretariat Jenderal berperan sebagai fasilitator proses yang menjamin bahwa aset negara dikelola dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya mengarah pada pengelolaan administratif, tetapi juga menekankan pada keberlanjutan program dan proyek Kementerian PUPR.

7. **Fungsi Lain yang Diberikan oleh Menteri**
Sekretariat Jenderal tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi juga bersifat fleksibel untuk melaksanakan fungsi lain yang diberikan langsung oleh Menteri. Kemampuan Sekretariat Jenderal untuk beradaptasi dengan dinamika tugas yang mungkin berkaitan dengan perkembangan dan kebijakan Kementerian menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Sebagai hasilnya, Sekretariat Jenderal mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang mungkin muncul seiring dengan evolusi tugas dan tanggung jawab Kementerian PUPR. Fleksibilitas ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjalankan peran yang lebih luas dan beragam sesuai dengan arahan langsung dari Menteri, memastikan keselarasan antara kebijakan strategis dan implementasi operasional di dalam Kementerian.

Makna Pelayanan dalam Konteks Kementerian PUPR

Dalam konteks Kementerian PUPR di Indonesia, pada tingkat dasar, pelayanan yang efektif dan efisien telah diidentifikasi sebagai elemen utama yang mendukung pelaksanaan fungsi Kementerian dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, Sekretariat Jenderal menjadi unsur sentral yang berperan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan berbagai aspek pelayanan untuk memastikan kinerja dan keberhasilan Kementerian.

Pelayanan melibatkan upaya berkelanjutan untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administratif kepada semua komponen organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Ini bukan hanya sekadar administrasi rutin, melainkan suatu bentuk dedikasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang terintegrasi dan terarah guna mencapai sasaran strategis Kementerian.

Dalam upaya mencapai pelayanan yang maksimal, Sekretariat Jenderal memegang peran sentral. Fungsi koordinatifnya melibatkan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Sekretariat Jenderal bukan hanya sekadar penyelenggara administrasi, tetapi juga pengelola strategis yang mendukung kesinambungan visi dan misi Kementerian.

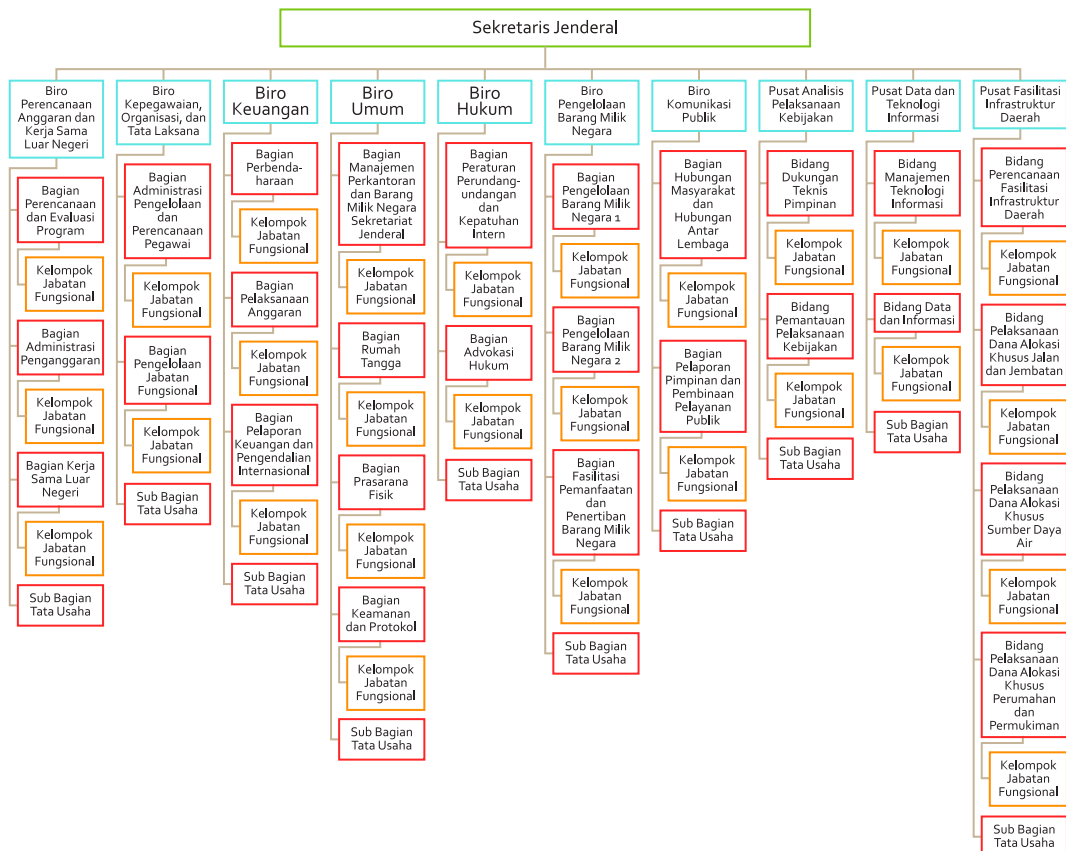
Pelayanan yang diemban oleh Sekretariat Jenderal melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk pembinaan dan dukungan administrasi yang mencakup manajemen ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan berbagai aspek lainnya. Penataan organisasi dan tata laksana juga menjadi fokus penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan responsif.

Seiring dinamika tugas yang terus berkembang, Sekretariat Jenderal juga siap melaksanakan fungsi lain yang mungkin diberikan langsung oleh Menteri. Kemampuan untuk beradaptasi dan memberikan respons yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan kerja mencerminkan fleksibilitas Sekretariat Jenderal dalam mendukung evolusi Kementerian PUPR menuju pencapaian visi pembangunan nasional. Dengan demikian, bab ini menciptakan landasan penting untuk pemahaman lebih lanjut mengenai praktik pelayanan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa biro dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kementerian PUPR, yaitu:

- Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- Biro Keuangan;
- Biro Umum;
- Biro Hukum;
- Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- Biro Komunikasi Publik.



Pelayanan dalam Konteks Kementerian PUPR

Dalam konteks Kementerian PUPR di Indonesia, pada tingkat dasar, pelayanan yang efektif dan efisien telah diidentifikasi sebagai elemen utama yang mendukung pelaksanaan fungsi Kementerian dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, Sekretariat Jenderal menjadi unsur sentral yang berperan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan berbagai aspek pelayanan untuk memastikan kinerja dan keberhasilan Kementerian.

Pelayanan melibatkan upaya berkelanjutan untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administratif kepada semua komponen organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Ini bukan hanya sekadar administrasi rutin, melainkan suatu bentuk dedikasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang terintegrasi dan terarah guna mencapai sasaran strategis Kementerian.

Dalam upaya mencapai pelayanan yang maksimal, Sekretariat Jenderal memegang peran sentral. Fungsi koordinatifnya melibatkan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Sekretariat Jenderal bukan hanya sekadar penyelenggara administrasi, tetapi juga pengelola strategis yang mendukung kesinambungan visi dan misi Kementerian.

Pelayanan yang diemban oleh Sekretariat Jenderal melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk pembinaan dan dukungan administrasi yang mencakup manajemen ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan berbagai aspek lainnya. Penataan organisasi dan tata laksana juga menjadi fokus penting

untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan responsif.

Seiring dinamika tugas yang terus berkembang, Sekretariat Jenderal juga siap melaksanakan fungsi lain yang mungkin diberikan langsung oleh Menteri. Kemampuan untuk beradaptasi dan memberikan respons yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan kerja mencerminkan fleksibilitas Sekretariat Jenderal dalam mendukung evolusi Kementerian PUPR menuju pencapaian visi pembangunan nasional. Dengan demikian, bab ini menciptakan landasan penting untuk pemahaman lebih lanjut mengenai praktik pelayanan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR.

Transformasi Sistem Pelayanan

Kementerian PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas yang mengikuti perkembangan teknologi, maka transformasi sistem pelayanan menjadi fokus utamanya. Transformasi ini menjadi kunci untuk mendukung kinerja Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

Sejumlah terobosan dilakukan untuk mewujudkan transformasi sistem pelayanan di Kementerian PUPR, yaitu:

- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Transformasi sistem pelayanan juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kementerian PUPR. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi, manajemen proyek, dan komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan perubahan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi fondasi utama dalam menjalankan sistem pelayanan yang baru.

Dengan melakukan transformasi sistem pelayanan, Kementerian PUPR dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan. Semua ini merupakan langkah penting menuju pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- **Digitalisasi Proses Pelayanan**

Salah satu langkah penting dalam transformasi sistem pelayanan adalah digitalisasi proses. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Kementerian PUPR dapat mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi dalam setiap prosesnya. Sistem pelayanan digital dapat mencakup proses perizinan, pengawasan proyek, pengelolaan data, dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

- **Penggunaan Teknologi Cerdas (*Smart Technology*)**

Implementasi teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dapat mempercepat pengambilan keputusan. Sistem yang mampu memproses dan menganalisis data secara cepat dapat membantu Kementerian PUPR mengidentifikasi potensi masalah, merencanakan solusi, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

- **Peningkatan Aksesibilitas Informasi**

Transformasi sistem pelayanan juga harus fokus pada peningkatan aksesibilitas informasi. Dengan menyediakan platform yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, Kementerian PUPR dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi terkait proyek infrastruktur, kebijakan, dan program-program penting harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak.

- **Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement*)**

Transformasi sistem pelayanan tidak hanya mengenai penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait lainnya dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan proyek dan program. Keterbukaan terhadap masukan dan umpan balik dari berbagai pihak dapat memperkaya perspektif dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Penguatan Kemitraan (*Partnership Enhancement*)**

Penguatan kemitraan menjadi poin sentral dalam transformasi sistem pelayanan Kementerian PUPR. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya memperluas sumber daya, tetapi juga membawa inovasi dan keberlanjutan ke proyek-proyek infrastruktur. Melalui kemitraan ini, Kementerian PUPR dapat mengakses sumber daya finansial dan teknis, meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek, dan memitigasi risiko. Penguatan hubungan internasional juga menjadi fokus, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan dukungan teknis yang mendukung transformasi sistem pelayanan secara lebih cepat dan efektif.





02

Membangun Tata Kelola Efektif

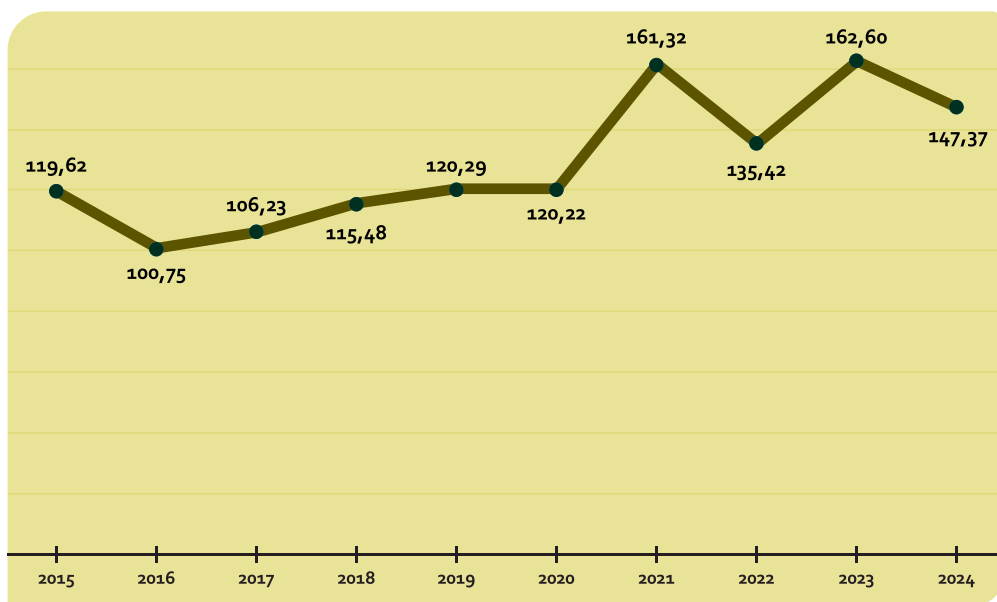
Membangun Tata Kelola Efektif

Pemantauan dan pengendalian anggaran perlu dilakukan sepanjang pelaksanaan anggaran, terutama mengingat fluktuasi revisi DIPA yang mencerminkan dinamika anggaran Kementerian PUPR.

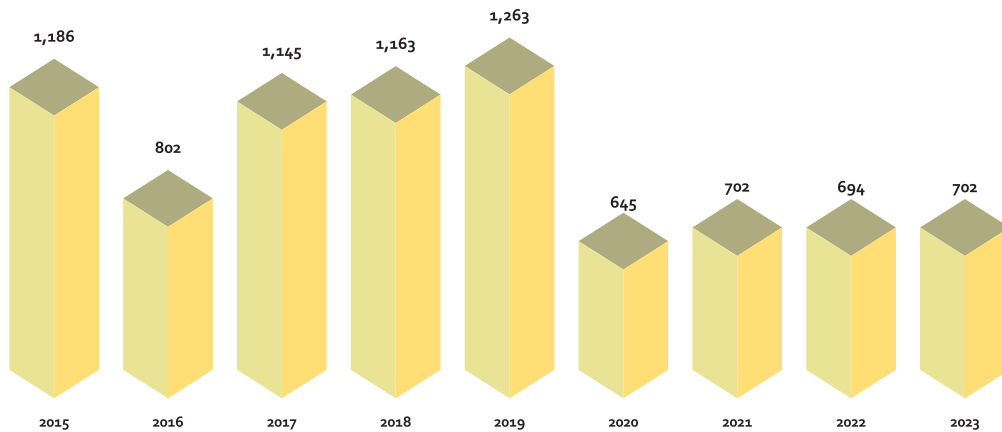
Transformasi Anggaran

Kementerian PUPR merupakan Kementerian dengan Pagu Anggaran Kategori Besar dan organisasi pelaksana yang luas. Anggaran Kementerian ini meningkat dari Rp119,62

triliun pada 2015 menjadi Rp162,60 triliun pada 2023. Meskipun jumlah Satuan Kerja berkurang dari 1.186 pada 2015 menjadi 702 pada 2023, kompleksitas pengelolaan anggaran meningkat seiring dengan peningkatan jumlah paket kegiatan yang mencapai lebih dari 30.000.



Grafik Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015-2024; (dalam triliun rupiah)



Jumlah Satuan Kerja Kementerian PUPR Tahun 2013-2023

Pemantauan dan pengendalian anggaran perlu dilakukan sepanjang pelaksanaan anggaran, terutama mengingat fluktuasi revisi DIPA yang mencerminkan dinamika anggaran Kementerian PUPR. Ketidakesesuaian informasi anggaran terjadi karena kurangnya pencatatan dan eskalasi revisi petunjuk operasional kegiatan pada entitas yang tepat.

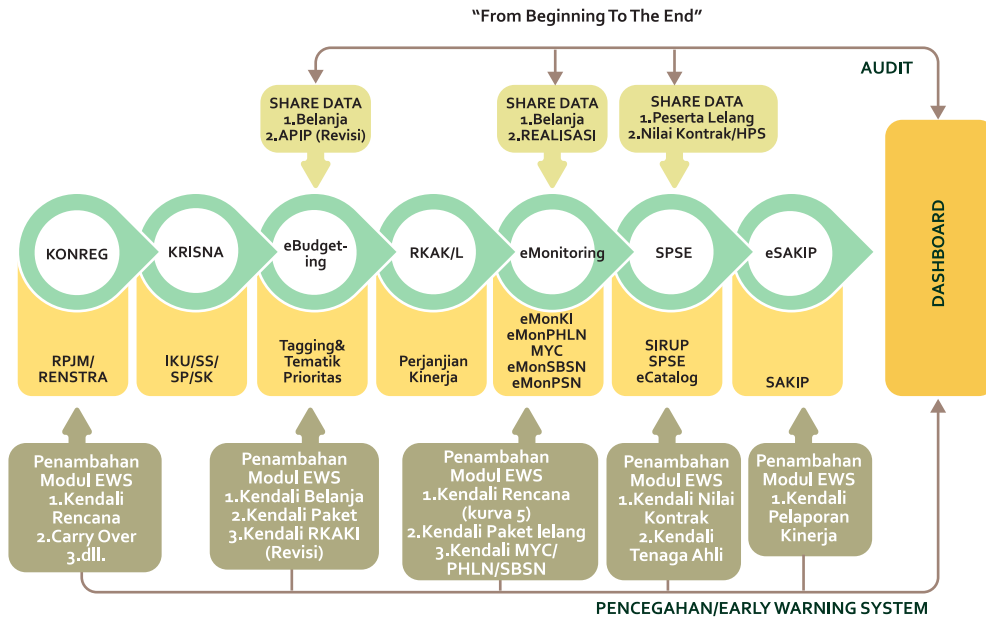
Kementerian PUPR menetapkan tanggung jawab pemenuhan kepatuhan pada undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PMK No. 206/PMK.02/2018. Sebagai bagian dari transformasi anggaran, Kementerian PUPR menerapkan strategi untuk meningkatkan tertib administrasi anggaran melalui sistem TI terpadu, termasuk transformasi tata kelola Kementerian PUPR 4.0.

Proses ini mencakup pelaksanaan anggaran dengan fokus pada tertib administrasi anggaran melalui sistem TI terpadu, dengan inisiasi dan pemutakhiran sistem *e-Monitoring* seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Transformasi ini diawali dengan *e-Monitoring* melalui pelaporan email pada 2006, terus berkembang hingga integrasi dengan *e-Procurement* pada 2013.

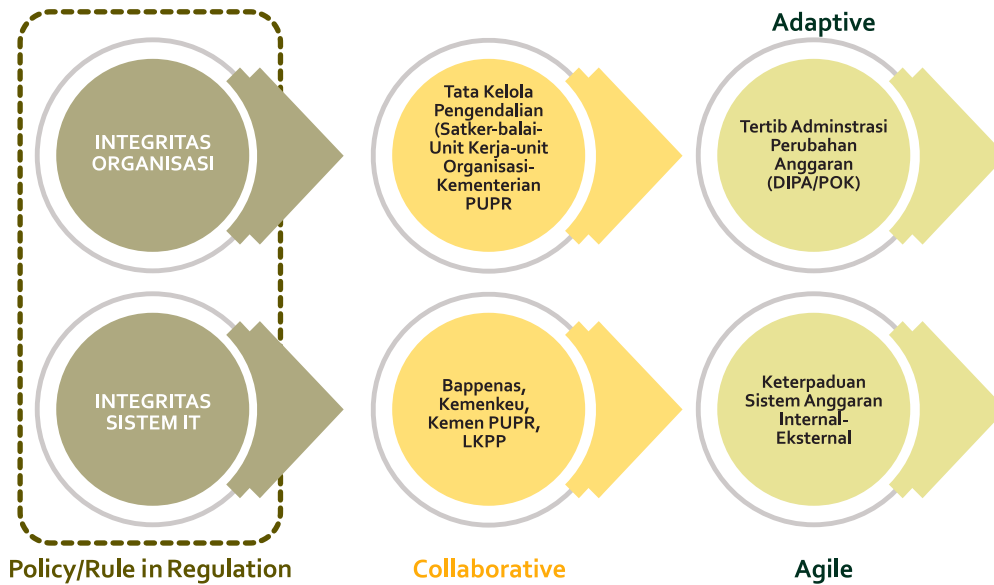
Pada tahun 2019, Kementerian PUPR meresmikan *Integrated e-Monitoring (i-eMonitoring)*,

menggabungkan *e-Budgeting* dan *e-Monitoring* untuk menyeluruh dalam siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini memungkinkan administrasi sinergis antar unit, mempercepat pemantauan dan evaluasi yang tepat waktu, akurat, dan real-time, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan ini memfasilitasi koordinasi internal dan eksternal, mempercepat pemantauan dan evaluasi, dan meningkatkan keterbukaan informasi untuk mendukung akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya.

Transformasi anggaran Kementerian PUPR didasarkan pada menertibkan administrasi penganggaran dengan dukungan teknologi informasi terpadu, menghasilkan perubahan anggaran yang terpantau cepat, tepat, akurat, dan sinergis. Fokus utama adalah mencapai sinergi dan integrasi antarunit kerja internal serta mempermudah pertukaran data dan informasi melalui sistem aplikasi, baik internal maupun eksternal. Terwujudnya sinergitas organisasi dan sistem IT terpadu melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, dengan keterlibatan seluruh entitas dalam pelaporan dan evaluasi melalui sistem aplikasi terintegrasi. Faktor kunci melibatkan komitmen pimpinan, payung hukum, dan sistem aplikasi yang adaptif.



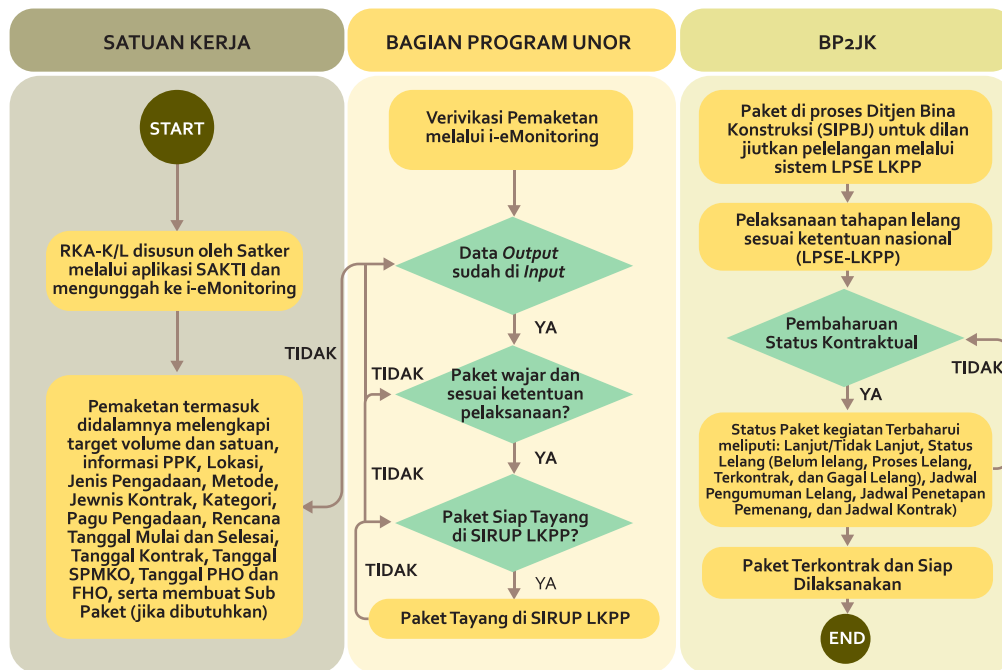
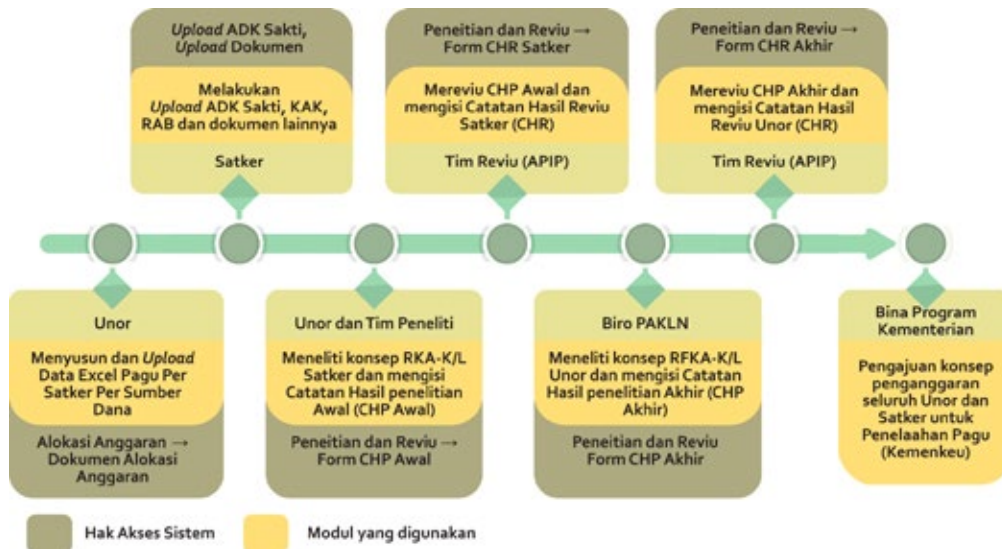
Penyediaan Layanan Administrasi Anggaran yang Terpadu Berbasis IT



Pelaksanaan Transformasi Anggaran dengan Menerapkan Strategi Policy/Regulation Based, Collaborative, Adaptive dan Agile

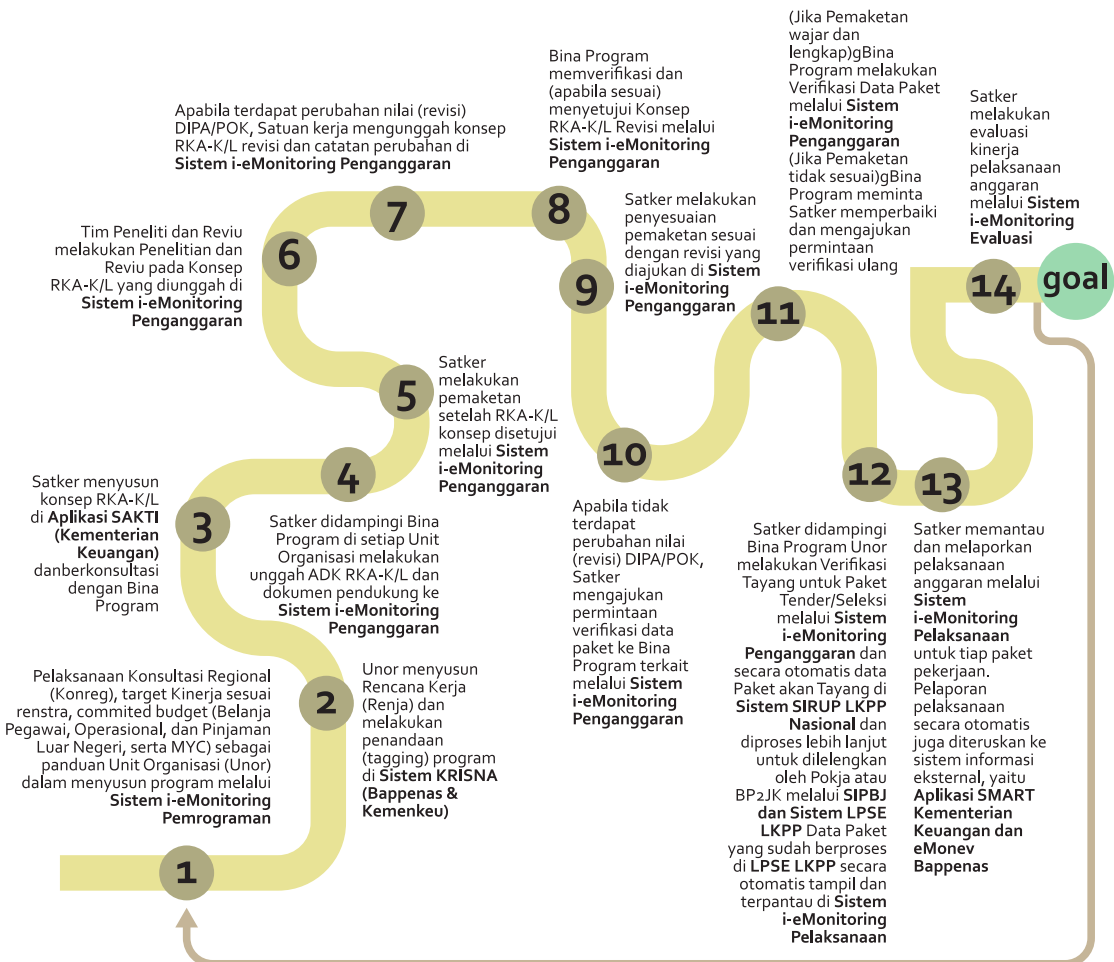
Transformasi anggaran pada tahapan penganggaran dilakukan dengan memanfaatkan sistem i-eMonitoring sebagai wadah seluruh entitas yang terlibat mulai dari

perancang, peneliti, dan pereviu rencana kerja untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan data dari ADK sistem informasi eksternal penganggaran SAKTI Kemenkeu.



Transformasi anggaran sampai kepada proses pengadaan barang dan jasa, dengan memanfaatkan data penganggaran yang telah direncanakan dalam i-eMonitoring yang terintegrasi dengan data perencanaan KRISNA Bappenas dan rencana kerja anggaran dalam SAKTI Kemenkeu yang sama. Kemudian diteruskan secara elektronik dan otomatis tersistem lintas K/L kepada sistem Pengadaan Barang dan Jasa SPSE LKPP yang sebelumnya dipublikasikan dalam SIRUP LKPP untuk menjamin publikasi dan transparansinya.

Transformasi anggaran Kementerian PUPR bukan hanya tentang besaran pagu, melainkan juga mengenai pembaruan tata kelola anggaran melalui sistem TI terpadu. Tujuannya adalah memastikan perencanaan yang tepat, belanja yang efisien, dan menghindari ketidaksesuaian informasi akibat perubahan yang tidak teradministrasikan.



Tahapan Tata Kelola Anggaran dengan i-eMonitoring

Membangun Organisasi yang Tangguh

Meskipun sejumlah program kegiatan telah berjalan dengan baik, beberapa masih perlu penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya. Pentingnya kontribusi positif hasil pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencapaian Visi 2030, sesuai dengan Panduan Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR, menjadi harapan utama.

Perjalanan panjang menuju insan PUPR yang profesional dan berintegritas masih berlanjut, dan upaya terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur PUPR yang memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi saat ini dan mendatang. Gagasan dan langkah konkret telah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja yang menangani SDM, baik di Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM, maupun unit organisasi lainnya secara terintegrasi maupun mandiri.

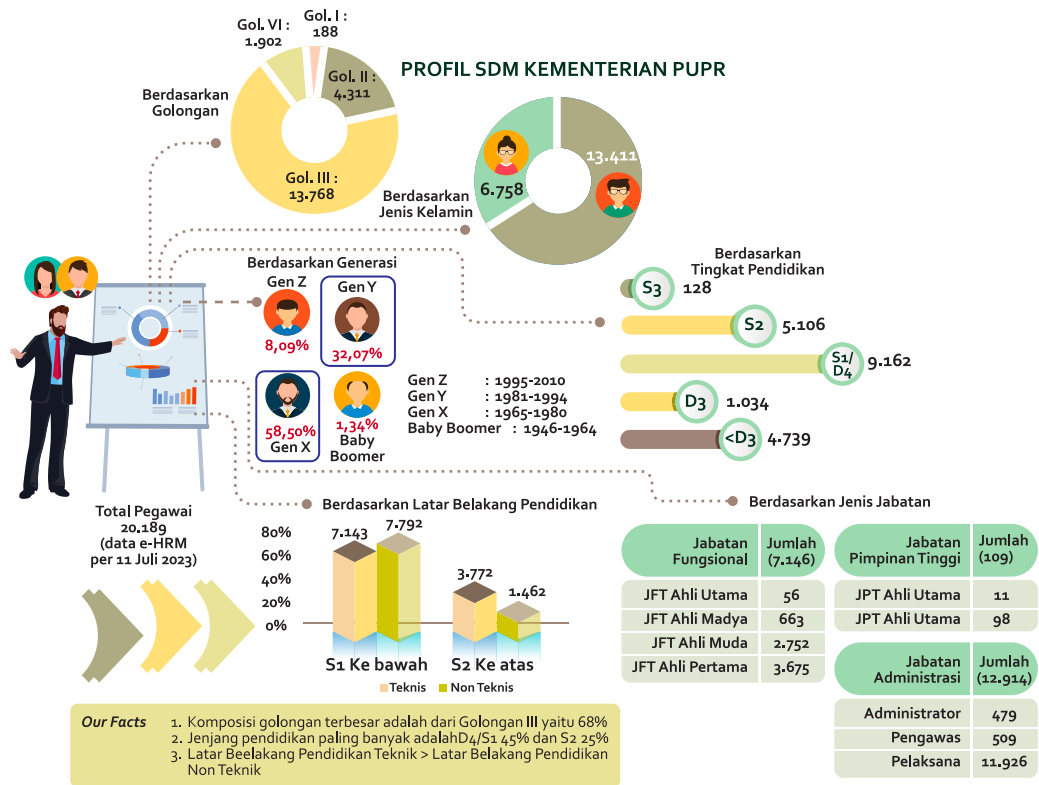
Dukungan kuantitas dan kualitas SDM dianggap sebagai kunci keberhasilan, yang memerlukan komitmen bersama dari pejabat dan pegawai Kementerian PUPR, dimulai dari niat baik, komitmen pimpinan, kesungguhan pengelola SDM, hingga partisipasi aktif seluruh pegawai dalam mendukung program manajemen SDM di Kementerian PUPR.

Mengelola Tata Laksana Organisasi yang Efektif dan Efisien

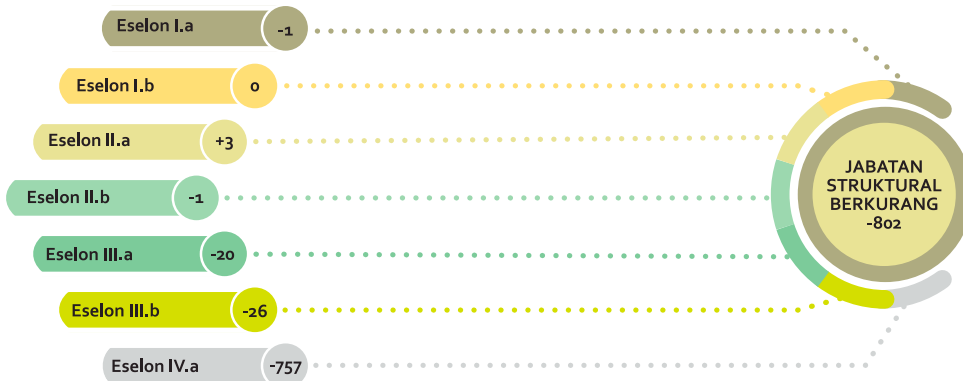
Kementerian PUPR berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui kegiatan penataan organisasi dan tata laksana, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan responsif. Dengan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana sebagai tulang punggung dalam mengelola SDM dan merancang struktur organisasi, Kementerian PUPR berusaha mencapai visinya.



Highlights dalam Tata Laksana Organisasi di Kementerian PUPR



Profil SDM Kementerian PUPR



Rekapitulasi Jumlah Penyederhanaan Organisasi secara Struktural di Kementerian PUPR

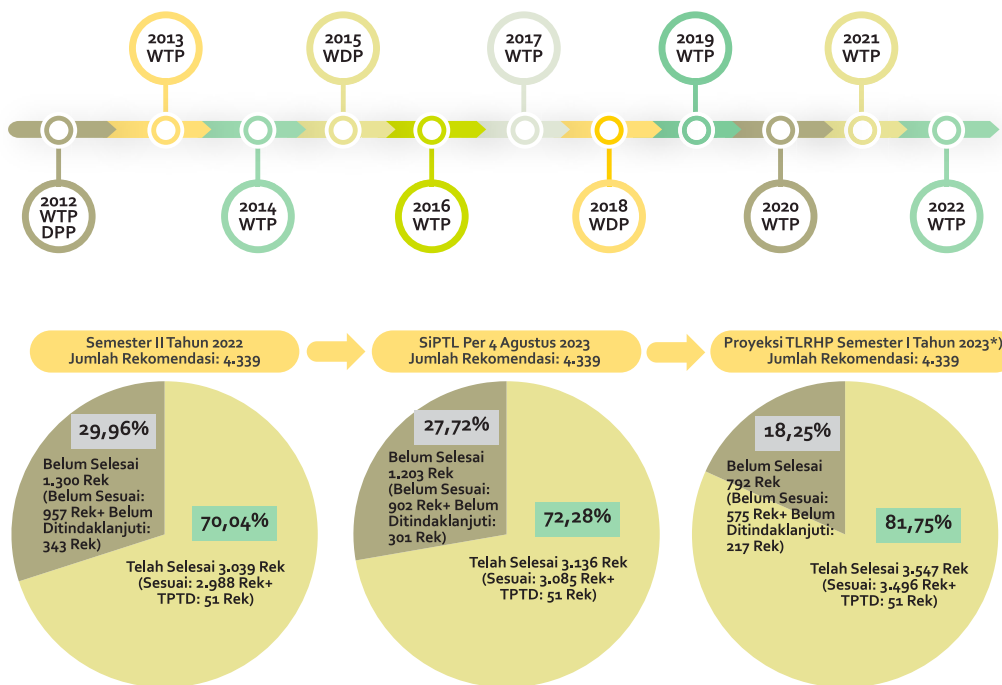
Menuju Opini BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga dengan memberikan opini berdasarkan kriteria seperti kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi, ketaatan terhadap peraturan, dan efektivitas SPI. Opini BPK, sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Capaian opini ini menjadi indikator penilaian kualitas laporan keuangan Kementerian PUPR selama periode 2012-2022.

Kementerian PUPR, per data 4 Agustus 2023, telah menindaklanjuti sebanyak

3.136 dari total 4.339 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, dengan rincian 3.085 rekomendasi sesuai dan 51 rekomendasi merupakan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Sementara itu, 1.203 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari 902 rekomendasi belum sesuai dan 301 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Pada verifikasi Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023, dari total 4.339 rekomendasi, 3.547 rekomendasi telah selesai (3.496 rekomendasi sesuai dan 52 rekomendasi merupakan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti), sedangkan 792 rekomendasi belum selesai (575 rekomendasi belum sesuai dan 217 rekomendasi belum ditindaklanjuti).



Capaian Opini BPK sebagai Indikator Kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR

TRANSFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

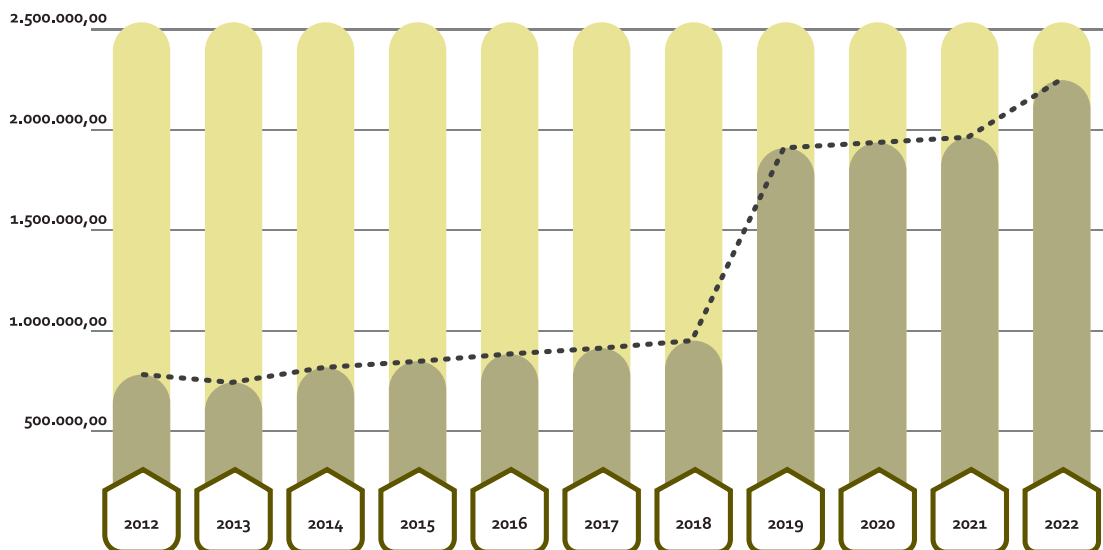
Laporan Keuangan Kementerian PUPR

Kementerian PUPR, sebagai entitas pengguna anggaran, mematuhi Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dengan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tanggung jawab akuntansi dan pelaporan keuangan negara dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga, sementara Menteri Keuangan bertanggung jawab atas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Laporan Keuangan Kementerian PUPR mencakup Neraca, yang menunjukkan peningkatan aset setiap tahunnya, melibatkan berbagai jenis aset seperti lancar, tetap, piutang jangka panjang, dan lainnya.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan negara, melibatkan aktivitas pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran. Proses ini mencakup aspek penggunaan alat, pelaksana, waktu, dan lokasi. Perencanaan anggaran yang akurat menjadi kunci kelancaran pelaksanaan, mempengaruhi penyerapan anggaran dan pencapaian target secara efektif.

Lambatnya penyerapan anggaran dapat disebabkan oleh faktor seperti penunjukan tenaga pengelola yang lambat, kebiasaan menunda pekerjaan, dan kurangnya mekanisme reward dan punishment. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran, perlu dipastikan bahwa penyerapan anggaran sejalan dengan capaian output yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran.



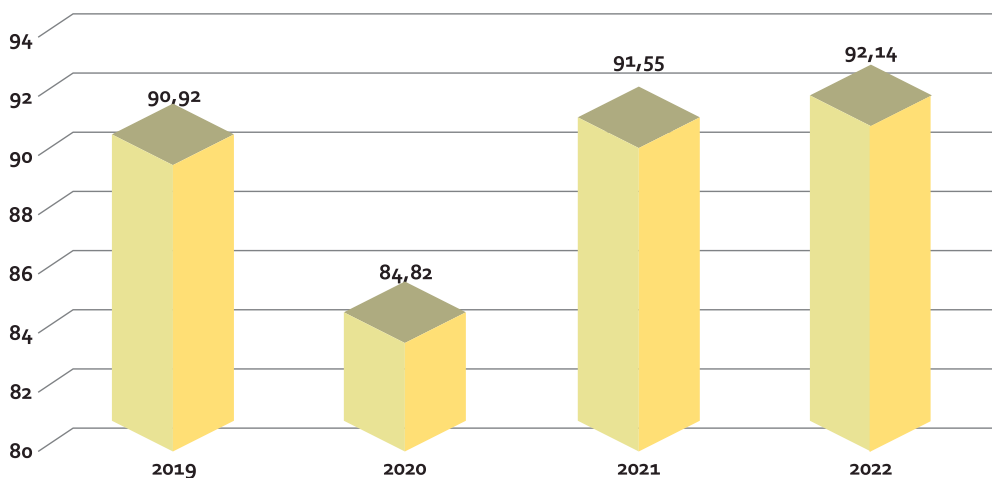
Perubahan Jumlah Aset Kementerian PUPR Tahun 2012-2022

Peraturan Menteri Keuangan 195/PMK.05/2018 menjadi landasan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, mendukung kredibilitas, akuntabilitas, dan efisiensi APBN sesuai tuntutan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada aturan/regulasi/kebijakan.
2. Menjamin pencapaian *output* pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang optimal, serta mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

3. Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang terkendali.
4. Membangun ketersediaan ruang fiskal yang memadai bagi pendanaan program-program prioritas pemerintah melalui penyempurnaan produk perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Data IKPA Kementerian PUPR terotomasi melalui sistem OM-SPAN sejak tahun 2018, namun data yang dapat diakses mulai tahun 2019. Capaian nilai IKPA Kementerian PUPR dari 2019 hingga April 2023 mencerminkan evaluasi kinerja dan informasi untuk pengambilan keputusan guna perbaikan kinerja.



Capaian Opini BPK sebagai Indikator Kualitas Laporan Keuangan Kementerian PUPR

Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian PUPR

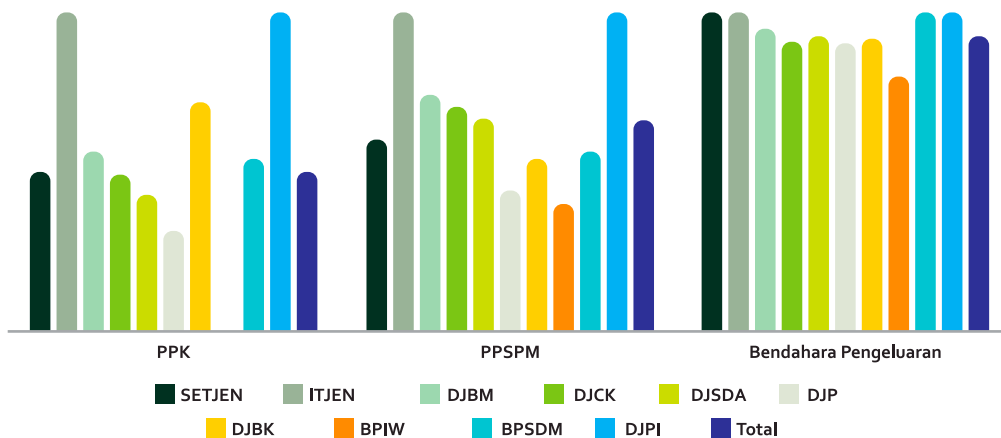
Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian PUPR diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Regulasi ini menetapkan pejabat perbendaharaan negara, termasuk pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan/pengeluaran.

Dalam lingkup APBN, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengelolaan keuangan negara diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Kementerian PUPR, sebagai pelaksana tugas di bidang infrastruktur, memiliki 4.440 pejabat perbendaharaan, termasuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

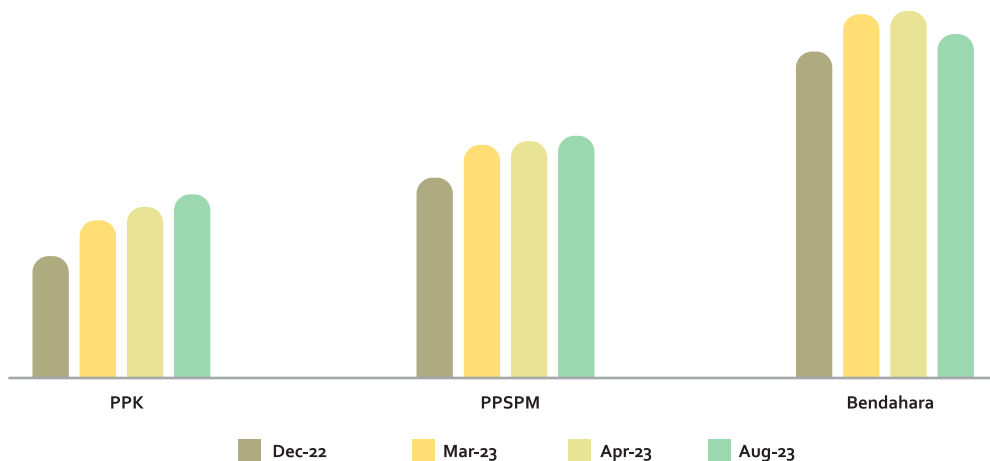
Pejabat perbendaharaan ditunjuk sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing

satuan kerja. Pejabat Perbendaharaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan penunjukkan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PUPR. Dalam hal ini, Pejabat Perbendaharaan bertanggung jawab atas material dan administrasi pengelolaan anggaran yang dikelolanya. Untuk menghasilkan pejabat perbendaharaan yang berkompeten, dilakukan sertifikasi kompetensi bagi pejabat perbendaharaan secara internal Kementerian PUPR maupun dari eksternal (Kementerian Keuangan).

Sampai dengan bulan Agustus TA 2023, telah dilakukan sertifikasi terhadap 1.138 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 468 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan 653 Bendahara Pengeluaran. Sertifikasi pejabat perbendaharaan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan anggaran di setiap satker. Pengelolaan anggaran yang berkualitas akan menghasilkan efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negeri.



Komposisi Jumlah Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi se-Kementerian PUPR



Visualisasi Progres Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dari Desember 2022-Agustus 2023

Produk NSP Bidang Keuangan

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap pejabat perbendaharaan tidak lepas dari ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, kebutuhan atas regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan termasuk petunjuk teknis/ pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, selain regulasi dari pengelola keuangan juga dari

intern Kementerian PUPR yang diterbitkan sebagai pedoman.

Selain itu, ada juga kebijakan-kebijakan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pejabat perbendaharaan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang berkualitas. Berikut disajikan Norma Standar dan Prosedur (NSP) yang dihasilkan.

Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Keuangan di Kementerian PUPR

No.	Produk NSP	Tahun
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.	2012
2.	Surat Edaran Menteri PUPR No.21/SE/M/2015 tentang Langkah-langkah yang harus dilakukan satker Dalam Rangka Perubahan Struktur Kementerian PUPR.	2015
3.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggung Jawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2016
4.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak dalam Pelaksanaan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2016

No.	Produk NSP	Tahun
5.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 03/SE/M/2017 tentang Prosedur Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja di Kementerian PUPR.	2017
6.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN di Kementerian PUPR.	2017
7.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2018
8.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).	2019
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR.	2019
10.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Pindah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2019
11.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 536/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Honorarium Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.	2020
12.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 1430/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Honorarium Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2020
13.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2020
14.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 25/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran di Masa Tatanan Normal Baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2020
15.	Surat Kepala Biro Keuangan Nomor KU.0202-Sk/618 Hal Penggunaan Akun Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	2020
16.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.	2021
17.	Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum.	2021
18.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 05/SE/M/2021 tentang Petunjuk Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.	2021
19.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10.1/SE/M/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2021
20.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 08/KPTS/M/2022: Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian PUPR.	2022

No.	Produk NSP	Tahun
21.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 218/KPTS/M/2022: Penetapan Honorarium Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2022.	2022
22.	Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022: Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR Tahun 2022 – 2024.	2022
23.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/SE/M/2022: Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pegawai Muda Teladan dan Pegawai Berprestasi Kementerian PUPR.	2022
24.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2022: Penggunaan Akun dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran.	2022
25.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 443/KPTS/M/2023: Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian PUPR di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Bulungan.	2023
26.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 03/SE/M/2023: Formula Perhitungan Usulan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional.	2023
27.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 05/SE/M/2023: Perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2018: Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pegawai Non-PNS Substantif di Kementerian PUPR.	2023
28.	Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2023: Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 di Kementerian PUPR.	2023

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyusunan laporan keuangan di Kementerian PUPR, yang mengikuti standar akuntansi pemerintah, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan Kepala Pemerintahan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern (SPIP) guna meningkatkan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Kementerian PUPR menerapkan strategi peningkatan SPIP sebagai upaya untuk inovasi tata kelola administrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Penilaian

Mandiri (PM) atas SPIP di Kementerian PUPR, terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023, mencapai tingkat maturitas 4,39 dari 5, menunjukkan penyelenggaraan SPIP yang terkelola dan terukur.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai landasan evaluasi BPKP terhadap maturitas SPIP Kementerian PUPR Tahun 2022. Hasil evaluasi BPKP terhadap Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR Tahun 2022 berada pada kategori "Terdefinisi", sebagaimana terinci pada tabel dibawah.

Komponen Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	Optimum	5,00
2.	Struktur dan Proses	Terkelola dan Terukur	4,92
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Berkembang	3,05
	• Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terkelola dan Terukur	4,39
	• Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Terkelola dan Terukur	5,00
	• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Terkelola dan Terukur	4,83

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Skor
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi	3,734
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,960
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,060

Penyelenggaraan Tata Persuratan dan Kearsipan

Tata naskah dinas merupakan bagian dari ketatalaksanaan pemerintah di Kementerian PUPR. Ini mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media dalam komunikasi kedinasan. Tata naskah dinas menjadi sarana efektif untuk menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian PUPR telah merumuskan pedoman tata naskah dinas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2019 dan perubahannya melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2020. Pedoman ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mendukung penerimaan surat di lingkungan Pusat Kementerian PUPR, Biro Umum melaksanakan kegiatan layanan penerimaan surat masuk eksternal

Kementerian PUPR di Gedung Heritage Lantai 1. Layanan penerimaan surat masuk eksternal dilakukan terhadap jasa pengiriman surat/ekspedisi dan Caraka (pengantar pesan) dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR.

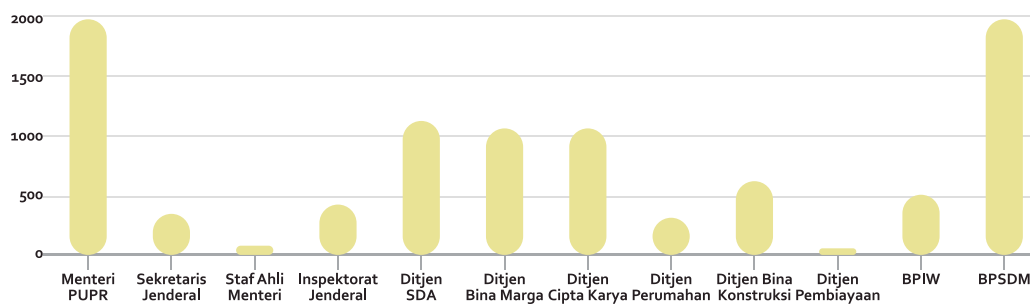
Layanan penerimaan surat masuk eksternal Kementerian PUPR dilakukan terhadap surat-surat yang ditujukan kepada Menteri, Unit Organisasi Eselon I Kementerian PUPR, dan Biro Pusat di lingkungan Kantor Pusat Kementerian PUPR.

Dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang menghasilkan banyak proyek infrastruktur, maka volume arsip yang tercipta tentunya tidak sedikit. Arsip yang tercipta tidak hanya terkait langsung dengan proyek pembangunan infrastruktur, tapi juga unsur-unsur fasilitatif seperti arsip keuangan, arsip kepegawaian, dan sebagainya.

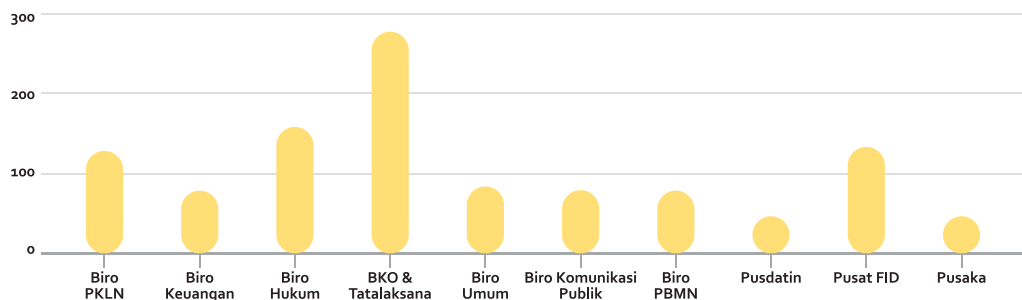
Penyelenggaraan kearsipan mengacu pada sejumlah Peraturan Menteri, yaitu:



Layanan penerimaan surat masuk eksternal Kementerian PUPR



Grafik Surat Masuk Kementerian PUPR Januari-per 31 Agustus 2023



Grafik Surat Masuk di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Januari-per 31 Agustus 2023

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2018 tentang Klasifikasi Arsip.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Semua peraturan tersebut disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di bawah bimbingan dan arahan tim dari Arsip Nasional Republik Indonesia, di tahun 2016, 2018, dan 2021. Berikut adalah tampilan dari peraturan-peraturan kearsipan.

Kementerian PUPR mengelola Pusat Penyimpanan Arsip "Gedung Kintaka" di Citeureup, Kabupaten Bogor, yang menyimpan 71.797 berkas dari 7 Unit Organisasi dan 10 Unit Kerja. Arsip inaktif dan vital disimpan dalam ruang terpisah, diatur berdasarkan unit kerja pencipta arsip, dan dicatat dalam Daftar Arsip Inaktif.

Proses ini melibatkan pimpinan Unit Kerja dengan dokumen pendukung seperti surat permohonan penataan, Berita Acara Pemindahan Arsip, dan Daftar Arsip. Peminjaman arsip diatur oleh Standar Operasional Prosedur Peminjaman Arsip yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum nomor 01/SOP/Su/2020.

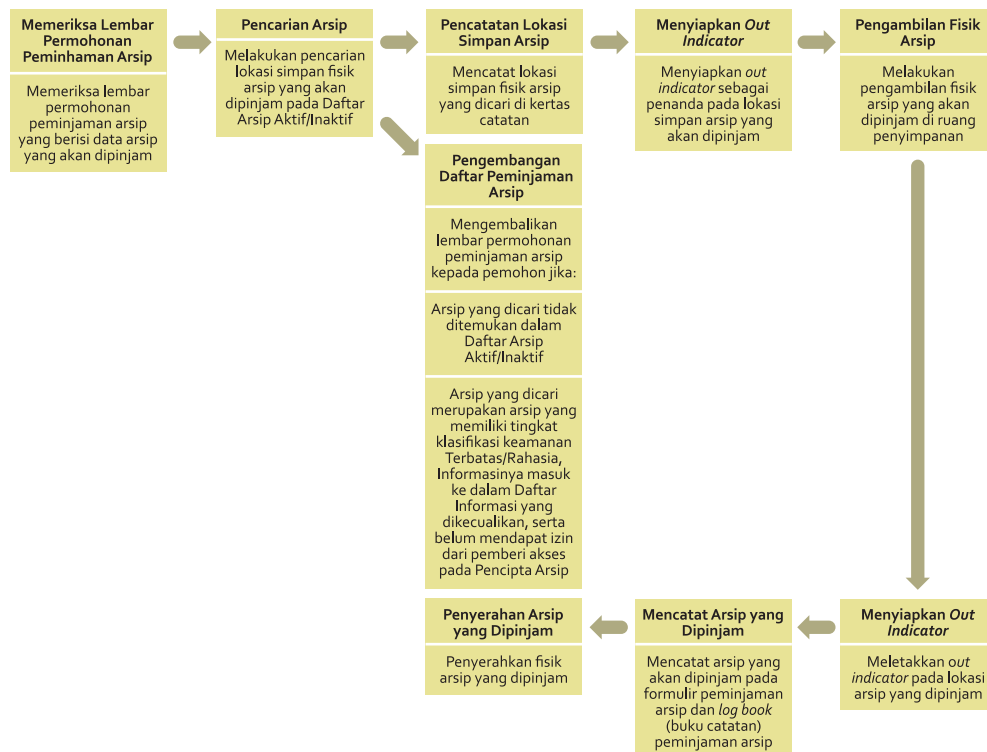
Proses ini melibatkan pimpinan Unit Kerja dengan dokumen pendukung seperti surat permohonan penataan, Berita Acara



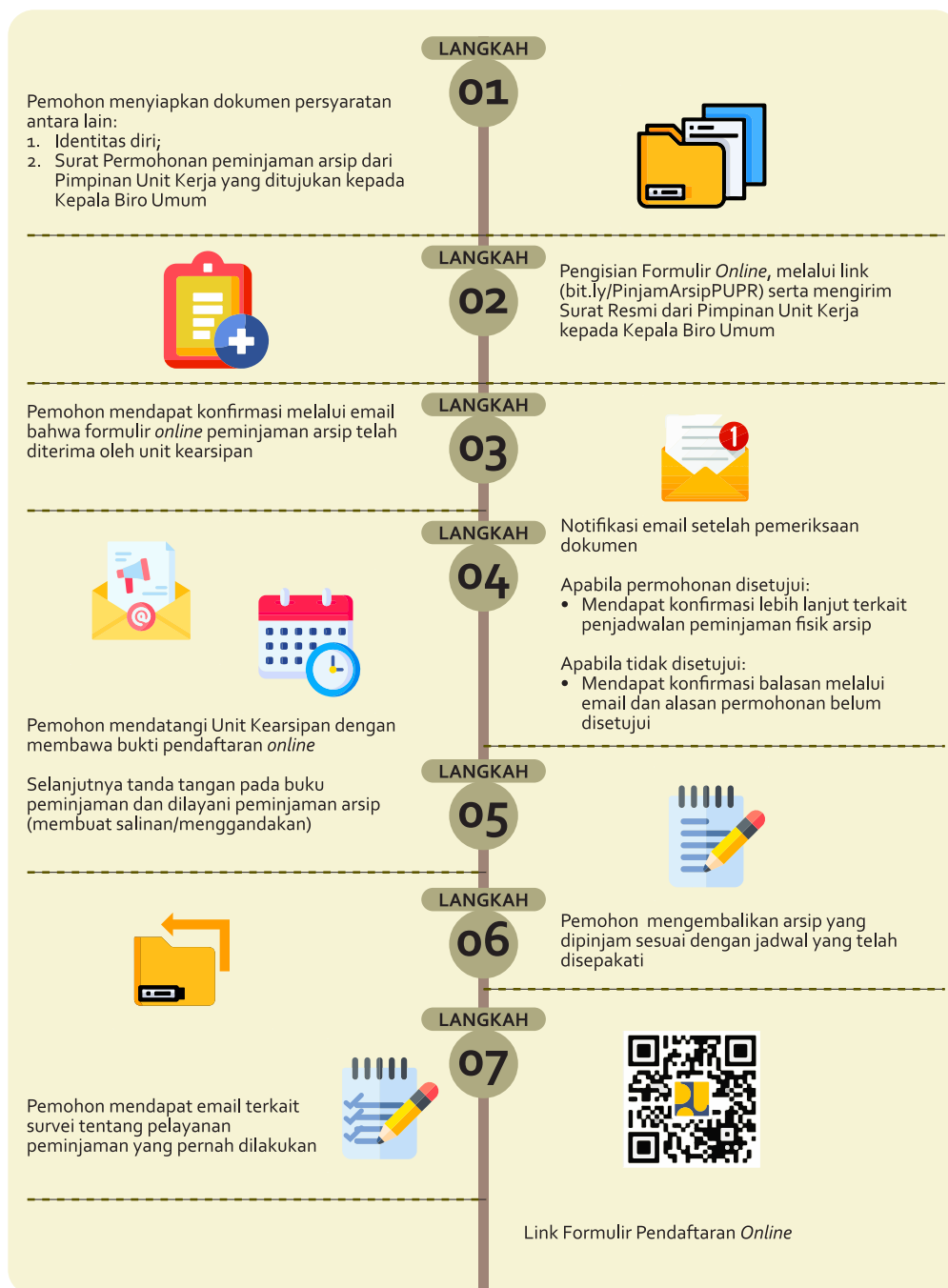
Pemindahan Arsip, dan Daftar Arsip. Peminjaman arsip diatur oleh Standar Operasional Prosedur Peminjaman Arsip yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum nomor 01/SOP/Su/2020.

Peminjaman arsip Kementerian PUPR dapat dilakukan oleh setiap unit kerja atau individu dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Jika arsip memiliki klasifikasi akses terbuka/biasa, dapat dipinjam

tanpa prosedur khusus. Namun, untuk arsip dengan klasifikasi akses terbatas, rahasia, dan sangat rahasia, peminjaman memerlukan prosedur tambahan, kecuali untuk keperluan pemeriksaan atau pihak berwenang. Unit kerja atau individu yang ingin meminjam arsip diminta mendaftarkan melalui tautan <http://bit.ly/PinjamArsipPUPR> dan menunggu persetujuan dari Biro Umum. Berikut adalah infografis alur permohonan peminjaman arsip.



Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Arsip di Kementerian PUPR



Alur Permohonan Pinjaman Arsip di Kementerian PUPR

Penghargaan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan "Penghargaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia "Atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara" di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020.



Penyerahan Arsip Statis Berupa Personal File 7 Menteri PUPR dan 8 Pejabat Eselon I pada Desember 2020 dari Sekjen PUPR ke Plt. Kepala ANRI (saat itu)

Informasi Arsip Berdasarkan Kurun Waktu

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah Arsip	Tingkat Perkembangan	Ket.
1.	KP0305	Personal File atlas nama: Prof. Dr. Ir. Suatami NPPN 01443 Tempat/Tanggal Lahir: Solo, 19 Oktober 1928 Jabatan Terakhir: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Periode 22 Februari 1966 s.d 29 Maret 1978	1968 s.d 1980	1 Berkas	Asli dan Copy	Agak Rapuh
2.	KP0305	Personal File atlas nama: Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa NIP. 110008734 Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 7 September 1934 Jabatan Terakhir: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Periode 29 Maret 1978 s.d 29 Maret 1963	1963 s.d 1997	1 Berkas	Asli dan Copy	Agak Rapuh
3.	KP0305	Personal File atlas nama: Dr. Ir. Sujono Sosrodarsono NIP. 110003274 Tempat/Tanggal Lahir: Madiun, 3 Maret 1926 Jabatan Terakhir: Menteri Pekerjaan Umum Periode 1 April 1984 s.d 31 Maret 1989	1984 s.d 1989	1 Berkas	Asli dan Copy	Agak Rapuh



Pemusnahan Arsip Inaktif Biro Umum di Gudang PT. IndoArsip Karawang pada tanggal 16 November 2022, disaksikan oleh Direktur Akuisisi Arsip Nasional RI, Tim Biro Umum, Tim Inspektorat Jenderal, dan Tim Biro Hukum

MENINGKATKAN MANFAAT BMN

Paradigma Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Mengelola Tanggung Jawab yang Besar

Kementerian PUPR bertanggung jawab mengatur, membina, dan mengawasi pengelolaan barang milik negara (BMN), termasuk aset khusus. Konsep strategic asset management diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, nilai, dan manfaat BMN, serta mengurangi risiko dan biaya terkait.

Pedoman teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 128/KM6/2022 berguna untuk merencanakan kebutuhan BMN

dengan pendekatan *resource-based view* (RBV). Perencanaan yang baik memastikan pengadaan dan pemeliharaan BMN tepat sasaran, mengurangi aset yang tidak terpakai, dan menjaga dokumentasi sesuai ketentuan.

Pengelolaan BMN secara optimal dengan digitalisasi sistem e-BMN

Implementasi *e-Government* melalui e-BMN menjadi solusi untuk meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Meskipun e-BMN memberikan manfaat seperti pencatatan BMN yang baik, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih sering mencatat permasalahan dalam pengelolaan BMN, terutama terkait manajemen SDM, pemeliharaan aset, dan penatausahaan BMN yang belum maksimal. Meskipun demikian, penting untuk memaksimalkan pengelolaan BMN karena BMN merupakan aset negara yang wajib dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan nilai aset tetap, terutama oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR. Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR mengelola anggaran yang besar. Namun, proses revaluasi aset BMN masih dihadapkan pada kendala internal dan eksternal, seperti konsentrasi pegawai, data historis yang tidak lengkap, dan pencatatan yang tidak menyeluruh.

Dengan kehadiran e-BMN, diharapkan dapat membantu satuan kerja BMN untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk penatausahaan, pemeliharaan, dan perawatan gedung. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap, aktual, dan terintegrasi baik di pusat maupun daerah.

Reformasi terhadap Pengelolaan BMN Demi Kemajuan Infrastruktur

Kementerian PUPR memiliki jumlah aset terbesar, mencapai Rp 1937,73 triliun pada tahun 2020, sekitar 29% dari total nilai BMN. Pengelolaan BMN yang optimal diperlukan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menjaga efisiensi belanja aset. Infrastruktur, salah satu prioritas kerja Presiden, menjadi fokus pembangunan Kementerian PUPR.

Pembangunan ini diharapkan menciptakan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, keciptakarya, dan perumahan.

Kementerian PUPR perlu pengelolaan BMN yang andal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik. Sebagai reformasi, Kementerian PUPR mengembangkan aplikasi e-BMN. Aplikasi ini melibatkan berbagai stakeholder, memberikan informasi siklus pengelolaan BMN dari perencanaan hingga penghapusan, serta menyediakan data master aset untuk inventarisasi BMN. Inovasi ini diharapkan memberikan efisiensi dan efektivitas.

Tampilan Aplikasi e-BMN Kementerian PUPR



Tantangan Mengelola BMN

Langkah-langkah pengamanan dan penertiban aset negara melibatkan penatausahaan, inventarisasi, sertifikasi, pengamanan fisik, pemeliharaan, dan pengawasan. Penatausahaan mencakup pencatatan transaksi dan pengarsipan dokumen terkait. Inventarisasi melibatkan verifikasi fisik dan administratif aset negara. Sertifikasi mencakup proses pengukuran dan pemetaan tanah atau bangunan.

Pengamanan fisik melibatkan pemasangan tanda identitas dan alat keamanan. Pemeliharaan melibatkan perawatan berdasarkan standar teknis. Pengawasan melibatkan monitoring, evaluasi, dan audit internal serta eksternal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset negara agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, atau kerugian keuangan negara. Dengan demikian, aset negara dapat dimanfaatkan optimal untuk mendukung tugas pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pengamanan fisik melibatkan pemasangan tanda identitas dan alat keamanan. Pemeliharaan melibatkan perawatan berdasarkan standar teknis.

FASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Air Mengalir di Saluran Irigasi, Ketahanan Pangan Bukan Obsesi

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi tinggi meningkatkan permintaan pangan, energi, dan air. Indonesia menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan, terutama di sektor pertanian yang didominasi oleh masyarakat miskin. Menurut laporan FAO, sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Ketahanan pangan, mencakup ketersediaan pangan yang cukup, mutu yang baik, aman, merata, dan terjangkau, diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Kementerian PUPR mengelola jaringan irigasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Konsumsi beras di Indonesia terus meningkat, dengan 98,35% rumah tangga mengonsumsi beras menurut Susenas BPS 2022. Rata-rata konsumsi beras perkapita pada September 2023 mencapai 6,81 kg per bulan, mendominasi pengeluaran makanan orang Indonesia. Pemerintah membuka impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sektor pertanian, khususnya melalui irigasi, berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi pertanian dengan membangun infrastruktur seperti bendungan dan irigasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) PUPR Bidang Irigasi membantu pemerintah daerah mengembangkan kawasan sentra produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi nasional.



Penerima Manfaat DAK Irigasi Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

Kementerian PUPR memastikan keberhasilan DAK Bidang Irigasi dengan melibatkan modernisasi irigasi, pembangunan sistem informasi, sinkronisasi DAK Fisik Irigasi 2021, evaluasi, monitoring, konsultasi program DAK Irigasi, dan mencapai target RPJMN 2020-2024, termasuk luasan irigasi dan rehabilitasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan meningkatkan panen dan ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan DAK Fisik Irigasi 2022 mencapai rata-rata penyaluran 84,74%. Progres fisik mencapai 94,06%, progres keuangan 80,70%, dengan rata-rata capaian immediate outcome antara 81%-100%. Sebanyak 137 Pemda mencapai 90-100%, sementara 18 Pemda di bawah 50%. Kementerian PUPR akan terus mengawal pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk meningkatkan keteraliran air dan ketahanan pangan Indonesia.

Memutar Roda Ekonomi Melalui Konektivitas Jalan Daerah

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR, termasuk jalan dan jembatan, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Konektivitas jalan yang baik mendukung sistem logistik nasional dan investasi, meskipun masih ada kendala pemrograman, penganggaran, daya dukung terhadap bencana alam, aksesibilitas terbatas, pembebasan lahan sulit, dan keterbatasan pendanaan. Pemerintah fokus pada konektivitas infrastruktur dengan kawasan produksi, industri kecil, dan sektor pariwisata. DAK dari Kementerian PUPR mendukung pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi keterbatasan anggaran daerah.



*Penerima Manfaat DAK Bidang Jalan Kabupaten
Halmahera Utara, Maluku Utara*

Selain Program DAK, Kementerian PUPR memiliki program lain, yaitu Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Program ini merupakan bantuan dari pemerintah negara lain untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan sumber dana luar negeri. Bertujuan percepatan kondisi jalan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan jalan. Diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, menarik wisatawan, dan mendorong perkembangan UMKM serta roda perekonomian.

IMD global competitiveness index di tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34 dan masuk kategori tertinggi di dunia. Hal ini karena komponen competitiveness serta daya

saing Indonesia merupakan yang terbaik di infrastruktur. Terlihat dari performa ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan dari sebelumnya peringkat 42 menjadi 29 atau naik 13 peringkat.

Menurut World Economic Forum peringkat daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2012 berada di posisi 78, menjadi ranking ke 51 pada 2023. Hal ini tentu berkontribusi terhadap status Indonesia yang masuk ke dalam daftar layak investasi di pasar global. Berdasarkan hal itu, kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian.

Minum Kopi Enak karena Air Minum yang layak

Air adalah sumber daya alam vital bagi kehidupan di Bumi. Penting untuk keperluan rumah tangga, industri, perdagangan, pertanian, dan kegiatan lainnya. Kebutuhan air mencakup kebutuhan dasar manusia, sementara pemakaian air adalah jumlah air yang digunakan dari sistem apa pun.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Air Bersih melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32/2017. Air bersih untuk sanitasi harus tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, bebas bakteri e-coli, dan rendah kandungan zat kimia. Untuk air minum, standarnya mencakup perlindungan dari pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan hewan atau bakteri. Fisik air minum yang layak mencakup tidak berbau, jernih, tawar, tidak terpapar langsung sinar matahari, suhu sejuk (10–25°C), dan tanpa endapan di bagian bawah.

Akses air minum layak di Indonesia saat ini mencapai 91,05%, masih terpaut 8,95% dari target 100% pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama stunting, dimana 60% kasus stunting disebabkan oleh kurangnya akses air bersih dan sanitasi buruk. Pemerintah merespon melalui DAK Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2024 untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Kegiatan DAK bidang air minum tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Baru untuk lokasi yang belum memiliki SPAM Jaringan Perpipaan.

2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan melalui optimalisasi kapasitas SPAM terbangun atau idle capacity dengan menambah jaringan distribusi dan unit Sambungan Rumah (SR).
3. Peningkatan kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan untuk lokasi yang sudah memiliki SPAM, namun kapasitas produksinya tidak mencukupi, melalui uprating IPA, penambahan broncaptering, atau sumur.
4. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk mendukung SPAM Regional di provinsi tertentu yang sedang atau sudah dibangun SPAM Regional.

Penerima Manfaat DAK Sanitasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah



LINGKUNGAN BERSIH, STUNTING BERKURANG, SDM BERKEMBANG

Sanitasi merupakan kegiatan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kegiatan ini meliputi mandi, mencuci, kakus, hingga mengelola sampah. Jika kegiatan sanitasi masyarakat tidak dikelola dengan baik, maka akan berakibat pada penurunan kualitas hidup hingga masalah lingkungan. Salah satu masalah yang timbul akibat sanitasi yang buruk adalah *stunting*. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022, dengan target capaian 14% pada tahun 2024. Sedangkan target rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2024 adalah 90% naik 19,1% dari tahun 2022, yaitu 80,9% rumah tangga.

Pemerintah meningkatkan akses sanitasi layak dengan membangun infrastruktur berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah, dan optimalisasi pemeliharaan fasilitas sanitasi. DAK Bidang Sanitasi, sebagai bagian transfer ke daerah, bertujuan mendanai program prioritas nasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung penyediaan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat, dengan fokus pada peran dan keterlibatan masyarakat. Manfaatnya meliputi peningkatan kesehatan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Menu kegiatan DAK bidang sanitasi tahun anggaran 2024 yang dapat diusulkan pemerintah daerah, yaitu:



Penerima Manfaat DAK Sanitasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

1. Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T skala permukiman, terdiri atas menu pembangunan IPAL skala permukiman dengan minimal 50 KK dan penambahan Saluran Rumah atau SR dengan volume maksimal 250 SR.
2. Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T, terdiri atas menu penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala perkotaan/permukiman dengan volume maksimal 500 SR.
3. Pembangunan SPALD-S, terdiri atas menu pembangunan tangki septik komunal yang disertai SR, pembangunan tangki septik individual perkotaan, pembangunan tangki septik individual perdesaan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi IPLT, serta pengadaan truk tinja.

Budaya hidup sehat dan bersih mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui alokasi DAK Infrastruktur bidang sanitasi. Pemerintah berharap masyarakat bisa hidup bersih dengan memerhatikan kebersihan yang dimulai dari rumah sendiri.

Menebar Subsidi di Perkampungan Kumuh

Pemerintah bertugas memastikan hak masyarakat atas rumah yang layak, sehat, dan aman, sesuai UU No. 1 Tahun 2011 dan SDGs. Kementerian PUPR, dalam Renstra 2015–2019, targetkan 100% akses sanitasi, air minum, dan eliminasi permukiman kumuh. Tanggung jawab ini bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMN 2020–2024 fokus pada akses perumahan dan permukiman yang inklusif, dengan DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 2023 sebagai komitmen pemerintah dalam perbaikan menyeluruh dan terpadu kawasan permukiman kumuh.

Untuk mewujudkan rumah layak huni diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dan pendanaan. Kegiatan penanganan permukiman kumuh dalam DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dapat dilaksanakan melalui 4 cara, yaitu:

1. Penanganan kawasan kumuh melalui permukiman, yaitu kawasan permukiman kumuh diratakan secara keseluruhan dan dibangun kembali di lokasi yang sama. Tujuannya untuk mengubah wajah kawasan secara keseluruhan di lokasi yang sama.
2. Pemugaran kawasan-kawasan permukiman kumuh ditangani melalui perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni sehingga dapat mengembalikan fungsi kawasan permukiman menjadi lebih baik.
3. Penanganan relokasi masyarakat di kawasan kumuh ke lokasi baru yang lebih baik dan sudah disiapkan perumahan dan permukiman yang layak.
4. Pembangunan permukiman baru, yang dimaksudkan untuk menangani backlog atau kekurangan rumah di kawasan kumuh, dengan pembangunan rumah pada lokasi baru sehingga masyarakat yang belum memiliki akses rumah yang layak dapat tinggal pada lokasi baru tersebut.

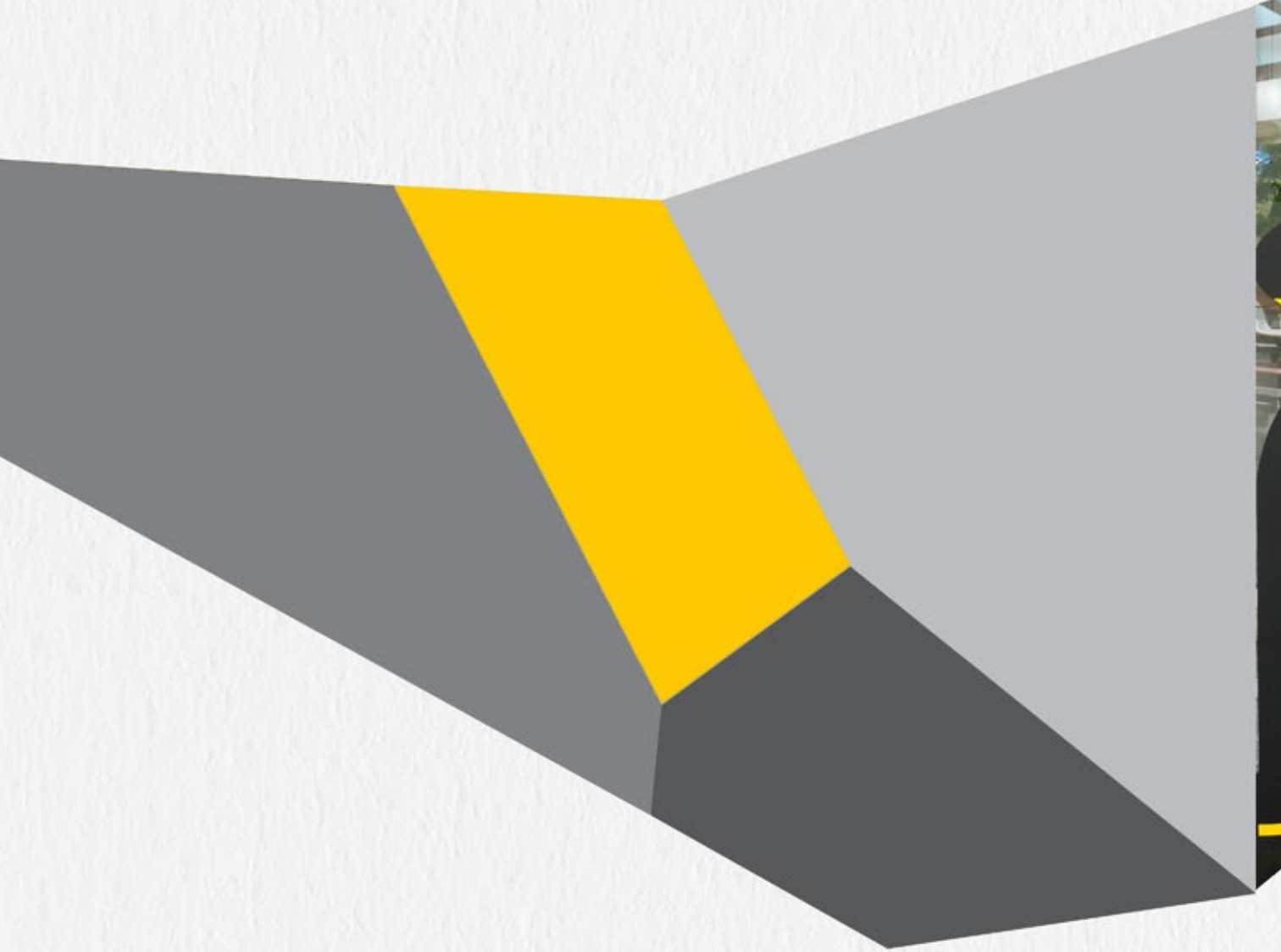
Penanganan permukiman kumuh sering kurang terintegrasi dan fokus pada satu kawasan. Rencana kegiatan dari pemerintah daerah biasanya tidak terpadu, memengaruhi pemenuhan rumah layak huni dan menghambat penanganan kawasan kumuh secara maksimal.

Kegiatan DAK sering tersebar di lokasi terpisah tanpa memperhatikan hal ini, mengakibatkan penanganan kawasan kumuh tidak optimal. Keterbatasan ini juga karena absennya aturan atau kebijakan yang mendorong integrasi bidang DAK di satu kawasan untuk mengurangi kawasan kumuh.



Penerima Manfaat DAK Integrasi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah







03

Beradaptasi dengan Proses Digitalisasi

Beradaptasi dengan Proses Digitalisasi

Terdapat tiga sasaran dari Transformasi Digital PUPR yaitu, pegawai mudah dalam bekerja, pimpinan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sehingga stakeholder puas terhadap layanan.

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK Mendukung KONSTRUKSI 4.0

Transformasi Digital Kementerian PUPR is a Must

Terdapat tiga sasaran dari Transformasi Digital PUPR yaitu, pegawai mudah dalam bekerja, pimpinan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sehingga *stakeholder* puas terhadap layanan. Agar sasaran tersebut dapat tercapai, maka Pusdatin melakukan fokus terhadap penyediaan kebutuhan dasar transformasi, yaitu terbangunnya *smart office*, tersedianya aturan, dan panduan tata kelola teknologi informasi serta sistem layanan digital yang andal dan prima.

Smart Office

Smart Office yang diharapkan merupakan konsep yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan bekerja bagi para pegawainya. Terinspirasi dari konsep milenial, yakni tidak ada batas ruang dan waktu untuk bekerja. Selanjutnya terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan performa pegawai dan organisasi.

Smart office mendukung terciptanya suasana kerja yang seimbang (*works and balance*), karena dipadukan dengan teknologi yang dapat

membuat pegawai merasa nyaman untuk bekerja dengan kreativitasnya sendiri, namun tetap terukur dan sesuai target.

Smart office akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memudahkan pegawai untuk bekerja, seperti tersedianya perangkat *working collaboration*, *flexible working space* dan *bring your own device concept*.

Kegiatan sehari-hari dari pegawai dalam bekerja dapat diakses melalui berbagai teknologi digital yang ada. Sebagai contoh, ketika pagi hari pegawai mulai beraktivitas mereka dapat mengakses absensi *mobile*. Kemudian saat bekerja menggunakan *working collaboration tool*, seperti *video conference*, tanda tangan elektronik dan berbagi dokumen dapat dilakukan atau diakses melalui email PUPR. Lalu saat sore pegawai mengisi logbook kegiatan mereka sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Selain mendukung efektivitas kerja pegawai, *smart office* juga akan memberikan efisiensi terhadap operasional perkantoran, misalnya penggunaan alat tulis kantor (ATK) akan semakin berkurang. Dengan begitu akan mengurangi penggunaan ruang penyimpanan dokumen, serta meminimalisasi hilangnya dokumen yang penting dari bahaya bencana, seperti kebakaran dan banjir.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Kementerian PUPR memiliki sumber data dan informasi yang sangat besar sehingga diperlukan panduan dan aturan agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Pada tahun ini telah direncanakan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dijadikan payung hukum dalam menegakkan rambu-rambu yang diperlukan untuk pengelolaan teknologi informasi di PUPR.

Permen SPBE ini telah mengatur seluruh komponen yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi, seperti proses bisnis, aplikasi, data, layanan, keamanan hingga sumber daya manusia. Berlandaskan Permen inilah Transformasi Digital PUPR akan dijalankan, sehingga arah dan kebijakan yang diambil akan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Layanan Digital

Layanan digital merupakan ujung tombak dari pelayanan yang disediakan PUPR untuk masyarakat. Prinsip dari penyediaan layanan digital PUPR harus berorientasi kepada kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yang berujung pada kepuasan pelanggan. Untuk itu konsep layanan PUPR secara digital harus menerapkan prinsip satu pintu akses, proses yang sederhana, dan layanan yang cepat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan adanya integrasi layanan dalam satu platform sehingga pelanggan akan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan yang diinginkan. Layanan digital PUPR berdasarkan jenis pelanggannya dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Setidaknya diperlukan dua aplikasi besar (*Super-App*) yang dapat menampung layanan-layanan PUPR untuk pelanggan internal dan pelanggan eksternal.

Super App yang ditujukan untuk pelanggan internal diberi nama 'Bravo-PUPR.' Bravo-PUPR akan menyediakan layanan yang berhubungan dengan pegawai PUPR, seperti absensi, data pegawai (e-HRM), persuratan (email PUPR dan TNDE), akses QRcode, pelatihan, kinerja, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, diharapkan seluruh kebutuhan pegawai PUPR terhadap layanan digital dapat diakses menggunakan satu aplikasi.

Selanjutnya, untuk pelanggan eksternal diberi nama 'Sahabat-PUPR.' Sahabat-PUPR akan menyediakan layanan yang berhubungan dengan pelanggan eksternal, seperti layanan informasi publik, layanan pengaduan, perizinan, pengujian, pengadaan barang dan jasa, media sosial dan sebagainya. Sama halnya seperti Bravo PUPR, Sahabat-PUPR diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan eksternal terhadap layanan digital PUPR, dengan memberikan kemudahan akses dalam satu aplikasi.



Prinsip dari penyediaan layanan digital PUPR harus berorientasi kepada kemudahan dan kecepatan pemberian layanan yang berujung pada kepuasan pelanggan.

Roadmap: Kegiatan Transformasi Digital

Rencana Strategis Kegiatan Transformasi Digital

 Model Bisnis Digital	SMART OFFICE	LAYANAN DIGITAL	TATA KELOLA
 Proses Bisnis Digital	Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran Kemudahan dan Kenyamanan Bekerja secara Digital	Layanan yang Akurat, Cepat, Terkini Mudah Diakses, Terintegrasi, dan Berbagi Pakai Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja) Inovasi dan Teknologi Terbaru	Manajemen Perubahan Digital
 Cara Bekerja Digital	<i>Working Collaboration</i> <i>Flexible Space Working</i> <i>Bring Your Own Device</i> <i>Work and Life Balance</i> Ruang Kerja Millineal Tanda Tangan Digital	Integrasi Data dan Layanan Penyederhanaan Platform Aplikasi (Bravo dan Sahabat PUPR) Penguatan <i>Helpdesk</i> Informasi <i>Real Time</i> Laporan Layanan Kolaborasi dengan Industri Digital	Peningkatan Kompetensi SDM IT <i>Knowledge Management</i> Talenta Muda Melek Digital Penguatan Jabatan Fungsional Manajemen Transformasi Digital <i>Promotion/Marketing</i>

Target dan Fokus Kegiatan Transformasi Digital

TARGET

Peningkatan Efisiensi & Efektifitas dalam Bekerja

Terciptanya Budaya Bekerja secara Digital

Perubahan Orientasi Layanan TI yang Mudah dan Cepat

Ketersediaan Data Bidang PUPR yang Terintegrasi

FOKUS



SDM PUPR Menguasai Cara Bekerja Secara Digital



Stakeholders Mudah dalam Mengakses Data dan Informasi PUPR



Tersedianya Teknologi Informasi yang Mendukung Konstruksi 4.0

Pembuatan Akun *GSuite* untuk 33.000 SDM PUPR

Sosialisasi *Work Collaboration* Menggunakan *GSuite*

Registrasi Tanda Tangan Elektronik untuk Pejabat Tinggi dan Pejabat Asministrator

Penyediaan Infrastruktur dan Aplikasi TI untuk Mendukung Bekerja di Berbagai Tempat

On The Job Training bagi CPNS agar Menguasai Cara Bekerja secara Digital

Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan *Surveyor*

Pembuatan *Platform Bravo* PUPR untuk Layanan Internal PUPR

Pembuatan *Platform Sahabat* PUPR untuk Layanan Eksternal PUPR

Penyediaan Layanan *Helpdesk* yang Siap Memberikan Solusi Cepat

Penyediaan *Knowledge Management* Bidang PUPR

Penyediaan *Dashboard* Data Ke-PUPR yang menyediakan data *Real Time* sebagai Bagian dari Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan

Kerjasama dengan Institusi Lain terkait dengan Berbagai Pakai Data dengan Prinsip saling Melengkapi

Pelaksanaan Kompetisi dan Pemberian Penghargaan sebagai Motivasi untuk Peningkatan Pelayanan

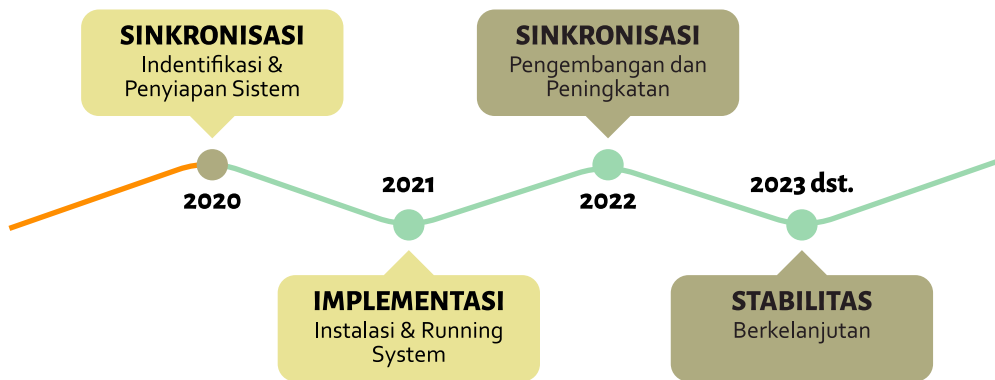
Penyediaan Sister *Big Data* sebagai *Data Warehouse* Konstruksi PUPR

Penyediaan Data Teknis yang Berorientasi pada Data Kinerja dan Manfaat Infrastruktur

Penyediaan Data Terkait Kebencanaan yang Mendukung Kesiapsiagaan PUPR dalam Penanganan Bencana

Kerjasama dengan Industri Digital untuk Pengembangan *Building Information Technology* (BIM)

Memberi Dukungan Direktorat Teknis dalam Pembuatan/ Pengembangan Aplikasi Teknis Bidang PUPR



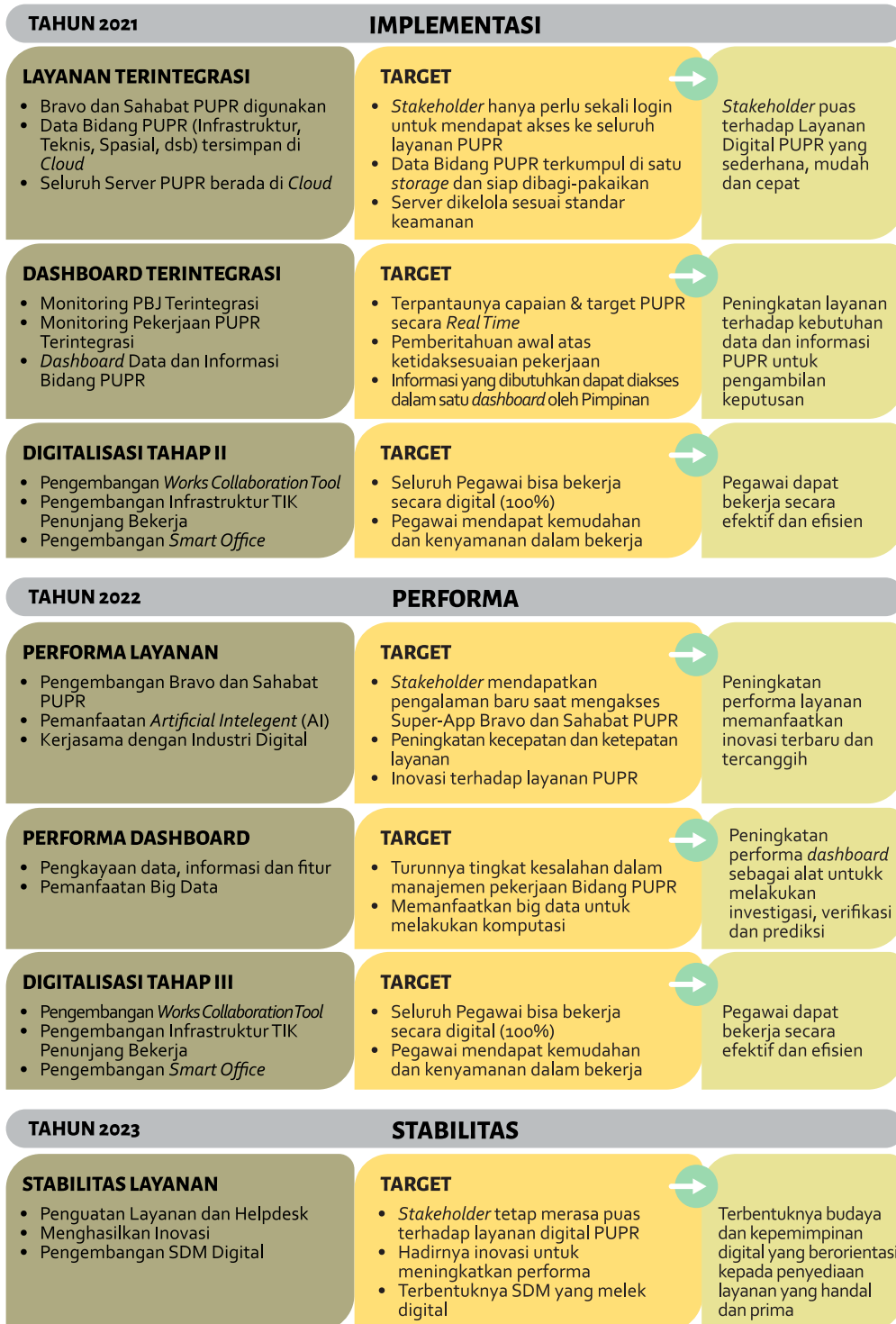
4 Fokus Tahunan dalam Proses Tranformasi Digital Kementerian PUPR

Program kerja Pusdatin difokuskan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang diyakini sebagai masa krusial dalam proses Transformasi Digital. Fokus tahunan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu sinkronisasi, implementasi, performa dan stabilitas. Di

masing-masing fokus Pusdatin akan bekerja dengan porsi yang lebih besar terhadap output yang ingin dicapai, sedangkan tiap tahapan telah terangkai satu dengan tahapan lainnya sehingga akan menciptakan kesinambungan program kerja.

Roadmap Transformasi Digital PUPR Tahun 2020-2023

TAHUN 2020 SINKRONISASI		
IDENTIFIKASI - Pendanaan dan Inventarisasi aplikasi yang aktif di PUPR - Pengumpulan Data Bidang PUPR (Infrastruktur, Teknis, Spasial, dsb.) di sistem Cloud	TARGET - Memdapat gambaran kondisi eksisting aplikasi dan ketersediaan data bidang PUPR - Merumuskan Arsitektur Ideal untuk integrasi aplikasi dan data bidang PUPR	→ Menumbuhkan Kesadaran untuk berbagi data bukan memperbanyak aplikasi
PENYIAPAN SISTEM - Migrasi Server ke Cloud - Pembuatan Super-App: Bravo dan Sahabat PUPR	TARGET 25% dari total Server PUPR migrasi ke Cloud - Launching Super-App Layanan Digital PUPR	→ Meningkatkan layanan data dan manajemen teknologi informasi
DIGITALISASI TAHAP I - Pemanfaatan <i>Works Collaboration Tool</i> - Keluarnya Permen PUPR tentang SPBE	TARGET - Pegawai bisa bekerja secara digital (3200 pengguna) - Unit Organisasi dan Pegawai memiliki panduan dan aturan dalam Penyelenggaraan SPBE	→ Memperkenalkan budaya bekerja secara digital dengan dukungan aturan tata kelola SPBE





Bravo PUPR sebagai Bentuk Transformasi Digital Layanan Internal PUPR

MEWUJUDKAN DATA DAN STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR YANG BERKUALITAS

Data dan Statistik Infrastruktur PUPR yang Berkualitas

Data dan informasi infrastruktur bidang PUPR sangatlah beragam. Dengan kondisi tersebut, Kementerian PUPR membuat sebuah data-warehouse untuk menampung seluruh data dalam satu sistem. Sistem ini akan menyimpan, membagikan (sharing), mengolah, serta menyajikan bentuk informasi yang mudah dilihat oleh pengguna.

Kementerian PUPR telah membuat portal data dan infrastruktur PUPR yang dapat diakses melalui sigi.pu.go.id. Terdapat berbagai fitur dalam portal tersebut seperti portal *open data*, katalog data, Sitaba (Sistem Tanggap Bencana), peta infrastruktur, editor data aset spasial, geoportal, *dashboard* infrastruktur, *data warehouse* (DWH), layanan spasial, dan public geo API.

Digitalisasi Data Infrastruktur melalui Platform SIGI

Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur atau lebih dikenal dengan SIGI menghimpun data dan informasi dari berbagai unit organisasi di Kementerian PUPR. Dalam portal ini secara mandiri unit organisasi dapat melakukan pemutakhiran data dan informasi sektoral yang mereka miliki. Data dan informasi yang masuk akan langsung diolah secara otomatis maupun semi-manual untuk dijadikan bahan laporan atau informasi yang berguna bagi berbagai kepentingan.

Dashboard infrastruktur menyajikan informasi baik statistik maupun geospasial dari infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia. Data yang disajikan terdiri atas jumlah infrastruktur yang terinventarisasi dan jumlah infrastruktur yang sudah dipertakan di sistem informasi geografis Pusdatin. Pusdatin sampai saat ini terus melakukan integrasi data dengan walidata dan produsen data di unit organisasi agar seluruh infrastruktur yang telah terinventarisasi dapat muncul di dashboard.



Dashboard Infrastruktur Kementerian PUPR pada Website sigi.pu.go.id

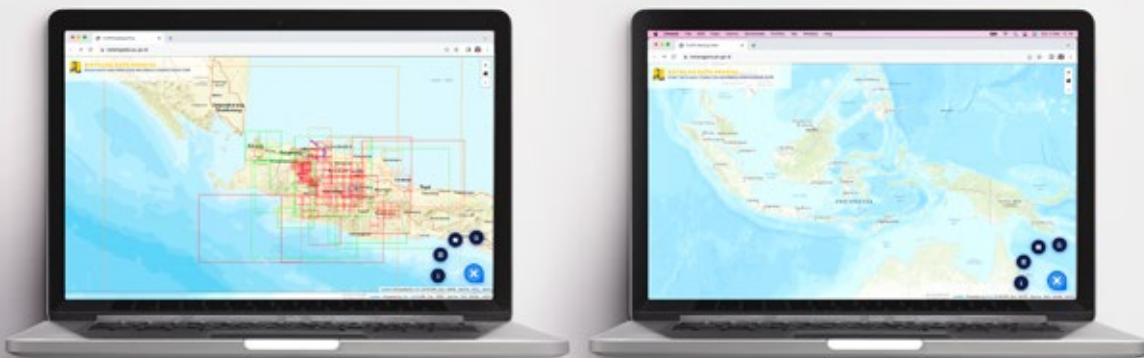
Geoportal Sistem Informasi Geografis Infrastruktur PUPR merupakan platform pemasukan, penyimpanan, publikasi, pemutakhiran, berbagi-pakai, dan diseminasi data dan informasi geospasial di lingkungan Kementerian PUPR. Geoportal ini menampung berbagai data spasial dari berbagai sektor infrastruktur PUPR. Data spasial sebagian besar berbentuk peta dengan layer-layer yang dapat dibagi-pakai untuk berbagai keperluan. Untuk dapat mengakses Geoportal SIGI, pengunjung memerlukan akun user SIGI Portal. Hingga saat ini terdapat 167 user dengan total 21.262 data yang dapat dimanfaatkan oleh internal Kementerian PUPR.

Data Spasial yang dikelola dan disajikan oleh Pusdatin terdiri atas data yang dikelola dan dihasilkan oleh Pusdatin maupun dari unit organisasi di bawah Kementerian PUPR. Data spasial PUPR digunakan oleh

stakeholder internal maupun eksternal. Untuk memudahkan akses data tersebut, Pusdatin telah menyiapkan layanan data spasial yang terdiri atas Katalog, Locket Peta, dan Geoportal. Seluruh data tersebut dapat diperoleh secara online maupun cetak hardcopy sesuai kebutuhan.

Katalog Data Spasial berisi peta dasar, peta tematik, foto udara, dan citra satelit yang tersimpan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR. Data yang tersedia di katalog ini bukan merupakan data format asli (bisa diolah) dan hanya ditujukan untuk memberi informasi kepada publik mengenai jenis data dan informasi geospasial yang tersedia di Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR.

Locket Peta Infrastruktur menyediakan peta yang berisikan informasi infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR di



seluruh Indonesia. Peta dibagi berdasarkan tahun untuk memudahkan pengguna memilih preferensi tahun yang diinginkan. Selain tahun peta infrastruktur Indonesia, juga ditampilkan dengan berbagai edisi pulau, seperti edisi pulau Jawa, pulau Kalimantan, dan sebagainya. Peta infrastruktur berisikan informasi profil, lokasi, kondisi, dan data pendukung infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR setiap tahunnya.

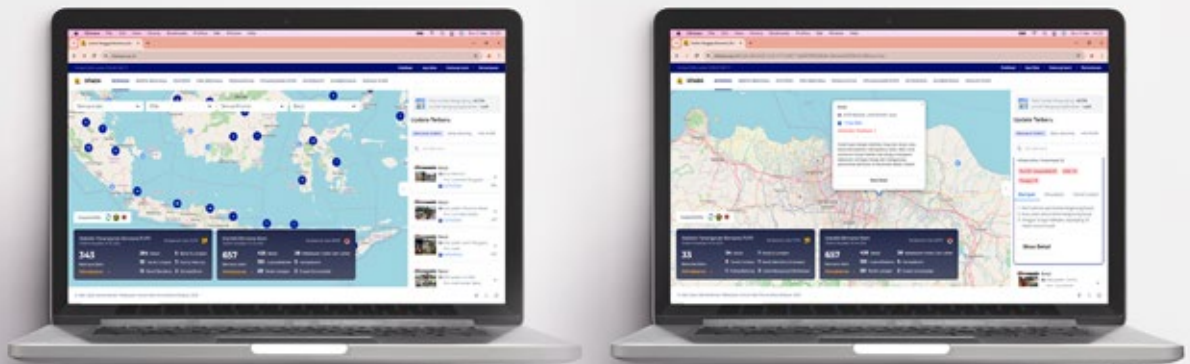
Editor Data Aset Spasial merupakan aplikasi berbasis web yang ditujukan untuk memfasilitasi editing dan updating data aset infrastruktur PUPR yang tersimpan di dalam database sentral aset infrastruktur PUPR. Kemampuan editing dan updating yang tersedia meliputi editing data tabular dan editing data spasial (lokasional). Aplikasi ini terintegrasi dengan e-HRM untuk mekanisme *login-logout*, sehingga setiap pengguna dari tingkat balai hingga unit kerja pusat

dapat mengakses dan melakukan tugas-tugas manajemen dan updating data aset infrastruktur PUPR.

Tata Kelola Bencana Infrastruktur melalui Platform SITABA

Data bencana yang dikelola dan disajikan oleh Pusdatin bukan merupakan data bencana dasar yang digunakan sebagai data utama dalam penanganan bencana nasional. Pusdatin hanya mengelola data dasar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk dijadikan informasi lanjutan yang terkait dampaknya kepada infrastruktur PUPR.

Sistem Tanggap Bencana (SITABA) adalah sebuah platform untuk dapat memberikan gambaran penanganan bencana yang dilakukan PUPR dalam setiap fase siklus



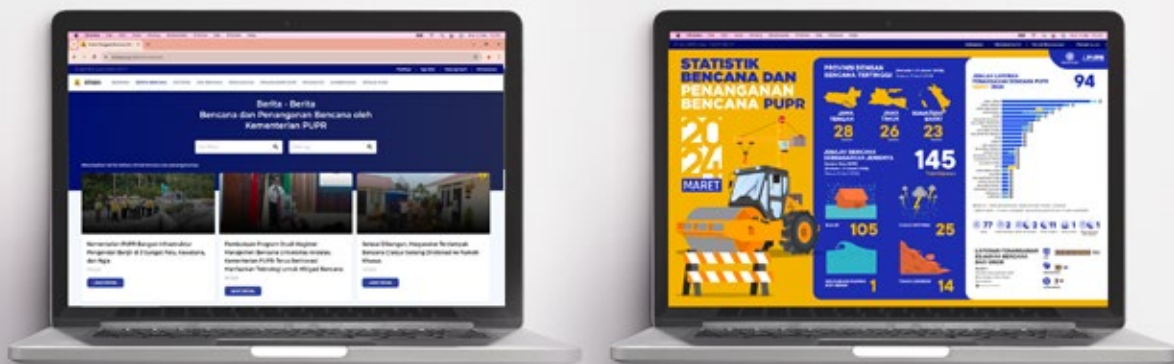
penanganan bencana (*disaster management cycle*), antara lain pendataan kejadian bencana, pemberian bantuan darurat bencana, penanganan tanggap darurat, perbaikan infrastruktur saat pemulihan, serta pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi. Platform ini berhasil mengintegrasikan data secara *real time via Application Programming Interface (API)*, menjadi *single source of truth for data*, hingga memiliki kemampuan analitik data kebencanaan secara statistik dan spasial.

SITABA lahir berlandaskan atas semangat kolaborasi dengan masing-masing unit organisasi (eselon I) di Kementerian PUPR dan Pihak eksternal seperti BNPB, BMKG, ESDM, Kominfo, dan Google. Kolaborasi ini berjalan dengan baik. Kami terus mematangkan gagasan-gagasan kolaboratif lainnya agar penanganan bencana PUPR menjadi lebih baik. Sitaba dapat diakses melalui website sitaba.pu.go.id yang memiliki fitur histori bencana, kebijakan, prabencana, statistik, penanganan PUPR, dan infografis.

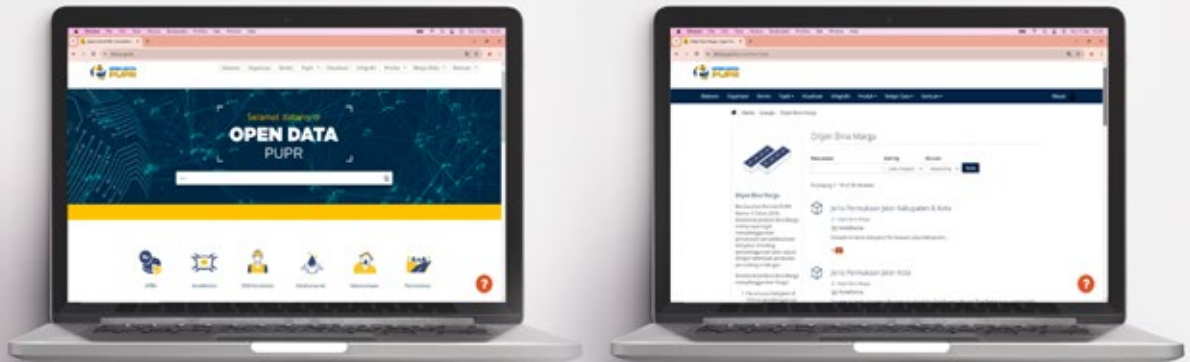
Sitaba mengeluarkan statistik penanganan bencana dalam bentuk peta geospasial yang dilengkapi dengan tag lokasi, deskripsi kejadian, foto dokumentasi, dan hasil penanganannya. Data dapat dilihat berdasarkan bulan tahun serta lokasi yang keluar di peta.

Terkait dengan upaya preventif penanganan bencana, Sitaba mengeluarkan halaman prabencana yang terdiri atas mitigasi bencana, kesiapsiagaan, analisis, dan siaga bencana. Modul ini yang memberikan informasi tentang informasi kejadian gempa bumi terkini, potensi curah hujan, ketinggian muka air, aktivitas gunung berapi, pergerakan tanah, dan pasang surut air laut.

Data pada modul ini merupakan hasil integrasi baik dari internal PUPR maupun dari K/L seperti BNPB, BMKG dan ESDM. Tujuannya untuk kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi bencana yang memberikan dampak bagi infrastruktur PUPR. Sitaba juga mengeluarkan infografis bencana terkini sebagai informasi kepada pengelola infrastruktur dan publik.



Beberapa Menu yang Dapat Diakses pada Website sitaba.pu.go.id meliputi Berita Bencana, Data Statistik dan Penanganan Bencana



Dashboard Open Data Kementerian PUPR pada Website data.pu.go.id

Data Statistik yang Modern dan Informatif

Open Data PUPR berisi data terbuka dan informasi terkait infrastruktur PUPR serta data terkait lainnya yang telah dimiliki oleh Pusdatin. Open Data PUPR juga sebagai media bagi pakai data tabular dan format lainnya yang didukung untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan data yang ada. Berikut ini data yang dibagikan kepada pengguna.

Dataset :

Kontainer himpunan data yang sejenis yang memiliki *metadata* yang sama, misalnya *dataset* kemandapan jalan yang di dalamnya terdiri atas beberapa *resource*.

Data Resource :ww

Jika *dataset* adalah kontainernya, maka *resource* adalah isi data berupa tabel. Satu *dataset* biasanya terdiri atas satu atau lebih *resource*, misalnya *dataset* kemandapan jalan dapat berisi *resource* data tahun 2018, 2019, dan seterusnya. *Resource* biasanya data-data yang disimpan dalam format *excel*, *csv*, *geojson*, dan lain-lain.

Visualisasi :

Data dalam bentuk grafik dan *dashboard* yang interaktif.

Infografis :

Data dalam bentuk gambar, grafis dalam format *jpg*, *png*, atau *gif*.

Produk :

Publikasi hasil pekerjaan Pusdatin seperti Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR tahunan serta dapat diisi publikasi dari unit kerja atau unit organisasi lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur PUPR, seperti Buku Kondisi Jalan Nasional dari Bina Marga.

Grup :

Pengelompokkan data berdasarkan unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen SDA, dan Ditjen Perumahan.

Stories :

Ruang bagi pegawai Kementerian PUPR untuk mempublikasikan artikel, infografis, maupun konten hasil analisis data terkait pembangunan infrastruktur atau kebijakan yang relevan.



Visualisasi Data Sektoral Bidang PUPR di Website data.pu.go.id

Sampai dengan bulan Agustus 2023, dalam Portal Open Data PUPR terdapat 132 *dataset*, 432 *resources*, 12 visualisasi, 126 infografis, 23 produk, dan 6 grup. Tercatat sebanyak 185.832 pengunjung mengakses *Portal Open Data PUPR* sejak Januari 2022. Pengunjung paling banyak mengakses pada konten dataset serta infografis.

Buku Informasi Statistik (BIS) merupakan publikasi berkala berisi kumpulan data dan informasi infrastruktur PUPR dan data terkait lainnya. Tujuan penyusunan buku BIS ini adalah untuk menyajikan data dan informasi statistik infrastruktur dalam agregat provinsi tahunan. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pembangunan

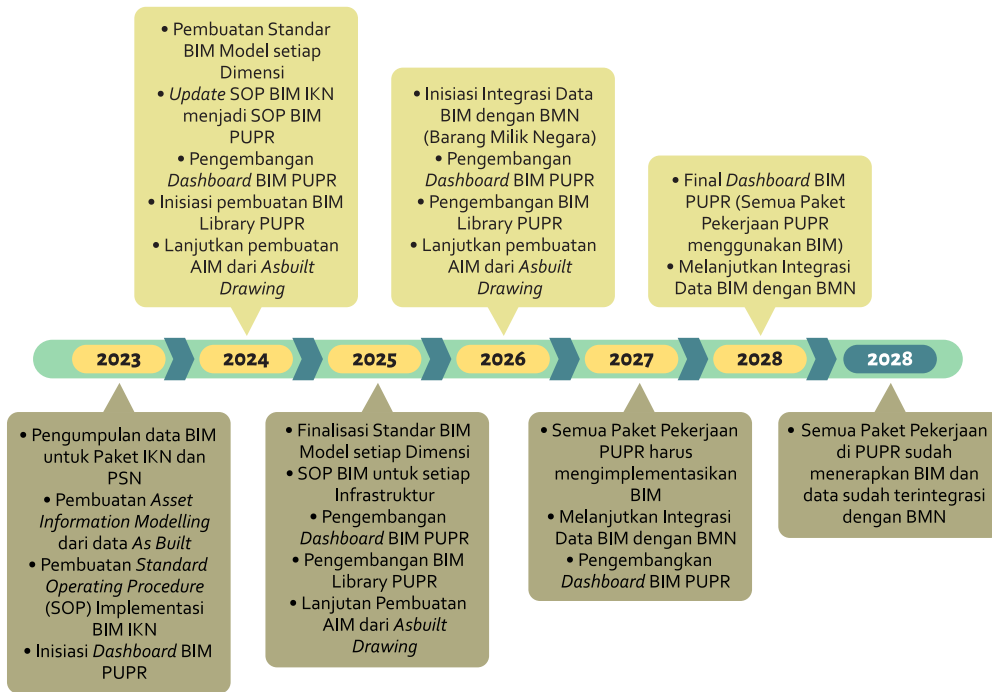


Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur Kementerian PUPR

infrastruktur bagi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi pemerintah lain, akademisi, serta masyarakat umum.

Secara garis besar Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR menyajikan data infografis yang disertai analisis deskriptif. Data yang disajikan mencakup hasil pembangunan infrastruktur dalam bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, serta Perumahan.

Adapun data penunjang lainnya seperti data kepegawaian dari Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, data konstruksi dari Bina konstruksi, data APBN dari Biro PAKLN, serta data demografi dan data administrasi wilayah indonesia dari K/L lain yaitu BPS. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur PUPR kepada masyarakat atau publik.



Roadmap Implementasi Building Information Modelling (BIM) di Kementerian PUPR Tahun 2023-2028

Konstruksi 4.0 dalam Pembangunan IKN

Implementasi *Building Information Modelling* (BIM) untuk *Digital Construction*

Penerapan teknologi berbasis 4.0, terutama Building Information Modelling (BIM), di Kementerian PUPR telah membawa transformasi signifikan dalam dunia konstruksi. Melibatkan pemodelan 3D untuk semua elemen infrastruktur, identifikasi konflik (*clash detection*) guna menghindari masalah konstruktif, informasi jadwal pelaksanaan 4D, integrasi biaya 5D, dan pemanfaatan BIM pada operasi dan pemeliharaan, strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek konstruksi tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam manajemen aset dan pengurangan biaya operasional.

Command Center IKN untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan IKN

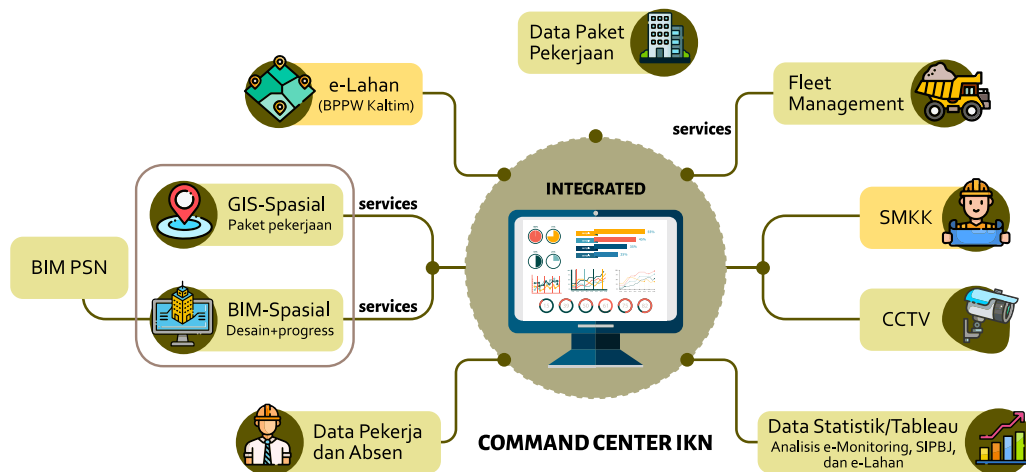
Pemindahan Ibu Kota menjadi fokus pemerintah saat ini dikarenakan krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, selain itu pula adanya penurunan daya dukung lingkungan, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah di DKI Jakarta oleh karena itu pembangunan ibu kota baru perlu segera dilakukan. Kementerian PUPR pada tahun 2022-2024 (pemindahan tahap) awal bertanggung jawab terhadap:

1. Penyediaan infrastruktur dasar utama yang harus segera dibangun dan beroperasi seperti infrastruktur penyediaan air minum, kelistrikan, TIK, pengelolaan persampahan, dan air limbah.

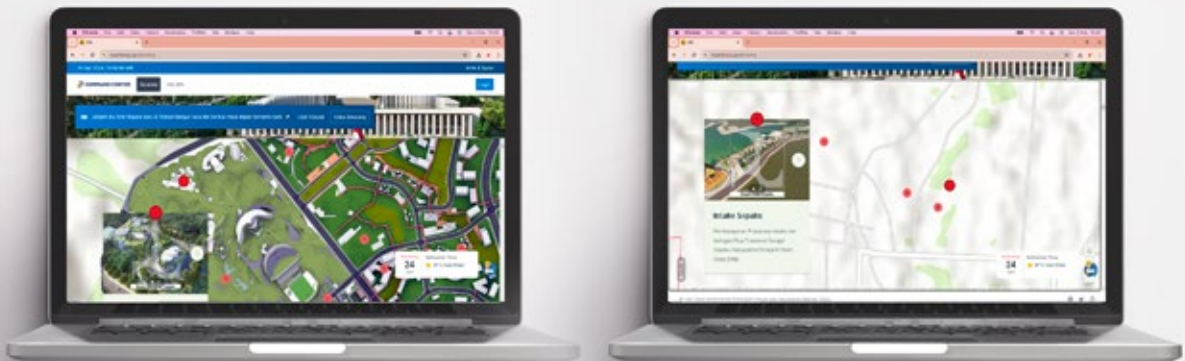
2. Membangun sarana utama seperti kantor presiden, perkantoran pemerintahan, dan kompleks rumah dinas menteri dan perumahan ASN di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
3. Pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri.

4. Melakukan inisiasi sektor-sektor prioritas.

Untuk mendukung upaya tersebut Kementerian PUPR telah menyusun sistem informasi *Command Center IKN* sebagai *tools monitoring* dan evaluasi pembangunan IKN.



Komponen dalam Sistem Informasi Command Center IKN



Dashboard Sistem Informasi Command Center IKN pada Website nusantara.pu.go.id

MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI SPBE

Implementasi SPBE

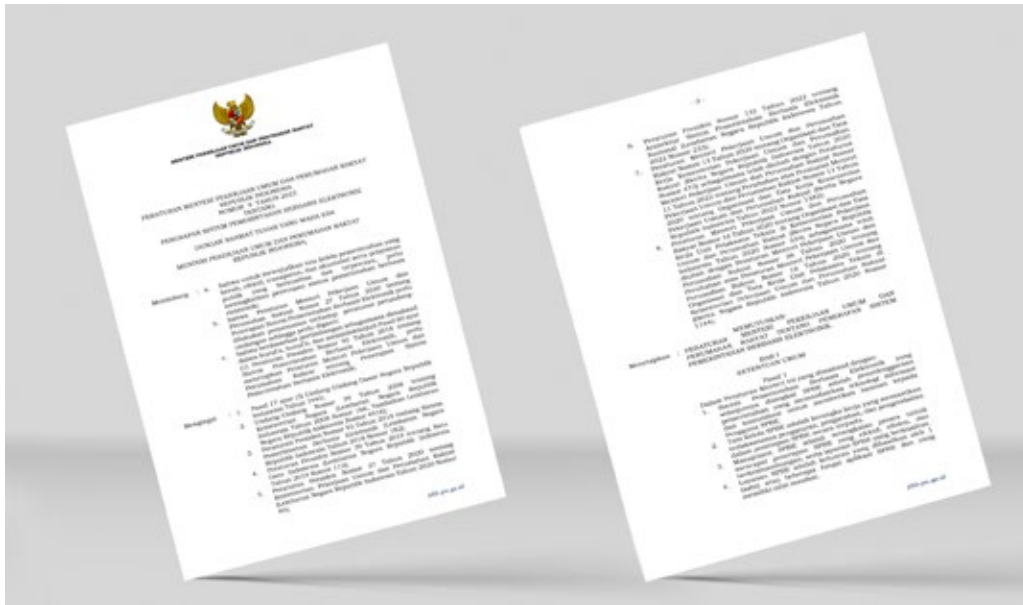
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta mengakomodasi masukan dari berbagai pihak selama diterapkannya ketiga peraturan tersebut, perlu adanya perbaikan terhadap ketiga peraturan tersebut.

Selain itu, sesuai arahan Presiden RI untuk melaksanakan penyederhanaan terhadap peraturan yang ada (*omnibus law*), maka ketiga peraturan tersebut akan diganti dengan satu peraturan yang mengakomodasi substansi dari ketiganya.

Pembahasan peraturan pengganti ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Seiring dengan

masukan dari berbagai pihak, yaitu unit kerja terkait di Kementerian PUPR, maupun instansi pemerintah terkait, rancangan peraturan yang disusun masih perlu diperbaiki dan diperkaya substansinya, baik pada batang tubuh maupun lampiran.

Setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan, pada tahun 2020, pada akhirnya diterbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Peraturan ini memastikan terlaksananya pengaturan, pengarah, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Seiring berjalannya waktu, diperlukannya penyesuaian implementasi di Kementerian PUPR sehingga ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2023. Pada tahun 2021



Pembaruan Payung Hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE

Hasil Evaluasi SPBE

HASIL EVALUASI SPBE 2021	
Nama Form	Evaluasi SPBE 2021
Tahun	2021
Deskripsi	Evaluasi SPBE 2021
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	
K/L/D	Kementerian
Indeks SPBE	3,48
Predikat SPBE	Baik
NILAI INDEKS	
Domain Kebijakan SPBE	4.6
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4.6
Domain Tata Kelola SPBE	3.1
Perencanaan Strategis SPBE	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.75
Penyelenggara SPBE	1.5
Domain Manajemen SPBE	2.09
Penerapan Manajemen SPBE	2.5
Audit TIK	1
Domain Layanan SPBE	3.87
Layanan Administrasi Pemeritahan Berbasis Elektronik	3.9
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.83

dilaksanakan evaluasi penerapan SPBE di Kementerian PUPR. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menyatakan bahwa setiap instansi pusat maupun daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang disusun oleh Kementerian PAN RB (Peraturan Menteri PANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Untuk memastikan penerapan SPBE di Kementerian PUPR dilaksanakan dengan baik, diperlukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi mandiri SPBE telah dilakukan dari tahun 2019 dengan hasil nilai 3.17 atau kategori baik. Tahun 2020 indeks SPBE Kementerian PUPR meningkat menjadi 3.91, dengan kategori sangat baik. Tahun 2021 hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB, Kementerian PUPR mendapatkan nilai 3.48, dengan kategori baik.

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE. Terdapat tiga domain yang menjadi penilaian tingkat kematangan SPBE, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Domain Kebijakan terbagi menjadi dua aspek, yaitu Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan Layanan. Aspek Kebijakan Layanan lebih mendominasi oleh aspek Kebijakan Tata Kelola. Domain Tata Kelola terbagi menjadi tiga aspek, yaitu Kelembagaan, Strategi, dan Perencanaan, dan TIK. Domain Layanan terbagi menjadi dua aspek yaitu Layanan Administrasi dan Layanan Publik.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa domain kebijakan SPBE mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 4,6. Hal ini didapat dari pengelolaan kebijakan internal dan tata kelola SPBE di Kementerian PUPR yang baik.

Domain yang mendapatkan nilai baik lainnya adalah Layanan SPBE sebesar 3.87 yang didapat dari penilaian terhadap layanan administrasi dan layanan publik. Nilai yang masih kurang dan harus ditingkatkan kembali, ada pada domain Manajemen SPBE, yakni nilai untuk audit TIK hanya mendapatkan angka 1.

Peningkatan layanan SPBE diharapkan mampu menjaga kualitas pengelolaan platform digital dan terciptanya transparansi serta akuntabilitas penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah bidang PUPR kepada masyarakat. Adapun lingkup pengelolaan *platform* digital meliputi:

1. Media Sosial
2. Laman (*Website*)

3. Surel (*e-mail*)
4. Kapasitas *bandwidth*
5. Virtual Meeting dan Jaringan Nirkabel (*Wifi*)

Integrasi Perizinan dengan OSS

Aplikasi Portal Perizinan merupakan aplikasi yang ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin mengajukan perizinan di Kementerian PUPR. Aplikasi ini juga telah terkoneksi dengan *Online System Submission* (OSS) yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi ini memberikan layanan perizinan seperti perusahaan SDA, pemanfaatan bagian jalan tol dan jalan nasional, perizinan penyelenggaraan bangunan gedung serta sertifikasi terkait badan usaha dan kompetensi kerja jasa konstruksi.

Penyediaan Super Apps PUPR

Salah satu Super Applications di Kementerian PUPR yaitu Bravo PUPR. Bravo PUPR merupakan aplikasi yang digunakan sebagai portal untuk mengakses berbagai data dan layanan kepegawaian Kementerian PUPR seperti presensi, data pegawai, data vaksin serta data kegiatan di PUPR. Bravo PUPR memberikan kemudahan bagi pegawai PUPR untuk melihat data dan mengakses layanan dengan sekali login. Beberapa fitur yang dapat ditemukan di Bravo PUPR seperti data keuangan, data kepegawaian, data kinerja, vaksin, e-monitoring, data persuratan, knowledge management, koperasi, dan sebagainya.

Selain bravo, Kementerian PUPR juga menyediakan platform pengaduan dan pengurusan perizinan bidang PUPR melalui Portal Perizinan.



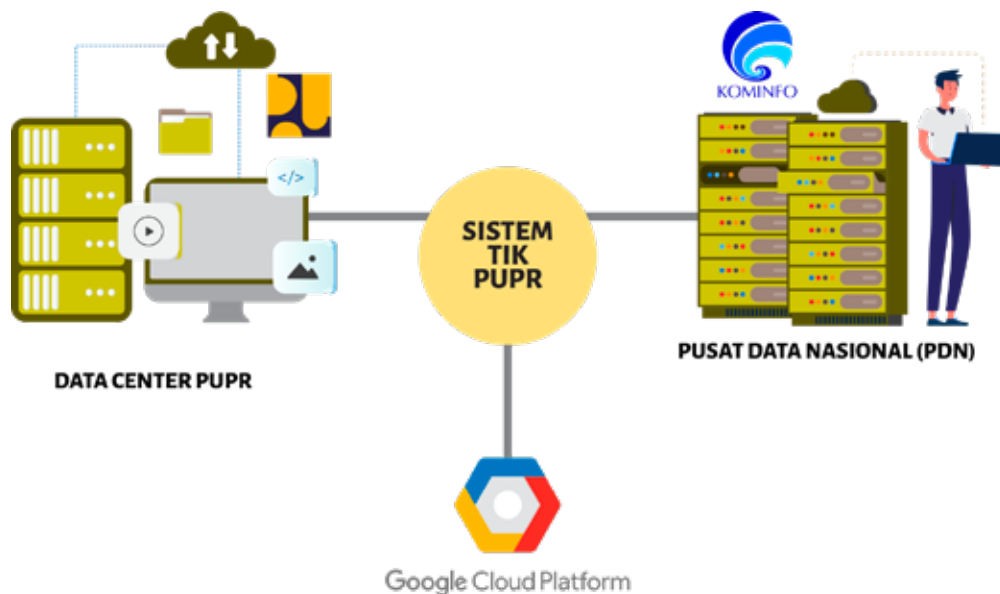
Beberapa Dashboard Super Apps yang Ada di Kementerian PUPR pada Website bravo.pu.go.id dan perizinan.pu.go.id

Bekerja secara Kolaborasi Digital

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 hingga saat ini telah mengubah cara bekerja pegawai Kementerian PUPR. *Sistem Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah mengharuskan pegawai bekerja dengan menggunakan perangkat yang dapat membantu mereka bekerja jarak jauh dan tetap mampu berkolaborasi seperti halnya bekerja di kantor. Kementerian PUPR menyediakan perangkat kerja jarak jauh dan kolaborasi tersebut dengan memanfaatkan teknologi *Google Workspace* dari Google. *Google Workspace* adalah sebuah perangkat kerja yang dapat diakses secara *online* dan berkolaborasi bersamaan dimanapun dan kapanpun. Layanan ini adalah kumpulan dari komputasi awan, alat produktivitas, dan juga kolaborasi. Pegawai dapat melakukan kegiatan-kegiatan dasar perkantoran seperti membuat dokumen dan presentasi, melakukan rapat online, menyimpan dokumen di *Cloud* atau melakukan penjadwalan agenda di kalender.

Fitur dari perangkat kerja ini cukup lengkap seperti, *Gmail*, *GCalendar*, *GDrive*, *GSheet*, *GSlide*, *GDoc*, *Gform*, *Gmeet*, *GChat*, *Gtask*, *Classroom* dan masih banyak lagi. Fitur-fitur tersebut sangat membantu jika pegawai melakukan kerja jarak jauh secara kolaborasi dan mudah diakses oleh pegawai Kementerian PUPR langsung melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau telepon selulernya (*Smart Phone*).

Kementerian PUPR secara periodik mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai pengguna secara online. Hingga Desember 2022 telah dilakukan 67 kali pelatihan. Pelatihan ini tidak terbatas dari fitur-fitur *Google Workspace* saja, namun ditambah materi terkait keamanan, pengolahan data, serta materi lainnya yang terkait dengan cara bekerja dengan efisien dan efektif memanfaatkan platform ini. Dalam setiap pelatihan peserta akan diberikan sertifikat kehadiran. Seluruh materi pelatihan disimpan dalam sebuah *website helpdesk* yang dibangun Pusdatin untuk memberikan layanan *Google Workspace* kepada pengguna.



Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR antara Penyedia Data Center Google dan Pusat Data Nasional (PDN)

Komputasi Awan, IoT, dan BIG Data

Server merupakan komponen yang sangat vital bagi pengelolaan teknologi informasi di Kementerian PUPR. Saat ini Kementerian PUPR menggunakan metode *hybrid* (*on-premise data center* Pusdatin, *cloud server* Pusat Dana Negara atau PDN) untuk pengelolaan *server*. Terdapat 188 aplikasi yang berjalan di *on-premise data center* Pusdatin, 28 aplikasi di layanan *cloud server* dan 20 aplikasi di PDN dengan kebutuhan masing-masing aplikasi yang bervariasi dari satu hingga beberapa server. Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai tempat penyimpanan server Kementerian PUPR.

Cyber Security

Sebagai pemilik dan tempat penyimpanan *big data* infrastruktur, data center Kementerian PUPR dapat menjadi sasaran serangan siber dari berbagai pihak yang ingin mengacaukan sistem PUPR. Untuk itu Kementerian PUPR telah menyiapkan antisipasi dari keamanan data sebagai berikut:

- 1) Penerapan SOP keamanan data yang telah terafiliasi dengan SNI dan ISO.
- 2) Menggunakan teknologi *hardware* dan *software* keamanan terkini.
- 3) Melakukan Penetration Test secara berkala.
- 4) Proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi menggunakan pendekatan SDLC (*Software Development Life Cycle*).
- 5) Bekerja sama dengan lembaga keamanan negara dalam pencegahan penyerangan *Cyber Crime*.
- 6) Peremajaan infrastruktur TI.

MEMBANGUN BRANDING KEMENTERIAN PUPR YANG KUAT DAN MATANG

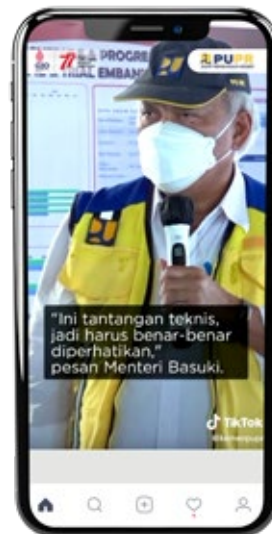
Dinamika Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian PUPR

Bangun jalan tol pakai bambu, apa mungkin?

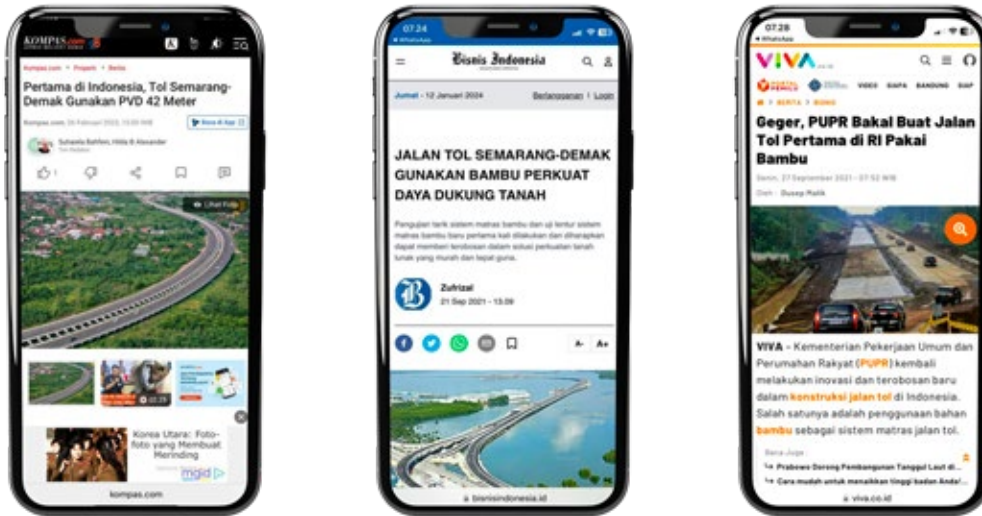
Pada pertengahan tahun 2022, ketika Kementerian PUPR membangun jalan tol Semarang-Demak, muncul pertanyaan di media sosial mengenai keberlanjutan pembangunan menggunakan bambu. Menanggapi skeptisisme tersebut, akun Instagram resmi Kementerian PUPR (@kemenpupr) menyajikan konten video reels menjelaskan penggunaan bambu dalam proyek tersebut. Mereka memaparkan penggunaan matras bambu untuk meningkatkan daya dukung tanah, dilengkapi dengan pemasangan prefabricated vertical drain (PVD) dan pembebanan menggunakan pasir laut.

Konten "Jalan Tol Semarang-Demak" di akun TikTok Kementerian PUPR

Penjelasan ini mendapat respons positif dari warganet, yang memuji inovasi menggunakan bambu dalam pembangunan infrastruktur.



Konten tersebut, menjadi *The Best Content Instagram @kemenpupr* pada 2022 dengan ribuan like dan engagement, mencerminkan upaya Kementerian PUPR dalam menjelaskan progres pembangunan dan membangun pemahaman positif di kalangan masyarakat.



Pemberitaan di Media Massa terkait Penggunaan Bambu untuk Konstruksi Jalan Tol



Beberapa Komentar Warganet terkait Penggunaan Bambu untuk Konstruksi Jalan Tol

Berbagai media besar dengan sigap mengangkat informasi yang dirilis oleh Kementerian PUPR tersebut dalam pemberitaannya. Media-media tersebut antara lain Kompas (kompas.com), Viva (viva.co.id), Tribunnews (tribunnwes.com), Bisnis Indonesia (bisnisindonesia.id), dan Suara Merdeka (suaramerdeka.com).

Tidak hanya media, konten informasi konstruksi jalan tol menggunakan bambu juga ramai diperbincangkan warganet. Buktinya,

konten yang disebarluaskan oleh akun media sosial Kementerian PUPR baik dalam format foto atau video reels ini mendulang awareness dan *engagement* warganet yang tinggi. Fakta ini terlihat dari banjir komentar, *likes*, dan *repost* di postingan konten tersebut.

Bahkan karena sangat informatif, konten video reels tersebut menjadi *The Best konten Instagram @kemenpupr* pada tahun 2022 karena menghasilkan 2.719.933 *impression*, 87.820 *engagement*, dan 121.000 *like*.



Presiden RI Joko Widodo dalam Konvensi Humas 4.0 pada Konvensi Nasional Humas 10 Desember 2018 di Istana Negara

Tentu saja respons positif media dan warganet tersebut sejalan dengan upaya Biro Komunikasi Publik untuk menyebarkan kinerja apik Kementerian PUPR dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin Indonesia pada 2014.

Percepatan pembangunan infrastruktur memang masuk dalam lima prioritas kerja Presiden Jokowi pada periode 2019-2024. Percepatan ini adalah tongkat estafet dari pembangunan infrastruktur pada medio 2014-2019. Gaung pencapaian dan prestasi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono, dalam menghadirkan infrastruktur berkualitas selama satu dekade bisa menjadi magnet besar. Ini semua tak lepas dari kerja keras Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

Selama satu dekade terakhir, Kementerian PUPR mengalami transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z. Dengan mayoritas masyarakat yang mengandalkan internet dan media sosial, Kementerian PUPR terus

berinovasi dan bertransformasi dalam penyampaian informasi.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam era disrupsi, untuk menyebarkan pesan positif dan prestasi pemerintah guna membangun kepercayaan dan reputasi negara. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memiliki harapan terhadap komunikasi publik Kementerian PUPR, termasuk menyebarkan optimisme, bersifat proaktif, mewujudkan akuntabilitas, dan berfungsi sebagai koordinator di level kementerian. Dalam satu dekade ini, Kementerian PUPR berhasil membangun kepercayaan publik dengan transparansi, keterbukaan, dan pendekatan demokratisnya.

Realitas tersebut sejalan dengan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Pada Konvensi Humas 4.0 Desember 2018, orang nomor satu di Republik Indonesia (RI) ini meminta humas di instansi pemerintah untuk mensosialisasikan pesan positif, capaian dan prestasi yang telah dicapai institusi pemerintah kepada publik. Untuk bisa melakukan itu, instansi pemerintah harus membangun kepercayaan atau trust dan reputasi lembaganya.



Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	Komponen	Indikator Kinerja (Output)	Indikator Kinerja (Outcome)
	Indikator Kinerja: Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan KEHUMASAN Kementerian	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan	Persepsi/Sentiment Positif Artikel/Siaran di Media
		Pelaksanaan PUBLIKASI Bidang PUPR melalui Berbagai Media dan/atau Acara	Jumlah Publikasi	Tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi
		Penyiapan Bahan Informasi Pimpinan	Jumlah Bahan Informasi Pimpinan	Tingkat Kepuasan Pengguna Bahan Informasi Pimpinan
		Pembinaan Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian	Jumlah Permintaan Informasi	Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik

Komponen dan Indikator Rencana Strategis (Renstra) untuk Kegiatan Komunikasi Publik di Kementerian PUPR

Bagaimana dengan ekspektasi Menteri PUPR? Menteri Basuki Hadimuljono berharap agar komunikasi publik yang dilakukan Kementerian PUPR dapat melaporkan program dan capaian kerja. Tidak hanya itu, diharapkan komunikasi publik dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas.

Kementeraian PUPR memahami bahwa diperlukan suatu indikator guna membuktikan kinerja komunikasi publik. Untuk itu, dibuat Renstra yang memuat komponen beserta indikator kinerja kegiatan komunikasi publik agar seluruh capaian dapat terukur dengan baik.

Tim-tim tersebut berkolaborasi untuk menjalankan strategi komunikasi publik yang telah disusun. Strategi yang dimaksud adalah memanfaatkan beragam saluran media komunikasi untuk menyampaikan pesan. Karena masing-masing saluran media komunikasi mempunyai karakteristik berbeda, maka cara mengemas pesan yang ingin disampaikan pun harus disesuaikan.

Di balik tim tersebut, Kementerian PUPR memiliki SDM yang mumpuni baik dari segi keahlian maupun kompetensi yang terus berkembang seiring dengan waktu. Dari 73 orang pegawai pada 2015, menjadi 88 pegawai pada 2023 dengan rincian 64 pegawai negeri sipil (PNS) dan 24 Non-PNS.

Membangun Reputasi melalui Brand Identity

Sebuah unggahan atau posting-an meme di twitter "Ceker Ayammu Vs Ceker Ayamku" pada Minggu (24/4/2022) seketika ramai diperbincangkan warganet alias viral. Dalam meme yang di-posting akun resmi X (dulunya Twitter) Kementerian PUPR @KemenPU, tergambar sop ceker ayam dan konstruksi cakar ayam yang di bawahnya ada foto Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Karena mengundang gelak tawa alias lucu, postingan meme dari @KemenPU di sukai warganet sehingga meraup 3.393 like, 603 repost dan 190 komentar.

Unggahan foto di feed akun resmi Instagram Kementerian PUPR @kemenpupr dengan judul "Where is Pak Bas?" pada Jumat, 28 Oktober 2023, yang meminta warganet untuk menemukan Menteri PUPR Basuki atau yang akrab disapa Pak Bas di foto yang memuat ribuan orang.

Tak disangka posting-an ini disukai warganet. Buktinya dalam waktu cepat unggahan @kemenpupr ini mendapat 13.909 like dan 1.080 komentar. Likes dan jumlah komentar itu dipastikan akan terus bertambah.

Apa yang dilakukan @KemenPU ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR melakukan branding terhadap institusinya. Branding adalah proses membangun dan mengelola citra, identitas, dan reputasi suatu produk, layanan, perusahaan, atau organisasi. Tujuan akhir dari branding adalah menciptakan persepsi positif di antara konsumen atau audiens target, sehingga mereka dapat mengenali, memahami, dan mempercayai merek atau entitas tersebut.

Branding pun melibatkan berbagai elemen, termasuk nama merek, logo, warna, desain, slogan, dan pesan yang digunakan untuk membedakan produk, layanan, perusahaan atau organisasi satu dengan yang lain.



Branding Kementerian PUPR pada platform X (dulunya Twitter) dan Instagram

Lompatan Pemberitaan Membangun Reputasi dan Kepercayaan Publik

Selama satu dekade, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 87 dari 125 Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, irigasi, proyek air minum, perumahan, tanggul laut, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Universitas Islam Internasional Indonesia. Prestasi ini mencerminkan fokus pemerintahan Presiden Jokowi pada percepatan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan 87 PSN yang rampung meliputi 36 bendungan berkapasitas 1,9 jutameter kubik, jalan tol sepanjang 1.500 kilometer (km) dari 27 proyek jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 7 proyek di sektor perumahan, dan pengimplementasikan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan, SPAM Regional Semarang Barat dan SPAM Regional Banjarkakula.



Bendungan Lolak



Tol Cisumdawu



Bendungan Cipanas



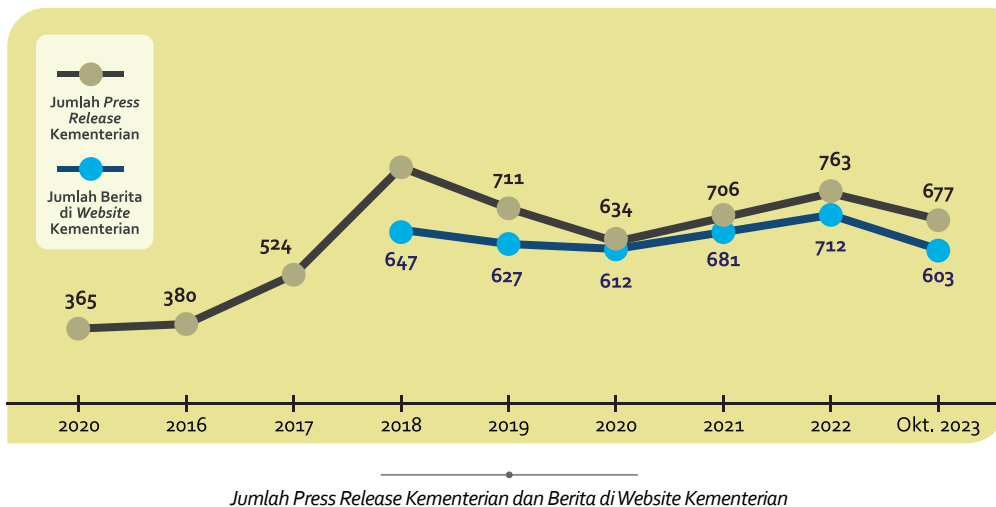
Bendungan Sepaku Semoi

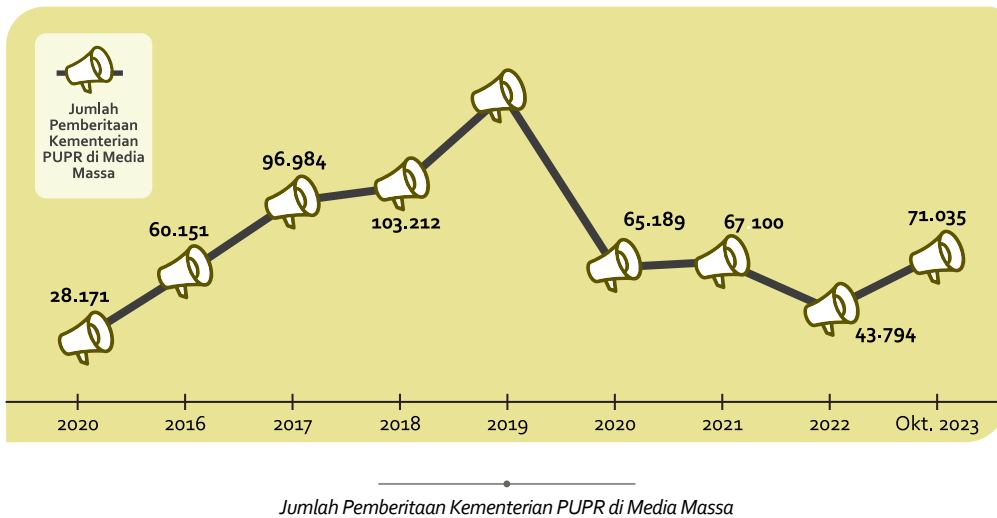
Kementerian PUPR mengomunikasikan kebijakan, program, dan progres proyek infrastruktur melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial. Peningkatan pemberitaan Kementerian PUPR mencapai 64.840 berita pada September 2023, menunjukkan efektivitas upaya komunikasi yang dijalankan oleh Kementerian PUPR.

Salah satu perkembangan yang sangat signifikan dalam capaian kinerja Biro Komunikasi Publik yaitu lompatan pemberitaan media terhadap Kementerian PUPR. Pada Oktober 2023, total pemberitaan Kementerian PUPR sudah mencapai angka 71.035 berita. Angka itu melonjak jauh dibandingkan dengan tahun 2015, yang hanya 28.171 berita.

Peningkatan pemberitaan tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah rilis yang dihasilkan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Pada periode Januari s.d. Oktober 2023, Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR telah menerbitkan 603 siaran pers kementerian dan 677 berita di *website* kementerian, naik dibandingkan jumlah berita di *website* kementerian pada 2015 sebesar 365 berita.

Kementerian PUPR mengalami pertumbuhan pesat dalam pengelolaan media sosial (*medsos*) dengan peningkatan jumlah akun dari 4 menjadi 6, termasuk penambahan akun TikTok dan Podcast di Spotify. Jumlah pengikut *medsos* Kementerian PUPR juga melonjak dari 74.306 pada 2016 menjadi 2.689.602 pada September 2023.





Selain lompatan pemberitaan, salah satu saluran komunikasi Kementerian PUPR yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah akun media sosial (medsos) Kementerian PUPR. Pada 2016, Kementerian PUPR memiliki 4 akun medsos, yakni Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Kini akun medsos Kementerian PUPR sudah berjumlah 6, dengan ketambahan akun TikTok dan Podcast di Spotify.

Tidak hanya itu, capaian peningkatan jumlah *follower* akun medsos Kementerian PUPR juga sangat luar biasa. Dari semula 74.306 *follower* pada 2015 hingga sudah mencapai 2.689.602 *follower* pada September 2023. Mengapa bisa sedrastis itu? Hal ini tidak lepas dari terobosan strategi pengelolaan media sosial Kementerian PUPR.

Berbeda dengan siaran pers yang menggunakan gaya bahasa *hard news*, konten pada akun media sosial Kementerian PUPR dikemas dengan gaya penyampaian yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing medsos. Jadi meski pesannya sama, tapi diksi kata dan pembuatan konten antara berbagai platform media sosial berbeda.

Agar *followers* dan *engagement* akun resmi Komunikasi Publik PUPR di medsos meningkat, Kementerian PUPR sering membuat konten meme berbau infrastruktur dan juga konten trivia serta kuis. Tidak hanya itu, konten-konten penyampaian kebijakan, program, progres pembangunan yang di-posting juga dikemas dengan bahasa yang ringan, sederhana tapi mengundang keseruan dan gelak tawa.



Konten Media Sosial Kementerian PUPR Mengenai Pengukuhan Menteri PUPR sebagai CdM Asian Games Hangzhou 2022 yang Memiliki Engagement Cukup Tinggi

Gayung bersambut, kerja keras dan cerdas pengemasan konten medsos PUPR disukai masyarakat. Fakta ini dbuktikan dengan banyaknya konten medsos PUPR yang mencatatkan engagement tinggi dan berujung pada peningkatan *followers*.

Sepanjang perjalanan satu dekade, Kementerian PUPR telah berhasil menyebarkan informasi melalui *special events*, termasuk pameran konstruksi dan pameran umum di mal. Komunikasi juga diperluas ke generasi muda melalui PUPR Goes to Campus, PUPR Goes to My School, dan Company Visit to PUPR.

MEDIA PUBLIKASI

Pemanfaatan Kemajuan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Inovasi dan transformasi digital di Era Pandemi COVID-19

Kementerian PUPR melakukan lompatan besar transformasi digital dalam berkomunikasi kepada publik. Lompatan ini mau tak mau harus dilakukan untuk mengatasi tantangan akibat pandemi Covid-19. Inovasi yang dimaksud adalah dengan memigrasi kegiatan yang biasa dilakukan Kementerian PUPR secara luring menjadi daring.

Peresmian Virtual Proyek Infrastruktur Disiarkan Melalui Akun Media Sosial Kementerian PUPR

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik di tengah pandemi Covid-19, Biro Komunikasi Publik bekerja sama dengan Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian PUPR serta mitra kerja terkait lainnya menyiarkan peresmian

virtual sejumlah proyek pembangunan di media sosial Kementerian PUPR, baik secara *live stream* maupun rekaman.

Salah satu proyek infrastruktur yang diresmikan secara virtual dan disiarkan secara *live stream* di akun YouTube Kementerian PUPR adalah Pasa Ateh Kota Bukittinggi pada 18 Juni 2020. Pasa Ateh diresmikan secara virtual oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

Prosesi peresmian itu menghadirkan berbagai pihak berbeda di satu *platform* yang sama secara virtual, meski secara fisik berada di berbagai tempat yang berbeda. Pada saat itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan Direktur Bina Penataan Bangunan Diana Kusumastuti berada di kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno di kantor Gubernur Sumatera Barat, sedangkan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan jajarannya serta Balai Kementerian PUPR berada di venue acara di Kota Bukittinggi



Peresmian Virtual Pasa Ateh (Pasar Atas) Kota Bukittinggi pada 18 Juni 2020



Peresmian Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yang Diselenggarakan secara Hybrid

Tidak hanya secara *live* atau langsung, peresmian proyek infrastruktur secara virtual juga disiarkan secara rekaman atau tidak langsung di akun *YouTube* Kementerian PUPR. Contohnya adalah Peresmian Pengoperasian Ruas Tol Pekanbaru-Dumai pada 25 September

2020. Presiden Joko Widodo meresmikan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hadir langsung bersama Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Dumai Zulkifli.

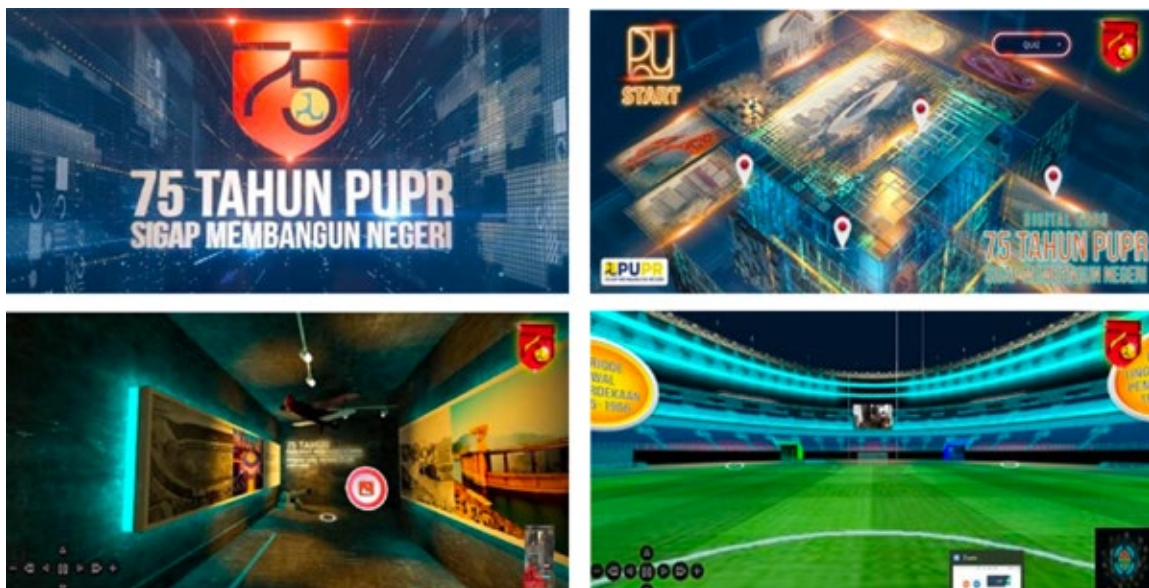
Pameran Virtual

Pandemi Covid-19 telah melarang mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan. Alhasil kegiatan-kegiatan yang mengundang massa banyak, seperti pameran menjadi sulit terlaksana. Namun semua itu sirna berkat kecanggihan teknologi informasi.

Dengan memanfaatkan digitalisasi, pameran yang biasanya terselenggara secara luring bisa bertransformasi menjadi virtual. Atas dasar itu, Kementerian PUPR dengan dikoordinir oleh Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan beberapa pameran virtual pada 2020.

Pameran virtual yang diadakan oleh Kementerian PUPR antara lain Pameran Virtual 75 Tahun PUPR Sigap Membangun Negeri, Pameran Virtual Jembatan Ikonik, dan Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75.

Pelaksanaan pameran virtual ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan komunikasi publik Kementerian PUPR. Tidak hanya itu, penyelenggaraan pameran virtual juga merupakan terobosan dalam strategi komunikasi publik berbasis branding Kementerian PUPR.



Pameran Virtual Dalam Rangka Hari Bakti PU ke-75



Webinar Bedah Buku 75 Bendungan Milik Kementerian PUPR



Konferensi Pers Virtual terkait Penyesuaian dan Pemberlakuan Tarif Jalan Tol Jasa Marga Group pada 14 Januari 2021

Webinar

Kementerian PUPR saat pandemi Covid-19 tahun 2020 tentunya beradaptasi dengan segala keterbatasan di tengah masa pandemi untuk tetap dapat menyampaikan informasi kepada segenap publik Kementerian PUPR. Bentuk adaptasi ini adalah mentransformasi event komunikasi publik menjadi webinar. Salah satunya adalah event Bedah Buku 75 Bendungan yang diselenggarakan melalui aplikasi *zoom meeting* dan disiarkan secara live stream di akun YouTube Kementerian PUPR.

Jumpa Pers Virtual

Kementerian PUPR rutin menggelar jumpa pers virtual saat pandemi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan rekan-rekan jurnalis terhadap informasi kebijakan, proyek dan progress pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung. Jumpa pers virtual juga secara tidak langsung mendukung untuk menjaga dan meningkatkan branding atau reputasi Kementerian PUPR di mata publik.

Layanan Publik di Tangan Anda

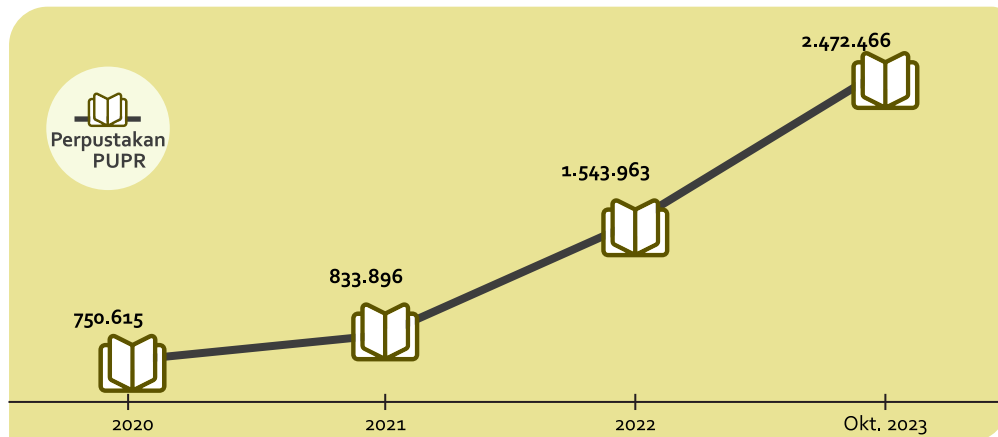
Kementerian PUPR memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau digitalisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pemanfaatan digitalisasi kemudian direalisasikan dengan menghadirkan laman portal resmi Kementerian PUPR, pu.go.id. Di portal ini, publik bisa menuju laman [sahabat.pu.go.id](http://sahabat.pu.go.id/eppid) untuk mendapatkan tiga pelayanan publik, yakni Pelayanan Publik Terpadu, Pengaduan, dan Perpustakaan Secara *Online*.

Khusus untuk pelayanan informasi publik, Kementerian PUPR menghadirkan laman khusus sahabat.pu.go.id/eppid. Di halaman ini, publik bisa mendapatkan atau meminta informasi terkait Kementerian PUPR secara cepat, tepat, dan sederhana. Layanan *e ppid* ini tersedia pula dalam aplikasi Android.

Lewat sahabat.pu.go.id/eppid, Kementerian PUPR melayani pemohon informasi secara santun, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik.

Dari tahun 2013-2022, total ada 3.973 pemohon yang mengajukan permintaan data atau informasi kepada Kementerian PUPR melalui layanan sahabat.pu.go.id/eppid. Dari 3.973 pemohon itu, total ada 5.572 permintaan data atau informasi yang masuk.

Layanan perpustakaan *online* Kementerian PUPR diberikan melalui laman pu.go.id/pustaka. Lewat *website* itu, publik bisa mengakses berbagai koleksi perpustakaan Kementerian PUPR, seperti buku dan jurnal elektronik atau *e-book* yang berkaitan dengan bidang pekerjaan di PUPR.



Pengunjung Perpustakaan Kementerian PUPR (Online dan Offline)

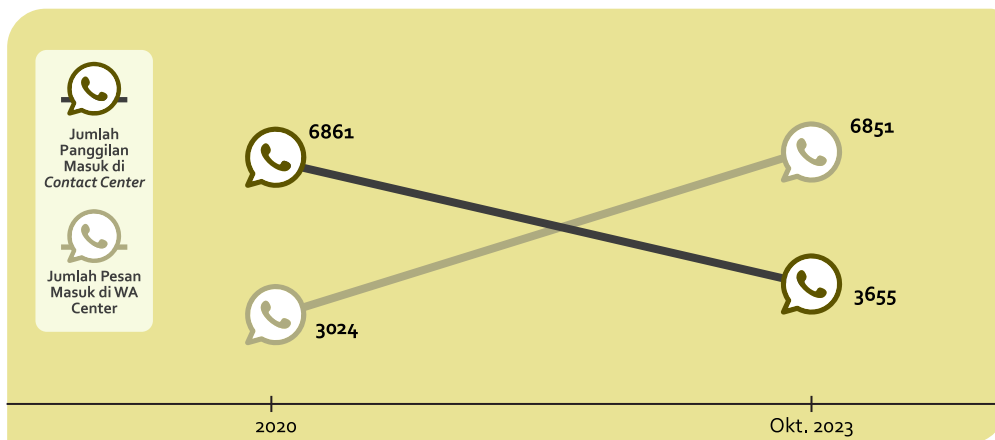
Contact Center 158 dan WhatsApp Center

Kanal layanan informasi ini merupakan solusi efektif bagi masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di Kementerian PUPR tanpa harus bertatap muka. Melalui saluran informasi ini, Kementerian PUPR dapat melayani masyarakat tanpa batasan tempat, waktu, dan kelompok, serta berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Di samping itu, layanan ini sekaligus sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi dalam

menciptakan birokrasi bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selama kurun Januari-Desember 2022, layanan *Contact Center 158* mencatat jumlah panggilan telepon yang masuk sebanyak 5.976 panggilan. Sedangkan pada layanan *WhatsApp Center* di nomor 0815-1000-0158 selama periode 1 Oktober-30 Desember 2022, tercatat 276 pesan diterima Kementerian PUPR. *WhatsApp Center* PUPR hadir untuk melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi melalui pesan singkat tertulis.



Jumlah Panggilan Masuk di Layanan Contact Center dan Jumlah Pesan Masuk di Layanan WA Center

OPTIMALISASI MEDIA SEBAGAI ASET DIGITAL

Bicara soal transformasi digital, tak lengkap rasanya tanpa media sosial. Sebab kini, banyak orang terutama generasi muda lebih familiar mengakses informasi mengandalkan pencari, seperti Google atau media sosial. Semua rekomendasi informasi yang dicari pun akan muncul di layar Ponsel yang mereka punya. Media sosial pun kini dianggap sebagai aset bagi berbagai entitas, mulai dari perusahaan, individu, dan organisasi, karena memiliki potensi untuk memberikan manfaat dan nilai yang signifikan.

Media sosial bisa digunakan sebagai media promosi, berinteraksi dengan pelanggan,

branding, analisis data, menghasilkan cuan, dan menyebarkan informasi secara massif. Saat ini, media sosial yang dimaksud meliputi Facebook (FB), Twitter, Instagram (IG), TikTok, YouTube hingga @Threads. Kementerian PUPR dengan bijaksana mengoptimalkan kehadiran mereka di FB, Twitter, IG, Tiktok, YouTube.

Pemanfaatan media sosial oleh Kementerian PUPR bukan hanya semata-mata untuk berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi juga mempublikasikan capaian, program, rilis, dan kebijakan yang telah mereka laksanakan. Dalam situasi darurat atau peristiwa penting, Kementerian PUPR memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi yang diperlukan secara langsung atau real-time kepada masyarakat.



Sejak akhir 2020, Kementerian PUPR dengan dikoordinir Biro Komunikasi Publik secara resmi hadir di Tiktok melalui akun @KemenPUPR. Kreasi konten video berdurasi pendek dengan *sound viral* dan gaya penulisan ringan serta ringkas menjadi pilihan @KemenPUPR dalam menyampaikan kebijakan, capaian, edukasi, hingga progres pembangunan infrastruktur yang sedang

digarap Kementerian PUPR.

Untuk menyesuaikan dengan karakter pengguna platform ini, informasi yang dikemas pun dalam video bergaya spontan, jenaka, dan menghibur, tanpa mengurangi esensi dari informasi yang disampaikan.

Pertumbuhan *follower* akun Tiktok @KemenPUPR sangat signifikan. Dari 1.244 *follower* di akhir 2020, menjadi 46.800 *follower* di akhir 2021, 114.500 *follower* di akhir 2022 dan 148.9000 *follower* pada Oktober 2023





Dibandingkan dengan platform media sosial lain, pengguna Instagram didominasi oleh generasi milenial. Kekuatan konten di Instagram terletak pada visualisasi pesan, sehingga foto dan infografis memiliki peranan penting dan mendominasi.

Akun Instagram Kementerian PUPR mencatat pertumbuhan follower tertinggi selama kurun 2015-2023. Perkembangan ini tidak lepas dari konten-konten di akun resmi Kementerian PUPR @kemenpupr yang tersaji secara *update*

dan *instagramable*. Karakteristik instagram dekat dengan selera netizen yang suka 'bergaya' sembari berbagi informasi dengan *follower*-nya melalui konten visual, yaitu foto, video, dan infografis.

@kemenpupr menyajikan konten-konten pelaksanaan dan proses pembangunan yang dramatik secara visualisasi dan viral secara konten berita. Akun @kemenpupr terus dikunjungi pengikut baru dari tahun ke tahun. Pertengahan 2023, *follower* IG @kemenpupr telah tembus 1 juta follower. Itu terjadi karena konten dan konsep penyajiannya yang benar-benar enak ditonton, menyenangkan dan "loe banget".



Konten Instagram Mengenai Hal Baru dalam Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

X Twitter atau X

Platform ini memiliki nilai lebih dalam memainkan isu di jagat media sosial secara cepat. Kondisi ini dibaca sebagai peluang oleh Kementerian PUPR untuk membuat pesan yang singkat dan langsung mengenai akun media sosial X, seperti konten cuitan informatif, *human interest*, melibatkan *follower* (kuis/trivia), foto artistik atau *gimmick* menarik untuk di *retweet*.

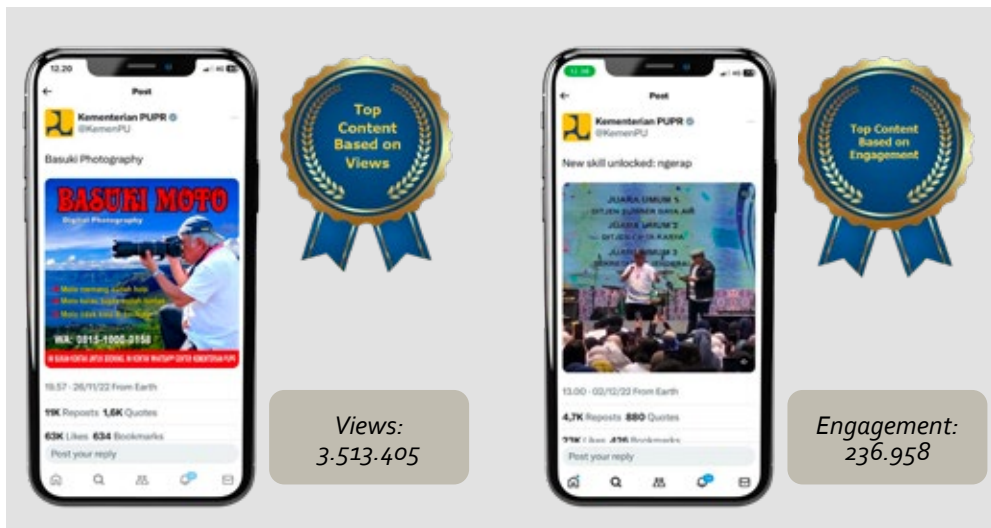
Permainan tagar (#) seperti #SigapMembangunNegeri merupakan salah satu strategi untuk menaikkan engagement di dunia maya sekaligus menguatkan *branding* Kementerian PUPR.

Sejak membuka kanal Twitter (sekarang X) di 2010, grafis *follower* akun resmi Kementerian PUPR @KemenPU terus menunjukkan tren

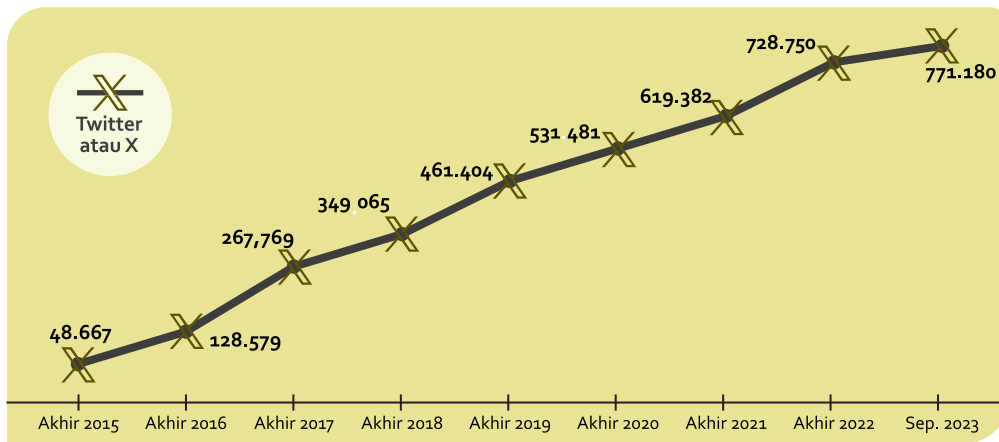
peningkatan. Hingga pertengahan Oktober 2023, jumlah *follower* X @KemenPU tercatat sebesar 771.000. Kenaikan jumlah *follower* tersebut sangat signifikan dibanding tahun 2015, dengan *follower* tercatat sebanyak 48.667 pada Desember 2015.

Seperti halnya Instagram, para *follower* X @KemenPU didominasi kaum muda, yaitu kalangan potensial komunikasi Kementerian PUPR. Selain sebagai indikator pertumbuhan, peningkatan jumlah pengikut juga menunjukkan antusiasme publik terhadap isu-isu infrastruktur PUPR.

Konten-konten foto, video, maupun infografis yang ditayangkan @KemenPU ternyata menarik perhatian *follower*. Terbukti, dengan adanya konten @KemenPU yang berhasil meraih *Best Twitter Impression* Tahun 2022 sebesar 3.513.405 *impression* dan *Best Twitter Engagement* Tahun 2022 sebesar 236.958 *engagement*.



Konten X (dulu Twitter) Kementerian PUPR Berhasil Memperoleh Views dan Engagement yang Tinggi



Peningkatan Jumlah Follower Akun X (dulu Twitter) Kementerian PUPR

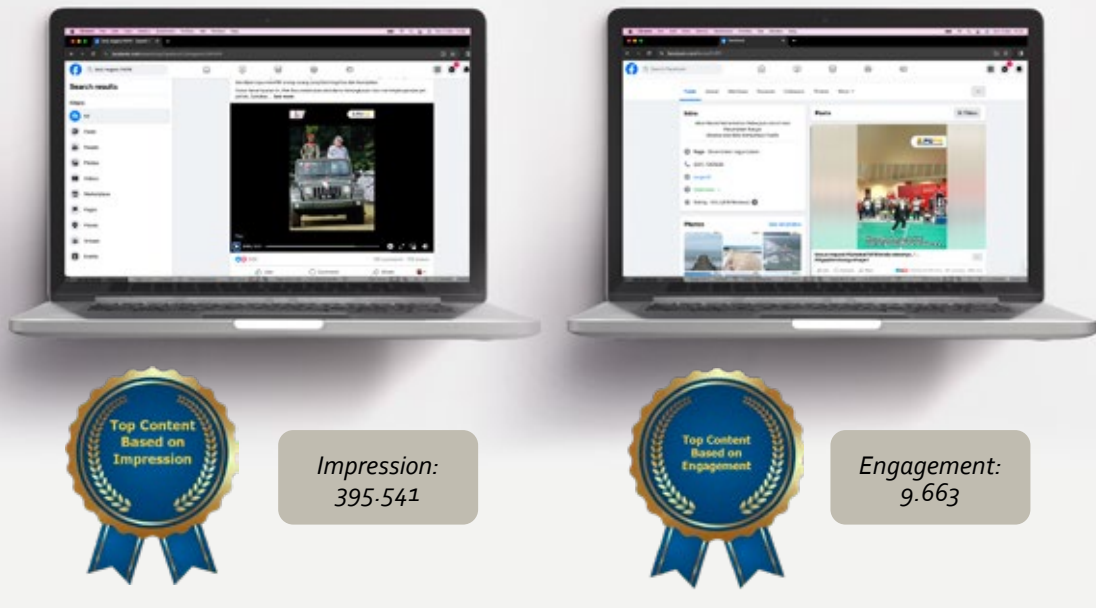


Lewat Facebook, Kementerian PUPR ingin berjumpa sekaligus berbincang dalam forum yang sifatnya lebih santai atau nonformal sehingga terjalin komunikasi dalam kesetaraan.



Popularitas Facebook sebagai *platform* media sosial memang tak usah diragukan lagi. Di Indonesia, Facebook menjangkau 81 persen penduduk. Platform ini banyak digunakan sebagai tempat bertemu dengan teman, sahabat, ataupun keluarga yang telah lama terpisahkan oleh ruang dan waktu.

Lewat Facebook, Kementerian PUPR ingin berjumpa sekaligus berbincang dalam forum yang sifatnya lebih santai atau nonformal sehingga terjalin komunikasi dalam kesetaraan. Dalam komunikasi yang berkesetaraan, Kementerian PUPR dapat berbagi informasi seputar pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia.



Konten Facebook Kementerian PUPR

Selama periode 2015-2023, pengikut akun Facebook Kementerian PUPR mengalami pertumbuhan. Grafik peningkatan cukup signifikan terjadi pada periode 2015-2020. Sementara itu, pada periode 2020-2023, grafik peningkatan *follower*-nya cenderung datar. Terutama di tahun 2022, grafik pertumbuhan *follower* akun Facebook terbilang datar.

Pada Januari 2022, jumlah pengikut tercatat sebesar 589.819. Sepanjang tahun, terjadi dinamika berupa peningkatan dan penurunan jumlah pengikut. Meski sempat terjadi penurunan di November 2022, akun Facebook Kementerian PUPR menutup tahun 2022 dengan positif, yaitu kenaikan jumlah *follower* menjadi 590.144 per Desember 2022. *Impression* tertinggi tercatat sebanyak 395.541 dan *engagement* tertinggi sebesar 9.663. Hingga pertengahan Oktober 2023, jumlah *follower* Facebook Kementerian PUPR naik menjadi 591.000.



Impression tertinggi tercatat sebanyak 395.541 dan *engagement* tertinggi sebesar 9.663. Hingga pertengahan Oktober 2023, jumlah *follower* Facebook Kementerian PUPR naik menjadi 591.000.



Youtube

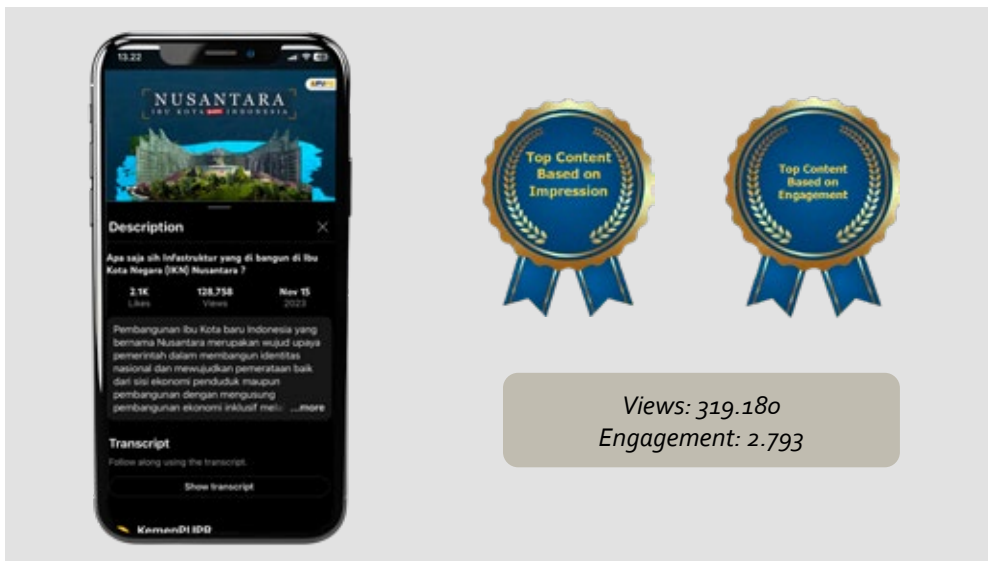
Indonesia adalah negara peringkat keempat pengguna Youtube terbesar di dunia, di bawah India (467 pengguna), Amerika Serikat (246 Juta pengguna) dan Brasil (142 juta pengguna). Banyaknya jumlah pengguna Youtube di Indonesia tentunya juga dimanfaatkan oleh Kementerian PUPR baik dalam menyebarkan informasi maupun upaya branding institusinya.

Sepanjang 2022, pertumbuhan rata-rata jumlah pengikut kanal Youtube Kementerian PUPR @KemenPUPR adalah 1.000-2.000 pengikut. Pada Januari 2022, tercatat pengikut akun Youtube Kementerian PUPR sebanyak 137.000 dan meningkat menjadi

148.000 pengikut di Desember 2022. Hingga pertengahan Oktober 2023, jumlah *follower* Kementerian PUPR telah mencapai 157.000 pengikut.

Guna meningkatkan efektivitas *platform* Youtube sebagai kanal informasi, Kementerian PUPR pun terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang ditayangkan, baik secara substansi informasi maupun kemasannya, sesuai dengan karakteristik pengguna Youtube.

Kementerian PUPR memproduksi beragam konten video yang sesuai dengan karakteristik Youtube. Mulai dari *podcast* dalam bentuk *talkshow*, *webseries* (seri video atau film yang disiarkan secara *online*), *vlog* Menteri, *video event*, video liputan.



Youtube Kementerian PUPR yang Menyajikan Konten Video



Berbagai Video yang Terpublikasi pada Youtube Kementerian PUPR

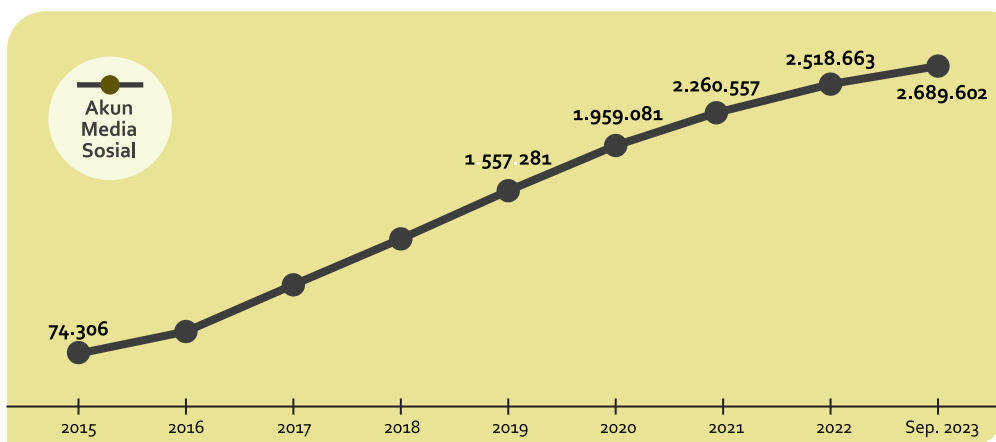
Kementerian PUPR juga berinovasi dengan memproduksi *webseries* "Pury dan Bos Uki" *season 1* dan *season 2* untuk menyebarkan informasi mengenai infrastruktur Kementerian PUPR dalam format yang ringan dan menarik.

Webseries ini bercerita tentang keinginan seorang pekerja di biro travel yang belum pernah merasakan traveling sama sekali. Singkat cerita keinginannya itu terwujud dan dia traveling ke seluruh penjuru nusantara dan memperlihatkan hasil pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk Podcast, pada awalnya Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Box2BoxID media

Network menghadirkan program "Sigap Membangun Negeri". Podcast ini kali pertama kali tayang di saluran Youtube KemenPUPR pada tanggal 4 September 2020. Episode pertama berjudul "Kenal Kementerian PUPR Lebih Dekat" dengan menghadirkan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR sebagai nara sumber.

Kemudian, Kementerian PUPR membuka kanal sendiri dengan tetap mengusung nama "Sigap Membangun Negeri" pada Maret 2021. Hingga kini total yang telah diproduksi dan ditayangkan di Podcast Sigap Membangun Negeri mencapai 46 episode. Selain di *platform* Spotify, podcast "Sigap Membangun Negeri" juga bisa ditonton di akun YouTube Kementerian PUPR.



*Jumlah Total Follower pada Akun Media Sosial Kementerian PUPR
(dari X, Facebook, Instagram dan Youtube)*



Podcast, pada awalnya Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Box2BoxID media Network menghadirkan program “Sigap Membangun Negeri”.



PUPR TV Reborn

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu, 20 Mei 2020 Kementerian PUPR secara resmi memulai siaran perdana PUPR TV pada akun KemenPU di YouTube. PUPR TV merupakan TV streaming berbasis internet yang menyajikan beragam konten, mulai dari edukasi, berita, jalan-jalan, dan konten ringan lain. Konten PUPRTV bisa disaksikan di kanal Youtube resmi Kementerian PUPR dan situs itv.pu.go.id.

Dengan menggandeng SporaComm, PUPR TV melakukan siaran Senin-Jumat dari pukul 12.00-17.00 WIB. Program-program yang ditayangkan antara lain, Ruang Bincang, Info PUPR, Warga Bicara, Mitra Bicara, Indonesia

Bangga, Pojok Menteri, Rehat Kuy, dan Pojok Presiden. Program apakah itu?

Berikut ini adalah penjelasan tentang program-program yang ditayangkan di PUPR TV

1. Ruang Bincang. Talkshow yang membahas tentang program Kementerian PUPR, pembangunan yang sedang dilakukan Kementerian PUPR, kemajuan dan capaian pembangunan infrastruktur, dan manfaat pembangunan.
2. Info PUPR. Program yang menampilkan beragam informasi tentang infrastruktur dan Kementerian PUPR yang perlu diketahui oleh masyarakat luas.

3. Warga Bicara. Kesaksian dari penerima manfaat pembangunan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR di seluruh Nusantara.
4. Mitra Bicara. Konten ini merupakan talkshow dengan mitra Kementerian PUPR, Unor, atau pun Balai yang membahas pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang berjalan.
5. Indonesia Bangga. Program untuk menyampaikan capaian dan hasil pembangunan infrastruktur yang megah dan bersifat ikonik di seluruh negeri sehingga membuat bangga bangsa Indonesia.
6. Pojok Menteri. Program yang menceritakan kinerja dan sosok Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono. Kinerja Basuki ini merepresentasikan citra Kementerian PUPR yang humanis dan humoris, tetapi suka bekerja keras dan memiliki jiwa seni.
7. Rehat Kuy. Tayangan ringan yang bersifat humanis dan humoris, santai dan dekat dengan masyarakat. Menceritakan aktivitas insan PUPR di luar jam kerja.
8. Pojok Presiden. Dikemas secara storytelling, tayangan ini menjadikan Presiden Jokowi sebagai tokoh utama yang menyampaikan hasil dan kemajuan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Kunci pengelolaan media sosial Kementerian PUPR ada pada kreativitas, inovasi, kolaborasi dan personalisasi. Pembuatan konten yang mengikuti tren dan *multiplatform* merupakan bentuk kreativitas yang terlihat nyata pada akun media sosial Kementerian PUPR.



Beberapa video dari program PUPR





04

Regulasi dan Kebijakan sebagai Payung Hukum

Regulasi dan Kebijakan sebagai Payung Hukum

Kementerian PUPR mengemban tugas pemerintahan yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur.

Advokasi Hukum

Advokasi Hukum Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Kementerian PUPR mengemban tugas pemerintahan yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini memerlukan pertimbangan berbagai aspek seperti aspek sosial yuridis khususnya pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahkan target penyelesaian penyelenggaraan konstruksi, terutama skala besar, sangat bergantung pada ketersediaan lahan bebas hasil dari pengadaan tanah.

Pengadaan tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang lainnya, karena pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan memberikan efek domino yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan maupun wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Era sekarang ini, masyarakat makin berani untuk menilai dan mengkritik pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparaturnya dalam hal ini Unit Kerja

terkait, Satuan Kerja maupun Pejabat Pembuat Komitmen di lapangan perlu dibekali pemahaman terhadap penerapan norma-norma hukum khususnya pada bidang pengadaan tanah beserta peraturan-peraturan terkait yang mendukung terselenggaranya pengadaan tanah yang *'clean and clear'*, tidak menyisakan permasalahan sekaligus dapat segera dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur.

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengakibatkan bertambahnya permasalahan hukum pengadaan tanah yang bersumber dari pelaksanaan pengadaan tanah dan tuntutan yang berkembang. Tuntutan masyarakat yang semakin luas dan beragam, kadang tidak disertai pengetahuan hukum maupun Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang memadai.

Di samping itu, terdapat juga tindakan aparaturnya/pelaksana tugas yang kurang memahami aturan hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, padahal aturan dimaksud tidak hanya semata-mata ditujukan kepada masyarakat, namun ditujukan pula kepada setiap penyelenggara negara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada proses penyelenggaraan pengadaan tanah. Akibatnya, antara



Pendampingan Penanganan Perkara dan Mitigasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Ameroro dan Tapin

masyarakat dan aparaturnya sering kali muncul gejolak yang tidak terakomodasi dan berujung pada timbulnya perkara – perkara hukum pengadaan tanah, mulai dari keberatan atas penilaian harga tanah, sengketa kepemilikan maupun keberatan atas dampak yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Beberapa permasalahan litigasi atau pengadilan yang menarik perhatian yang timbul dalam proses pengadaan tanah antara lain dalam pembangunan bendungan, embung ataupun irigasi karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memerlukan skala yang luas terutama untuk daerah genangan. Misalnya, Bendungan Karalloe, Bendungan Ameroro, Bendungan

Tapin, Bendungan Teritip, Embung Batu Putih, Daerah Irigasi Batang Asai, dan lain-lain. Terbitnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah mengubah paradigma dalam hukum administrasi pemerintahan di Indonesia. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, menegaskan prinsip negara hukum, di mana tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus berdasarkan hukum.

Regulasi tersebut memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 87 Undang-Undang tersebut memperluas

cakupan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diajukan ke PTUN. Sekarang, PTUN memiliki wewenang untuk menangani sengketa terkait keputusan tata usaha negara dari berbagai lembaga, termasuk di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya. Perluasan ini mencakup keputusan yang bersifat konkret, individual, final, dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat.

PTUN diberi wewenang untuk memutuskan sengketa terkait keputusan yang berlaku bagi masyarakat, mengadili gugatan tentang penyalahgunaan wewenang, dan menangani permohonan penerimaan keputusan fiktif positif.

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 lebih lanjut mengonfirmasi bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Dalam proses pengadaan tanah, diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi judul gugatan umum di pengadilan negeri yang menandakan bahwa apabila keputusan dan/atau tindakan terkait dinilai sebagai PMH, gugatan seharusnya diajukan ke PTUN

Proses pembebasan lahan dalam sengketa ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, terutama terkait pembangunan bendungan. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 menyatakan tugas Kementerian tersebut, dan Pasal 28 Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 mengatur tugas Balai Wilayah Sungai dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan, Kementerian

PUPR melalui Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (PPK Tanah) menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. Isu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam tuntutan ganti rugi muncul karena ketidaksesuaian antara tawaran ganti rugi yang diberikan dan harapan warga atau para penggugat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa sengketa semacam ini berada di ranah peradilan tata usaha negara, dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara PMH yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini sesuai dengan prinsip bahwa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan, dan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tata cara bagi pemilik lahan yang tidak setuju dengan besarnya ganti rugi. Pihak yang berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti kerugian.

Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keberatan diajukan dalam bentuk permohonan dan pengadilan berwenang memeriksa serta memutus keberatan terhadap besarnya ganti kerugian. Oleh karena itu, para penggugat seharusnya mengikuti upaya hukum acara perdata dengan mengajukan keberatan melalui permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR

Pada dua periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing negara. Pembangunan infrastruktur, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional dan daerah.

Dalam konteks ini, Kementerian PUPR memainkan peran penting, dan ASN yang menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan advokasi hukum. Kendati pembangunan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan masyarakat, munculnya sengketa perdata seperti klaim kepemilikan lahan dan sengketa harga ganti rugi tanah melibatkan pengadilan tata usaha negara.

Untuk menghindari terhambatnya pembangunan akibat sengketa lahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan alternatif penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri setempat, memungkinkan penggunaan lahan tanpa menunggu putusan hukum tetap.

Sengketa kepemilikan lahan negara dengan warga sering terjadi dan penataan dokumen pembebasan atau perolehan lahan menjadi krusial. Dalam hubungan dengan penyedia jasa konstruksi, kontrak konstruksi dapat menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan umum atau arbitrase sesuai pilihan forum yang diatur dalam kontrak. Pihak penyedia jasa perlu memiliki data dan kronologis yang akurat untuk memperkuat kedudukan dalam penanganan sengketa.

Selain di pengadilan negeri, penyelesaian sengketa konstruksi juga dapat dilakukan di arbitrase. Arbitrase sebagai alternatif

penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Beberapa keunggulan penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase, yaitu:

- Biaya lebih murah.
- Menghindari expose karena persidangan bersifat tertutup, antara para pihak dan majelis arbiter saja.
- Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada prosesnya.
- Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter dan dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- Keputusannya bersifat final dan mengikat.

Selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kebijakan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR juga mempunyai dampak hukum. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan tentunya dapat menurunkan risiko dampak hukum dan sosial yang timbul.



Sengketa kepemilikan lahan negara dengan warga sering terjadi dan penataan dokumen pembebasan atau perolehan lahan menjadi krusial.

MEMBANGUN PAYUNG HUKUM

Deregulasi Kebijakan

Selama kurun waktu 2014 hingga 2023 Kementerian PUPR melalui Pokja deregulasi kebijakan yang terdiri atas Kepala Biro Hukum dan para kepala bagian hukum/unit hukum di unit organisasi telah menyelesaikan tugas dalam menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

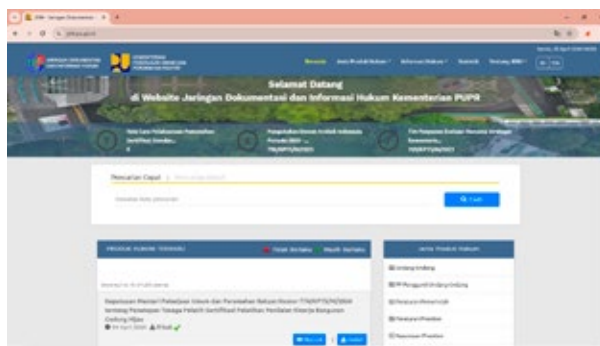
- 15 (lima belas) Undang-Undang;
- 42 (empat puluh dua) Peraturan Pemerintah;
- 48 (empat puluh delapan) Peraturan Presiden;
- 240 (dua ratus empat puluh) Peraturan Menteri; dan
- 16 (enam belas) Keputusan Presiden.

Dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan, Kementerian PUPR melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap semua peraturan yang berlaku. Hasil

identifikasi dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan baru, penyesuaian, atau penghapusan regulasi yang tidak lagi relevan. Proses ini terintegrasi dalam program perencanaan regulasi yang secara rutin disusun oleh Kementerian, mengikuti instrumen pengendalian penyusunan regulasi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum Kementerian PUPR, yaitu:

- a. Konsepsi Pengaturan;
- b. Analisis Dampak Kebijakan;
- c. *Draft* rancangan regulasi; dan
- d. Kesanggupan untuk menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Untuk memantau kesesuaian perencanaan regulasi dan realisasi penyusunan regulasi tersebut, digunakan dashboard pemantauan program regulasi yang diintegrasikan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PUPR.



Monitoring Program Regulasi pada Sistem Informasi JDIH Kementerian PUPR

Sistem JDIH PUPR berfungsi sebagai tulang punggung pemantauan dan evaluasi kebijakan deregulasi. Selain menyediakan dokumentasi dan informasi hukum, JDIH ini juga digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan Pokja. JDIH Kementerian PUPR menduduki peringkat 7 di antara seluruh Kementerian dan menerima penghargaan Pengelolaan Website JDIH terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Prestasi ini menunjukkan inovasi dan kemampuan

pengelolaan yang mampu meningkatkan pengalaman pengguna dari layanan JDIH Kementerian PUPR, meskipun dalam keterbatasan SDM yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan deregulasi kebijakan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan sebagai peringkat kedua terbaik secara nasional dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) 96.6 dan Kategori AA (Istimewa).



Penghargaan JDIH oleh Kemenko Marves



Media Publikasi Reformasi Hukum di Kementerian PUPR terkait Visualisasi Data Produk Hukum dan Penerapan e-Government



Media Publikasi Reformasi Hukum di Kementerian PUPR terkait Penyusunan Regulasi dan Penghargaan Bidang Hukum

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR melalui perubahan seiring berjalannya waktu.

Undang-undang tentang Jalan

Undang-undang terkait jalan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seiring waktu. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Perubahan signifikan pertama terjadi pada tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang kedua terjadi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sejarah regulasi jalan di Indonesia sendiri dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan "*Werverkeersordonnantie*" (*Staatsblad* 1933 Nomor 86). Undang-Undang terbaru mencakup pengambilalihan pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat dan daerah jika wewenang tersebut belum dilaksanakan, serta pengaturan yang lebih detail mengenai jalan umum, jalan tol, dan jalan khusus untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang berkeadilan.

Undang-undang tentang Sumber Daya Air

Sejarah Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia melibatkan beberapa tonggak penting. *Algemene Water Reglement* Tahun 1936, merupakan produk hukum kolonial

Belanda yang menetapkan air sebagai milik negara dengan pengelolaan oleh pemerintah atau pihak swasta berizin. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, fokus pada pentingnya pengairan untuk pertanian, terutama beras, dan mengatur peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengairan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah hasil reformasi yang mengelola sumber daya air secara terpadu dan berkeadilan, mengakui hak asasi manusia atas air bersih, serta mengatur peran pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah revisi yang menekankan pengelolaan terpadu, menambahkan kewajiban pemerintah menyediakan air minum untuk masyarakat miskin, dan melindungi hak hukum masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan sumber daya air.

Undang-undang tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang tentang jasa konstruksi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, kemudian pada 2017 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk menjawab tuntutan tata kelola yang baik dan harmonisasi dengan peraturan sektor lain. Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bertujuan meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kualitas jasa konstruksi di Indonesia.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang tentang bangunan gedung di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan. Dimulai pada tahun

2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung. Peraturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Pada tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang telah diubah. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kualitas bangunan gedung di Indonesia.

Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan bertujuan melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Undang-undang ini mengatur pembinaan perumahan dan kawasan permukiman dengan merujuk pada rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan perumahan kumuh, pencegahan timbulnya perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan.

Undang-undang tentang Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) menggantikan UURS lama (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) untuk mengatur penyediaan, pemanfaatan, pengendalian, dan

pemeliharaan rumah susun di Indonesia. UURS mengadopsi konsep kondominium dari UURS lama dengan penyesuaian, menetapkan definisi rumah susun, mengatur hak dan kewajiban pemilik, penghuni, dan pengelola, serta pembentukan Persekutuan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). UURS juga mencakup masa transisi dan bertujuan melindungi hak konsumen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyediaan dan pemanfaatan rumah susun.

Ketentuan Terkait Bidang PUPR dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan terkait Bidang PUPR diubah dalam undang-undang tentang cipta kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan juga peraturan pelaksanaan dalam bentuk 6 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, dan 17 Peraturan Menteri.

PUSAKA SEBAGAI JEMBATAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Penyampaian Tindak Lanjut Kebijakan Presiden dan Menteri PUPR dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Setelah berhasil melaksanakan Sembilan Agenda Prioritas atau yang lebih dikenal Nawa Cita pada periode pertama (2014-2019), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Pidato setelah Pelantikan sebagai Presiden pada periode kedua (2019-2024) kembali menyampaikan Lima Agenda Prioritas, yakni (1) pembangunan SDM; (2) pembangunan infrastruktur; (3) penyederhanaan regulasi; (4) penyederhanaan birokrasi; dan (5) transformasi ekonomi.

Tugas birokrasi adalah menjamin pekerjaan *making delivered* bukan hanya menjamin sent. Birokrasi yang *making delivered* adalah birokrasi yang mampu membuat program pembangunan bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia.

"Tugas kita itu menjamin *delivered* bukan cuma menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya cuma *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*"..."Birokrasi kita harus bisa menjamin agar mampu mengerjakan program itu dapat dirasakan masyarakat".

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR mengarahkan agar setiap disposisi Menteri harus ditindaklanjuti, *tidak boleh lepas*. Arahan dan kebijakan Menteri PUPR merupakan pondasi utama kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan infrastruktur PUPR, arahan Menteri yang bersifat *urgent* atau segera

mutlak perlu ditindaklanjuti dengan cepat. Arahan Menteri PUPR tidak terlepas dari kebijakan Presiden, arahan/usulan/hasil diskusi bersama DPR-RI, serta usulan pembangunan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah. Arahan yang bersumber dari kebijakan stakeholder lain ini juga tidak kalah pentingnya untuk dipastikan agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan Menteri PUPR juga tidak terlepas dari target Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian PUPR memegang peran penting dalam mengawal dan melaksanakan pembangunan infrastruktur serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Peran tersebut didukung melalui program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan.

Di samping itu, agenda pembangunan tersebut juga mengamanatkan perwujudan 41 proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024, yang di dalamnya terdapat 24 proyek strategis menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Proyek strategis dikelompokkan menjadi 13 Program, yaitu (a) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), (b) Food Estate, (c) Proyek Strategis Nasional (PSN), (d) PON 2020, (e) Stadion FIFA U-20, (f) Bangunan Gedung, (g) Kampus Politeknik, (h) Pondok Pesantren, (i) Kota Metropolitan, (j) Ibu Kota Negara (IKN), (k) Kawasan Ekonomi Khusus - Kawasan Industri (KEI-KI), (l) Padat Karya, dan (m) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Juga banyak lagi tugas direktif Presiden lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR untuk melakukan penyelesaian.



Proyek Strategis Nasional

Untuk memastikan seluruh kebijakan Presiden dan Menteri PUPR ter-delivered dan ditindaklanjuti dengan baik, cepat, dan tepat, maka Kementerian PUPR membentuk satu unit kerja baru bernama Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan (PUSAKA) yang lahir berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2020. Fungsinya melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

Secara tipologi, kebijakan yang dipantau dan dimonitor, dapat dibagi ke dalam 5 (lima) klaster kebijakan yaitu:

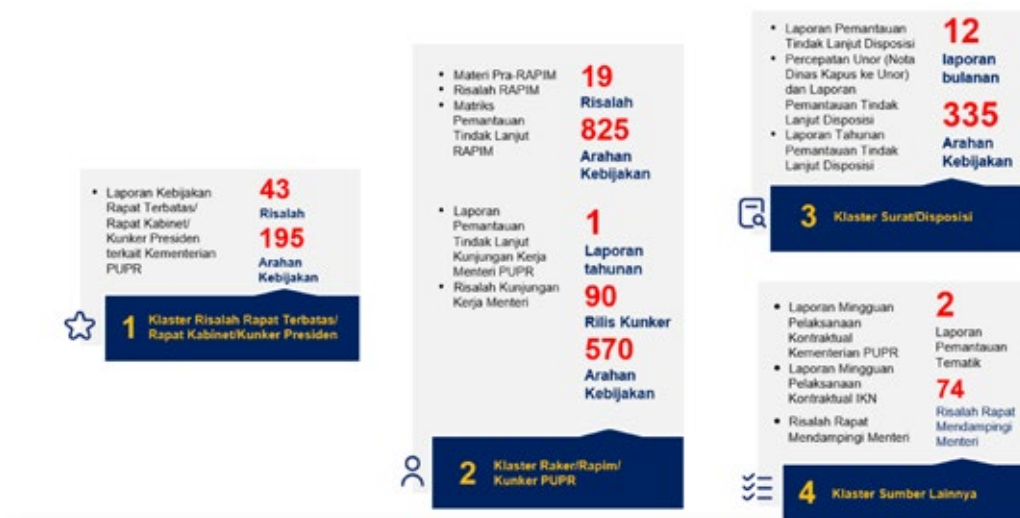
- (a) Klaster Kebijakan Presiden (kebijakan bersumber dari risalah Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, dan Rapat Internal).
- (b) Klaster Kebijakan DPR (kebijakan bersumber dari usulan DPR/DPRD kepada Kementerian PUPR).

- (c) Klaster Kebijakan Langsung Menteri PUPR (kebijakan bersumber dari arahan Menteri PUPR pada Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, Kunjungan Kerja dan tindak lanjutnya).
- (d) Klaster Surat/Disposisi Menteri PUPR (kebijakan bersumber dari surat/ disposisi yang bersifat urgent).
- (e) Klaster Kebijakan Lainnya (kebijakan bersumber dari Hasil Audiensi, Rapat Mendampingi Menteri, Sambutan Menteri, Usulan Internal, Matriks usulan Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah).

Pada awalnya, harus diakui bahwa dalam melakukan pemantauan tindak lanjut, ada berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yakni:

- (a) Belum tersedianya SOP sistem pemantauan pelaksanaan kebijakan karena masih berada dalam tahap pembenahan berbagai perangkat dan instrumen dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Sistem pemantauan pelaksanaan kebijakan yang selama digunakan masih mengadopsi pola-pola lama yang bersifat umum. Artinya, belum ada dan tersedia sistem yang baku yang dituangkan dalam suatu format SOP.

- (b) Belum tersedianya tata kelola pendukung pemantauan pelaksanaan kebijakan karena tata kelola pendukung seperti hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama Unit Organisasi belum tersedia deskripsi tugas dan aturan dalam melakukan pemantauan. Di samping itu, keberadaan PIC di masing-masing Unit Organisasi masih dalam tahap penyempurnaan.
- (c) Aplikasi sistem monitoring yang sudah ada belum optimal dan terintegrasi karena selama ini aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan kebijakan masih bersifat terbatas sehingga dalam melakukan pemantauan masih mengalami kesulitan dan kurang efisien.
- (d) Sumber daya penunjang sistem monitoring pelaksanaan kebijakan masih belum memadai (minim) karena sumber daya penunjang seperti perangkat dan kapasitas serta keterampilan SDM Tim Pemantauan masih terbatas, terlebih jika dibandingkan dengan adanya berbagai tugas yang memerlukan pemantauan yang tercermin dari 5 klaster kebijakan.



Rekapitulasi Kebijakan Per Klaster

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut, Kementerian PUPR berusaha melakukan upaya terobosan dalam rangka mengakselerasi pemantauan tindak lanjut kebijakan dengan membangun sebuah sistem yang diberi nama e-Pusaka sebagai *tools* pemantauan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (a) Seluruh kebijakan Menteri PUPR (sesuai klaster kebijakan) diinput ke dalam sistem e-Pusaka oleh admin, dengan mengambil informasi (surat dan lajur disposisi) dari sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kementerian PUPR.
- (b) Setiap unit organisasi Eselon I menunjuk beberapa pejabat/pegawai sebagai *Person in Charge* (PIC) Unit Organisasi yang berkoordinasi dengan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.
- (c) PIC Unit Organisasi yang nama-namanya telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal akan memantau pelaksanaan kebijakan di unit organisasinya secara bulanan dan menginput hasil pemantauan ke dalam sistem e-Pusaka paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
- (d) Hasil pantauan yang diinput oleh PIC Unit Organisasi paling lambat 2 (dua) hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir divalidasi.
- (e) Rapat bulanan *strategic pending matters* dilakukan untuk memberikan saran atau masukan dalam rangka mengatasi terjadinya hambatan atas implementasi kebijakan dan program pimpinan Kementerian PUPR (proses *de-bottlenecking*).
- (f) *Focus Group Discussion* (FGD) dan mengundang narasumber dari internal maupun eksternal, dan/atau dengan site visit sesuai kebutuhan guna mengatasi hambatan atas implementasi kebijakan yang belum terselesaikan dalam rapat bulanan.
- (g) Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan kepada Menteri PUPR sebagai bahan pengambilan keputusan.

The screenshot displays the e-Pusaka web application. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: DASHBOARD UMUM, DASHBOARD KEBIJAKAN, CHANNELING, and a 'Main Menu' section containing KEBIJAKAN (with sub-items: Disposisi Urgent, Kebijakan Presiden, Kebijakan Langsung Menteri, Usulan DPR, Usulan Kementerian/Lembaga, Usulan Pemerintah Daerah), BIG DATA PUSAKATN, AGENDA, KALENDER KAPUSAKA, RISALAH RAPAT dan KTA, MEETING PREMATRIAL, TASK MANAGEMENT, BAHAN PIMPINAN, POLICY BRIEF, JARA HUB, and C-BOOK. The main content area shows a table with 25 entries. The table has columns: TANGGAL, NOMOR BY SYSTEM, DISPOSISI, FILE, PERHAL, KATEGORI, LOKASI, and WARNING. The first three rows show 'Rapat Pimpinan' (Presidential Meetings) for January 8, 24, and 29, 2024. The fourth row shows a 'Kunjungan Kerja' (Working Visit) to JAWA TENGAH and JAWA BARAT on January 30, 2024.

TANGGAL	NOMOR BY SYSTEM	DISPOSISI	FILE	PERHAL	KATEGORI	LOKASI	WARNING
2024-01-08	2024SKPUPR010001	-		Rapat Pimpinan Kementerian PUPR 8 Januari 2024	Rapim	None	0 0 0 0
2024-01-24	2024SKPUPR010002	-		Rapat Pimpinan Kementerian PUPR 24 Januari 2024	Rapim	None	0 0 0 0
2024-01-29	2024SKPUPR010003	-		Rapat Pimpinan Kementerian PUPR 29 Januari 2024	Rapim	None	0 0 0 0
2024-01-30	2024SKPUPR010005	-		Kunjungan Kerja Bapak Menteri PUPR di Jawa Tengah dan Jawa Barat (Penerimaan, Penggantian Jembatan, Callender Hamilton, Peninjauan Kawasan Kota Lama, Banyumas, Groundsdi, Sungai Serayu, TPST RPD Jenukleg	Kunjungan Kerja	JAWA TENGAH, JAWA BARAT	0 0 0 0



Pendampingan Menteri PUPR dalam kunjungan kerja di Kawasan Pusaka Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Hasil dari penggunaan e-Pusaka dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan telah mendorong akselerasi respon tindak lanjut disposisi oleh seluruh Unit Organisasi. Setidaknya, total rata-rata waktu respon tindak lanjut disposisi untuk seluruh unit organisasi adalah 21 (dua puluh satu) hari, yang mana rata-rata waktu disposisi sampai ke pelaksana untuk seluruh Unit Organisasi adalah 16 (enam belas) hari, sementara rata – rata waktu tindak lanjut selama 6 (enam) hari.

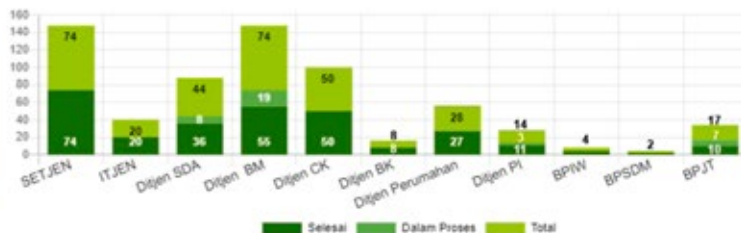
Dengan demikian, respon dan tindak lanjut oleh Unit Organisasi tersebut dapat menggambarkan bahwa kebijakan Menteri PUPR yang merupakan penjabaran dari kebijakan Presiden mendapat tanggapan yang cepat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR.

Penyiapan Produk Kebijakan Berkualitas dan Berdasarkan Hasil Riset (Evidence Based Policy)

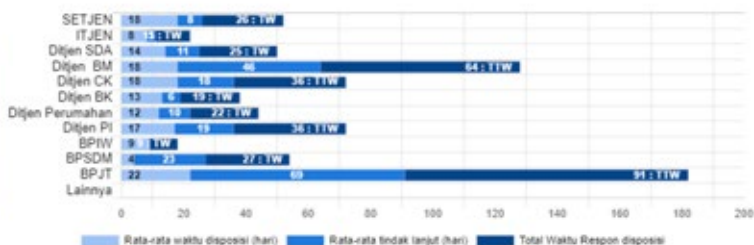
Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa salah satu hal yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan karena ada kalanya kebijakan tersebut disusun bukan berdasarkan hasil riset yang baik dan benar. Belajar dari hal ini, Kementerian PUPR berusaha bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada data, fakta, dan telah melalui proses ilmiah berupa penelitian atau kajian (*evidence-based policy*).

Penyiapan produk kebijakan yang berkualitas dilakukan melalui sejumlah proses dan berbagai tahapan yang harus dipenuhi seperti metodologi, kapasitas riset, waktu yang

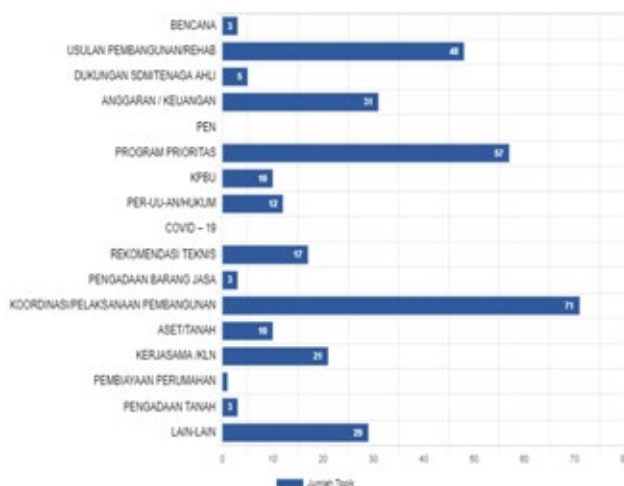
Jumlah Surat Urgent Per Unor Selama TA 2023



Kecepatan Disposisi Dan Waktu Tindak Lanjut Disposisi Selama 2023



Topik Surat Urgent yang sering muncul pada TA 2023



Hasil Pemantauan Kluster Surat dari Disposisi

memadai, data yang baik, serta lingkungan kebijakan yang reseptif yang pada akhirnya tersusun suatu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.

Policy brief dan *policy memo* merupakan produk yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. *Policy memo* merupakan dokumen lugas yang menganalisis

satu masalah dan memberikan rekomendasi untuk menginformasikan dan memandu pengambil kebijakan kunci. Sedangkan *policy brief* merupakan dokumen ringkas yang berfokus pada isu publik tertentu yang membutuhkan perhatian para pengambil kebijakan dengan memuat masalah dan alasan yang rasional terkait dengan pemilihan alternatif kebijakan tertentu.

Mengingat pengambil kebijakan memiliki waktu yang terbatas dalam membaca dan menelaah dokumen laporan, maka *policy brief* merupakan dokumen ringkas yang tepat. Secara umum, *policy brief* dan *policy memo* merupakan *evidence-based policy* yang ditujukan untuk meyakinkan para pengambil kebijakan tentang urgensi suatu permasalahan dan menentukan pilihan atau alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan suatu tindakan implementatif dan solutif.

Policy brief maupun *policy memo* disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk penyampaian isu dan rekomendasi kebijakan guna pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Untuk itu, guna memudahkan pimpinan atau pengambil kebijakan menemukan informasi kunci yang dibutuhkan, maka upaya penyusunan dilakukan secara menarik, efektif, dan efisien. *Policy brief* dan *policy memo* berperan penting sebagai jembatan antara analisis kebijakan dengan pengambil kebijakan. Berikut adalah salah satu contoh produk *policy brief* dan *policy memo*:



Policy Brief yang Ditujukan kepada Menteri PUPR

Policy Memo yang Ditujukan kepada Menteri PUPR

Judul-judul *policy brief* dan *policy memo* yang sudah disusun sebagaimana tabel di bawah ini:

Hasil Output Policy Brief dan Policy Memo

<i>Policy Brief</i>	<i>Policy Memo</i>
Tahun 2021 1. Transformasi Balitbang ke Unit Organisasi Teknis Sebagai Ujung Tombak Kualitas Infrastruktur PUPR 2. Perluasan Penerapan <i>Building Information Modelling</i> (BIM) pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR 3. Penguatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Program Padat Karya Tunai (PKT) Infrastruktur PUPR 4. Optimalisasi Aplikasi SiKasep, SiPetruk, SiKumbang dan SiReng dalam Penyelenggaraan Perumahan 5. Alternatif Penanganan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL) 6. Pengelolaan Sedimentasi di Waduk Berkelanjutan 7. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia 8. Upaya Peningkatan Implementasi OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi) Tahun 2022 1. Upaya pencapaian target waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau 2. Upaya Peningkatan Implementasi OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi) 3. Optimalisasi Penerapan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dan Percepatan Penerapan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) serta Jaminan Fidusia dalam Penyelenggaraan Rumah Susun 4. Penghijauan di Sekitar Infrastruktur Bendungan 5. Strategi Penyelenggaraan Rumah Susun Melalui Skema KPBU pada Lahan BMN 6. Strategi Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (Rest Area) 7. Skema Kolaborasi dan Pembiayaan Berbasis Pentahelix dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Tahun 2022 1. Pertimbangan Aspek Sosial Kultural dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR di IKN Baru Nusantara 2. Pengelola Drainase Terintegrasi 3. Peningkatan Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di Indonesia 4. Peran Survei dalam Manajemen Jaringan Jalan 5. Alternatif Kebijakan Pelaksanaan Fungsi BP3 Guna Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Tahun 2023 1. Strategi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Pekerjaan Umum (PU) Semarang 2. Evaluasi Pencapaian Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Upaya Percepatan Tahapan Proses KPBU Pembangunan Rusun Cisaranten dan Rusun Karawang Spuur 4. Ruang Air Tanah sebagai Aspek Penting dalam Mitigasi Keruntuhan Lereng pada Jalan Nasional 5. Akselerasi Implementasi Penetapan Garis Sempadan Sungai 6. Peran Survei dalam Manajemen Jaringan Jalan

Policy Brief

Tahun 2023

1. Integrasi Pengelolaan Air Permukaan dan Air Tanah
2. Upaya Peningkatan Kredibilitas Pembangunan Infrastruktur Melalui KKB, KKJTJ, KKK, dan KKBG
3. Rusun TOD sebagai Solusi Perumahan Perkotaan
4. Optimalisasi Peran Kementerian PUPR sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam Mengevaluasi dan Forecasting Dampak Ekonomi Pembangunan Infrastruktur





Sebagai upaya optimalisasi penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan, Kementerian PUPR melalui PUSAKA bersama dengan para Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Kementerian PUPR selaku Think Tank penyusunan rekomendasi kebijakan, terus melakukan pembinaan kapasitas JFAK secara kolaboratif, efektif, dan efisien.

Sesuai dengan Kepmen PUPR No. 645.1/KPTS/M/2021, Kementerian PUPR melaksanakan tugas pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan serta pemantauan dan evaluasi pemangku JFAK di lingkungan Kementerian PUPR. Hingga saat ini, telah dilaksanakan *Policy Lecture* dan *Policy Camp* yang mengupayakan pengembangan kapasitas JFAK dalam pembuatan produk kebijakan melalui tematik diskusi bersama dengan narasumber terkait. Berikut ini, komposisi jumlah JFAK aktif (Mei 2023) yang dimiliki oleh Kementerian PUPR.

Selain itu, dalam rangka pembinaan karir para JFAK, dibentuk Tim Penilai Instansi (TPI) JFAK di lingkungan Kementerian

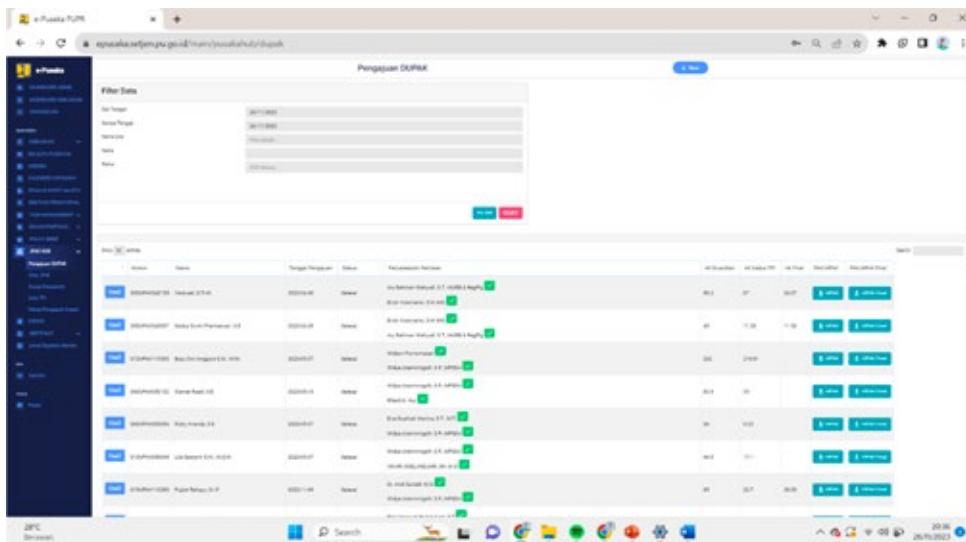


Jenjang JFAK	Jumlah JFAK
Ahli Pertama	124
Ahli Muda	37
Ahli Madya	5
	166

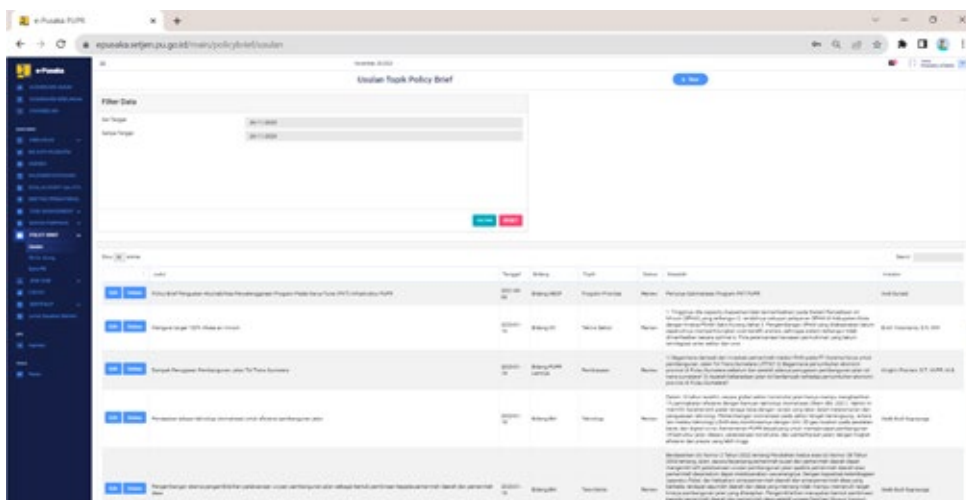
PUPR, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR No. 504/KPTS/SJ/2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Nomor 510.1/KPTS/SJ/2021.

Dalam rangka efisiensi kegiatan pembinaan dan kolaborasi bersama para JFAK tersebut, dilakukan inovasi pada sistem e-Pusaka melalui pembuatan fitur “JFAK Hub” dan “Policy Brief”. Bentuk inovasi pada sistem e-Pusaka tersebut mampu melaksanakan

prinsip zero paper dalam pengajuan DUPAK Jafung, serta mampu menampung usulan informasi rekomendasi kebijakan dari dan oleh para JFAK sebagaimana 2 (dua) gambar berikut.



e-Pusaka untuk Pengajuann DUPAK Jabatan Fungsional



e-Pusaka sebagai Media Digitalisasi Usulan Policy Brief dari Para JFAK

Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Tools Reformasi Birokrasi

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia dan berdaya saing melalui perbaikan tata kelola pemerintahan atau yang seringkali kita sebut dengan istilah Reformasi Birokrasi. Reformasi tersebut dilakukan di setiap aspek pemerintahan, salah satunya adalah peningkatan kualitas kebijakan yang merupakan payung hukum pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kualitas kebijakan yang disusun oleh pemerintah menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas suatu bangsa untuk dapat menghadapi era globalisasi dan digitalisasi.

Kualitas kebijakan publik di Indonesia diukur oleh Lembaga Administrasi Negara dengan menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang di dalamnya memuat berbagai indikator penilaian. Indeks ini menjadi sangat penting sebagai *tools* untuk mengukur sejauh mana kualitas kebijakan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. IKK bertujuan untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy* di seluruh instansi pemerintah. Melalui kerangka pengukuran IKK diharapkan dapat terbangun nilai-nilai baru dalam manajemen kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang dihasilkan memiliki dasar pengetahuan yang memadai dan dapat memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau *stakeholder*-nya.

IKK dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas 2 dimensi yaitu perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan dan 4 sub dimensi yaitu *agenda setting*, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut didetailkan ke dalam 13 indikator



Kebijakan yang menjadi objek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK

dan 39 pertanyaan. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode sampling dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 (satu) tahun untuk kebijakan.

Penilaian IKK mulai dilakukan pertama kali di Kementerian PUPR pada tahun 2021 dengan 26 sampling kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri PUPR dan kemudian terpilih random sampling oleh sistem menjadi 4 kebijakan untuk dilakukan pengukuran IKK. Kebijakan terpilih tersebut antara lain:

- a. Peraturan Menteri PUPR No. 17/ PRT/M/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- b. Peraturan Menteri PUPR No. 01/ PRT/M/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun Khusus Pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

- c. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pemberian Layanan Publik Tertentu.
- d. Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Pada tahun 2021 diperoleh nilai IKK yaitu 33% dan pada tahun 2022 yaitu 25,67%. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian terhadap kebijakan baru. Catatan penilaian yang diperoleh antara lain:

- a. *Self-Assessment* belum tuntas dan melebihi batas waktu pengukuran IKK 2021 sehingga tidak seluruh kebijakan dalam sampel masuk ke proses validasi penilaian.
- b. Pengelolaan tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan secara teknis masih kurang didukung dengan data dan informasi yang relevan, objektif, dan terukur.
- c. Pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan kurang maksimal.
- d. Pengelolaan kebijakan kurang berorientasi pada pemenuhan hak-hak kelompok masyarakat rentan/marginal.

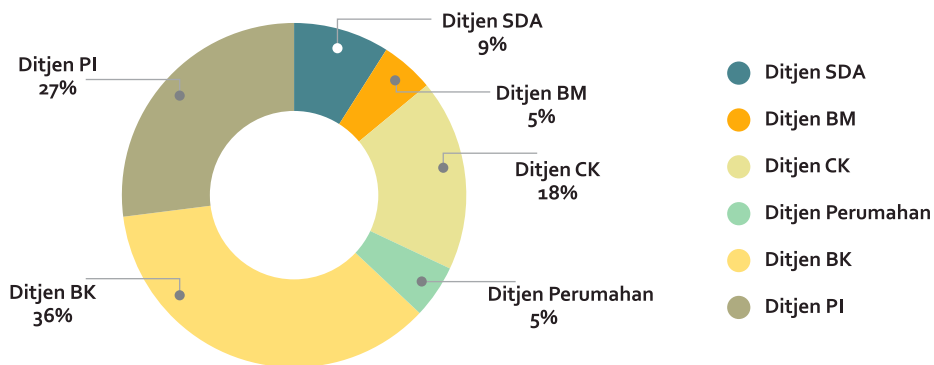
- e. Validasi penilaian lebih diarahkan pada relevansi dokumentasi informasi dengan proses kebijakan sehingga pada prinsipnya tidak ada batasan bentuk khusus untuk bukti dukung.

Pada tahun 2023, sebanyak 22 kebijakan dalam bentuk PUPR telah diajukan untuk dilakukan penilaian.

Kebijakan tersebut terdiri atas 2 kebijakan dari Ditjen Sumber Daya Air; 2 kebijakan dari Ditjen Bina Marga; 4 kebijakan dari Ditjen Cipta Karya; 1 kebijakan dari Ditjen Perumahan; 8 kebijakan dari Ditjen Bina Konstruksi; dan 6 kebijakan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adapun sebanyak 4 kebijakan terpilih secara random sampling dari Sistem Penilaian LAN, yang meliputi:

- a. Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

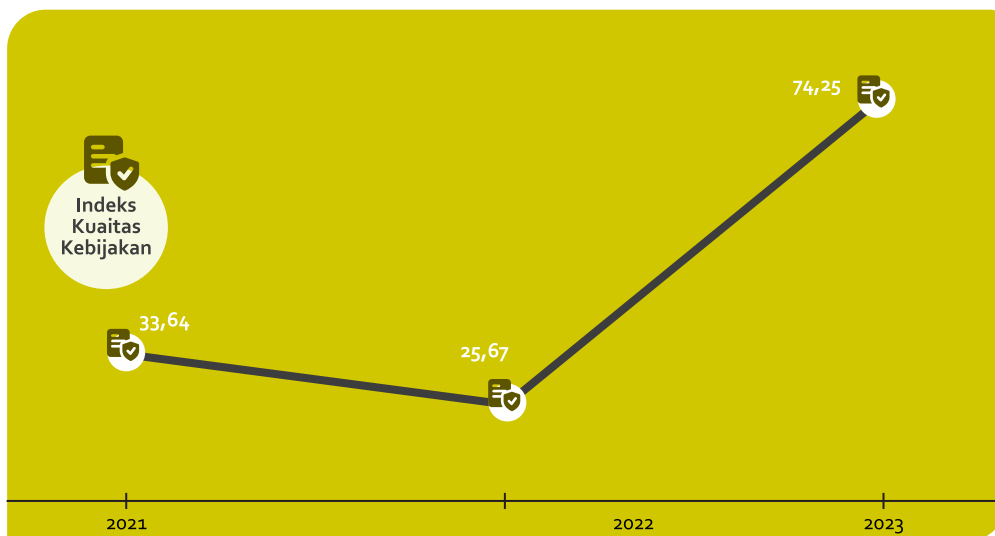


Statistik Jumlah JFAK tiap Unit Organisasi di Kementerian PUPR

- b. Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi.
- c. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- d. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- e. Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.

Pencapaian penilaian IKK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 25,67 menjadi 74,25 dengan predikat “Baik”. Hasil penilaian tersebut telah dilaporkan oleh LAN pada akhir tahun 2023. Perolehan predikat “Baik” IKK merupakan capaian membanggakan sekaligus memperkuat komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya perbaikan kualitas pengawasan.

Berbagai upaya peningkatan kualitas kebijakan dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan



Capaian Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian PUPR Tahun 2021-2023

kualitas kebijakan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK). Berbagai masukan, rekomendasi, dan feedback yang berkualitas dari para JFAK sangat diperlukan oleh para pembuat kebijakan. Saat ini, jumlah JFAK di Kementerian Kementerian berjumlah 169 orang.

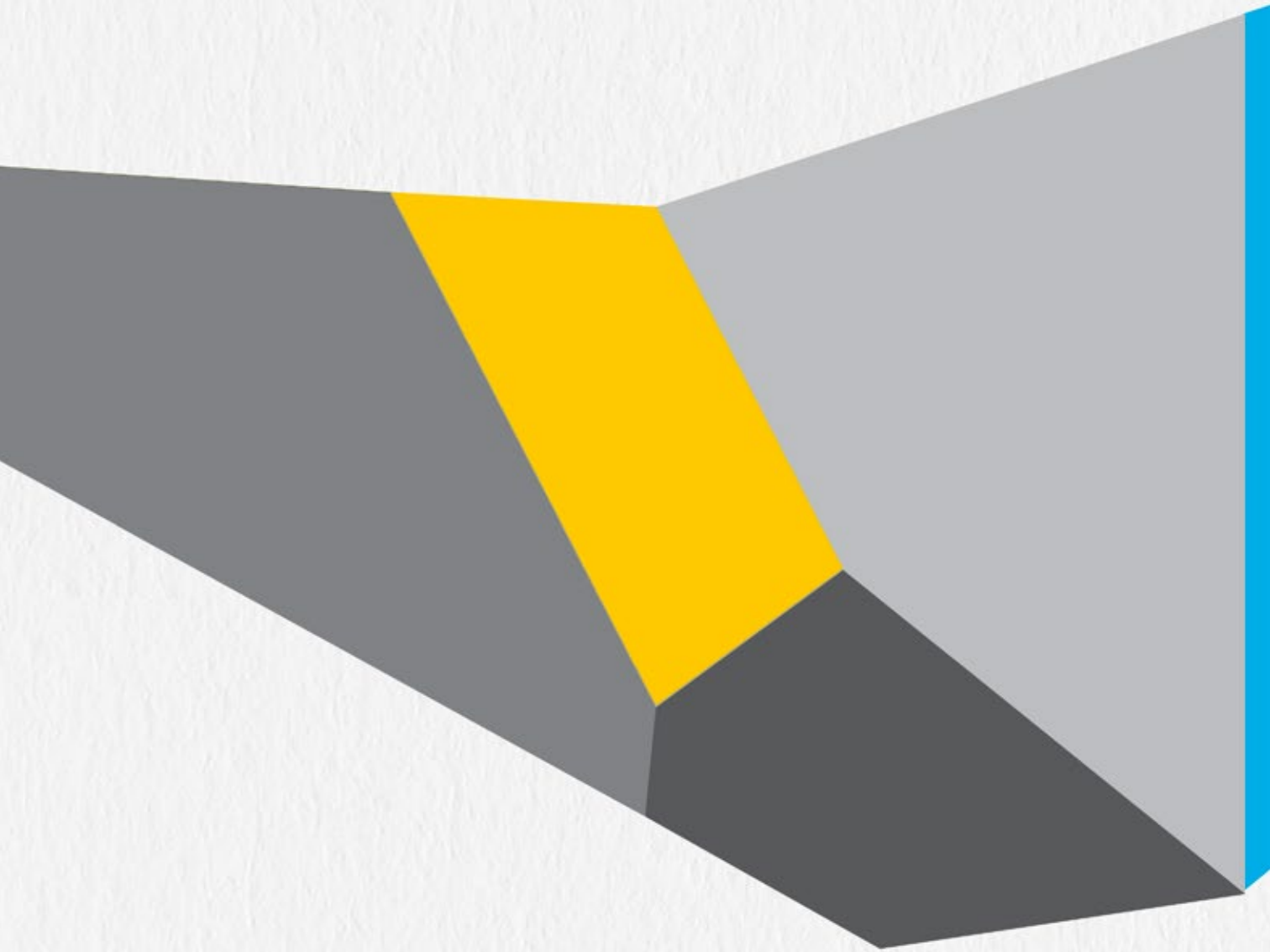
Nilai	Predikat Penilaian
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Koordinasi dan sosialisasi yang intensif bersama unit organisasi terus menerus dilakukan sejak tahun 2021 untuk dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Koordinasi tidak hanya dilakukan di internal lingkungan Kementerian PUPR, namun juga melibatkan LAN sebagai Pembina kualitas kebijakan dan mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai benchmark Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan predikat baik.

Harapan selanjutnya, para JFAK harus dapat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses yang teruji dan terstandarisasi, baik dari sisi tata kelola maupun kualitasnya. Selanjutnya melalui pengukuran IKK, para JFAK di Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola kebijakan publik Indonesia di masa yang akan datang.









05

Mengelola Kerja Sama

Mengelola Kerja Sama

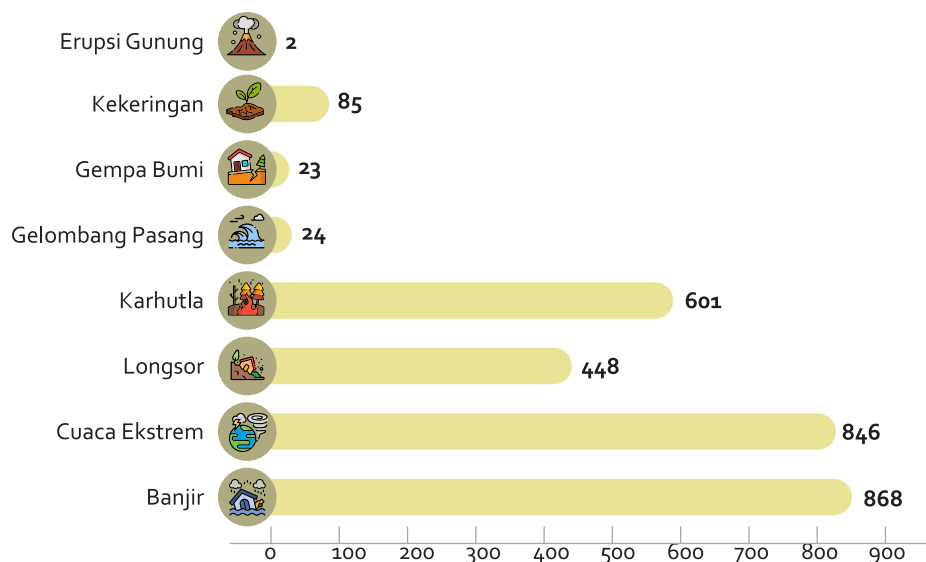
Indonesia, dengan letak geografisnya yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dan aktif—Asia, Samudera Hindia, Australia, dan Pasifik—menghadapi potensi bencana alam yang signifikan.

Menguntai Asa dari Bencana

Indonesia, dengan letak geografisnya yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dan aktif—Asia, Samudera Hindia, Australia, dan Pasifik—menghadapi potensi bencana alam yang signifikan. Dengan lebih dari 500 gunung berapi, 128 di antaranya masih aktif dan termasuk dalam "ring of fire" terkenal, negara ini rentan terhadap aktivitas seismik dan vulkanik. Indeks Risiko Dunia tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 193 negara dalam hal kerentanannya

terhadap bencana, dengan mempertimbangkan pemaparan, kerentanan, kerawanan, kurangnya kapasitas penanganan, dan kurangnya kapasitas adaptif.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.897 peristiwa bencana alam yang dilaporkan di Indonesia dari 1 Januari hingga 18 September 2023. Ini mencakup banjir (868), cuaca ekstrem (846), kebakaran hutan dan lahan (601), tanah longsor (448), kekeringan (85), gelombang pasang/abrasi (24), gempa bumi (23), dan erupsi gunung berapi (2).





Koordinasi Lintas K/L (BNPB dan Kementerian Keuangan) terkait Anggaran Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB dan Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana alam mencakup peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Infrastruktur PUPR seringkali menjadi sasaran langsung dari bencana alam, seperti kerusakan jalan, jembatan, dan kehilangan rumah tinggal, berdampak pada distribusi barang, layanan pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, Kementerian PUPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama untuk mengurangi risiko bencana dengan upaya pra, saat, dan pasca bencana, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan seperti tanggul sungai dan waduk.

Untuk meningkatkan respons terhadap bencana, Kementerian PUPR membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

(SATGAS PBPUPR). Fokusnya melibatkan pelestarian konektivitas jaringan transportasi, penyediaan fasilitas dasar, pemulihan pasca bencana, dan penanganan dampak kerusakan pada infrastruktur PUPR.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Kementerian PUPR menindaklanjuti dengan mengalokasikan Dana/Anggaran untuk Penanganan Bencana Alam ke empat Unit Organisasi, meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut terdistribusi dalam dua karakteristik utama, yaitu Dana Reguler yang digunakan sesuai perencanaan di T-1, dan Dana Cadangan yang diblokir untuk penanganan darurat pada tahun berjalan. Pemakaian Dana Cadangan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga memerlukan Persetujuan Menteri PUPR sebagai Pengguna Anggaran.



Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2015

Erupsi Gunung Sinabung

Kementerian PUPR telah memberikan dukungan konkret dalam penanggulangan erupsi Gunung Sinabung sejak 2015, terutama selama masa tanggap darurat bencana. Upaya tersebut mencakup perkuatan tebing Sungai Lau Barus, Sungai Lau Bakerah, dan Sungai Lau Kacinggong, pembuatan sabo dari beton sebagai jalan evakuasi, serta pembuatan tanggul. Selain itu, pada masa tanggap darurat, Kementerian PUPR menyediakan prasarana air bersih dan sanitasi seperti mobil tangki air, truk angkut barang, mobil toilet kabin, mobil tinja, tenda hunian darurat, hidran umum, jerigen air, dan wc *knockdown* di 54 lokasi posko pengungsian.

Selain itu, dilakukan pembangunan pengendali lahar berupa pembangunan bendung penahan (*check dam*), kantong lahar, bendung pengatur atau sabo dam, bendung konsolidasi serta pekerjaan normalisasi alur sungai dan pengendalian erosi di lereng-

lereng Gunung Sinabung. Bangunan tersebut berfungsi untuk memperlambat proses sedimentasi dari lahar yang turun dengan mengendalikan gerakannya menuju bagian sungai di sebelah hilir.

”

Kementerian PUPR menyediakan prasarana air bersih dan sanitasi seperti mobil tangki air, truk angkut barang, mobil toilet kabin, mobil tinja, tenda hunian darurat, hidran umum, jerigen air, dan wc *knockdown* di 54 lokasi



Pembangunan Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun, Pasca Gempa Bumi pada Tahun 2016

Gempa Bumi Pidie Provinsi Aceh

Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana gempa bumi di Aceh pada 7 Desember 2016. Dalam perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR berhasil merampungkan pembangunan 20 Sekolah Permanen, Masjid At-Taqarub, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah, Pasar Ule Glee, dan Fasilitas Kesehatan RSUD di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Untuk menggantikan sekolah yang rusak, Kementerian PUPR menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang tahan gempa, dengan pengerjaan sistem modular yang cepat dan potensial untuk diterapkan dalam rekonstruksi di Lombok pasca-gempa. Masa pelaksanaan pembangunan sekolah hanya memerlukan 150 hari.

Gempa Bumi dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian PUPR aktif melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir

di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pasca-gempa bumi dan tsunami dengan likuifaksi. Tiga kegiatan utama dilaksanakan, melibatkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala). Selain itu, terdapat rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan transmisi air baku di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, serta upaya serupa untuk jaringan irigasi Gumbasa dan Bangga di Kabupaten Sigi. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir bandang di area pemukiman, perkantoran, dan lahan pertanian. Rincian pekerjaan termasuk pembangunan tanggul laut sepanjang 8.674 meter di Kota Palu dan sabo dam, konsolidasi dam, tanggul sungai, perkuatan sungai, jembatan, dan tanggul pelindung di Kabupaten Sigi. Pada tahun 2023, pekerjaan sedang berlangsung melibatkan pembangunan sabo dam, konsolidasi dam, tanggul sungai, perkuatan tebing sungai, *ground sill*, dan tanggul laut.

Kementerian PUPR terus mempercepat pemulihan pasca-bencana dengan



*Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk Masyarakat Terdampak Bencana
Gempa Bumi-Likuifaksi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018*

menyelesaikan pembangunan 1.679 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Pembangunan huntap dilakukan dalam dua tahap, pertama di Duyu, Kota Palu,

dan Pombewe, Kabupaten Sigi (630 unit), dan tahap kedua di lokasi satelit di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (1.049 unit). Selesai dibangun, total 1.679 unit huntap menggunakan teknologi Rumah Instan



Pembangunan Hunian Tetap (Hunatap) untuk Relokasi Masyarakat Terdampak Badai Siklon Tropis Seroja di NTT dan NTB Tahun 2021

Sederhana Sehat (RISHA) yang memungkinkan konstruksi knock down dengan cepat, menggunakan bahan beton bertulang, dan didesain sebagai bangunan tahan gempa. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target awal Kementerian PUPR untuk membangun 8.788 unit hunatap relokasi hingga tahun 2023.

Siklon Tropis Seroja di Provinsi NTT dan NTB

Kementerian PUPR telah menyelesaikan seluruh penanganan infrastruktur yang terdampak oleh Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dukungan infrastruktur mencakup 563 kegiatan/lokasi, termasuk pekerjaan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Di Provinsi NTB, penanganan terlengkap dilakukan di 38 lokasi, melibatkan Sumber Daya Air (27 lokasi), Cipta Karya (9 lokasi), dan relokasi permukiman (2 lokasi). Sementara itu, penanggulangan infrastruktur di Provinsi NTT terdiri dari 525 kegiatan/lokasi, mencakup Sumber Daya Air (63 lokasi), Bina Marga (105 lokasi), Cipta Karya (348 lokasi), dan relokasi permukiman (18 lokasi).

Kementerian PUPR menangani dampak Badai Siklon Tropis Seroja di NTT dan NTB dengan rehabilitasi Sumber Daya Air di beberapa lokasi, termasuk Bendung Haekesak di Belu, Bendung Mena dan Kambaniru di Sumba Timur, serta Bendung Waisika di Alor. PUPR juga terlibat dalam penanganan Bina Marga, khususnya Jembatan Termanu dan Sungai Siumate Besar di Kupang. Selain itu, terdapat kegiatan relokasi permukiman di 20 lokasi/desa, mencakup 18 desa di 6 kabupaten Provinsi NTT dan 2 desa di 2 kabupaten Provinsi NTB, dengan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan air bersih.

Erupsi Gunung Semeru Provinsi Jawa Timur

Kementerian PUPR telah menyelesaikan penanganan dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada 2021. Dalam respons tanggap darurat atas perintah Presiden Jokowi, Kementerian PUPR membangun 1.951 unit Rumah Khusus tipe 36 yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman, seperti drainase, air minum, sanitasi, dan jembatan. Rumah khusus ini, bersama dengan pembangunan Jembatan Besuk Koboan, merupakan langkah penanganan jangka pendek dan panjang untuk membantu korban bencana. Direktorat Jenderal Perumahan memimpin proyek ini dengan membangun rumah menggunakan konsep build back better dan teknologi rumah tahan gempa RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Rumah ini menyatu dengan hunian sementara (huntara) dan dirancang berukuran 6x6 meter pada tanah seluas 10x14 meter untuk setiap Kepala Keluarga (KK).

Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tidak hanya membangun



Pembangunan Jembatan Besuk Koboan yang Terdampak Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021



Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021

rumah khusus, tetapi juga menyediakan fasilitas dasar permukiman. Proyek ini mencakup pembangunan drainase, air minum, sanitasi, dan jembatan di area seluas 81,55 Ha. Instalasi air minum melibatkan reservoir 300 m³, pipa distribusi 5.280 meter, *broncapture* 2 unit, dan penyambungan saluran rumah sebanyak 1.951 SR, dengan kapasitas total penyediaan air 25 liter/detik untuk 2.000 KK.

Di sektor sanitasi, dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 80-500 KK dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 2000 KK. Fasilitas umum dan sosial di dalam huntap mencakup masjid, sekolah, sarana olahraga, lapangan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pasar. Selanjutnya, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR sedang menyelesaikan pembangunan Jembatan Besuk Koboan yang sebelumnya roboh akibat erupsi Gunung Semeru, dengan panjang 140 meter, mengembalikan konektivitas Lumajang-Turen-Malang yang terputus.

”

Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tidak hanya membangun rumah khusus, tetapi juga menyediakan fasilitas dasar permukiman. Proyek ini mencakup pembangunan drainase, air minum, sanitasi, dan jembatan di area seluas 81,55 Ha.



Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi Cianjur, Jawa Barat Tahun 2022

Gempa Bumi Cianjur Provinsi Jawa Barat

Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melakukan perbaikan gedung milik pemerintah dan fasilitas publik yang terdampak bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pelaksanaan perbaikan diprioritaskan pada bangunan rusak berat dan sedang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, peribadatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Selain perbaikan gedung milik pemerintah dan fasilitas publik, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga akan menghibahkan sarana prasarana tanggap darurat yang masih tersisa di Cianjur yang terdiri atas toilet portabel hidran umum (54 unit), tenda ukuran 4x6 (10 unit), bak sampah bundar (40 unit), dump truck (1 unit), truk angkut (1 unit), truk arm roll (1 unit), mobil vakum tinja (2 unit), dan mobil tangka air akan dipinjam pakai (5 unit).

KOLABORASI DAN ORKESTRASI UNTUK KOMUNIKASI BERSINERGI

Kerja Sama Kompak Mewujudkan Komunikasi dan Pelayanan Berorientasi Publik.

Terbuat dari pelapah pohon kepala atau aren, sapu lidi biasa digunakan banyak orang Indonesia untuk membersihkan halaman sekitar rumah atau suatu tempat. Sesuai namanya sapu lidi, sapu ini terdiri dari ratusan batang lidi yang diikat sehingga menjadi satu kesatuan. Karena ratusan batang lidi itu bersatu, maka sapu lidi bisa menyapu kotoran yang ada disuatu tempat.

Bayangkan, jika ratusan batang lidi tadi tidak diikat. Bisa jadi ratusan batang lidi itu tercecar dan berserakan ke mana-mana sehingga tidak bisa digunakan untuk menyapu. Alih-alih menjadi bersih, sapu lidi yang tidak diikat

malah membuat suatu tempat menjadi tambah kotor.

Sekilas, filosofi sapu lidi pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin (27/10/2014). Saat itu, Jokowi meminta semua menteri di kabinetnya bisa bekerja lintas sektoral dan tidak mementingkan kepentingan masing-masing kementerian.

"Tugas kita semua adalah menjalankan visi dan misi serta program utama presiden, tidak ada visi menteri yang ada program operasional menteri, bekerja garis lurus, sesuai arahan, ego sektoral dihentikan, Kita harus mulai semuanya dengan tradisi baru bekerja lintas sektor karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri, koordinasi bukan hanya kementerian, bisa juga lintas kementerian koordinator," tegas Presiden.



Ilustrasi dari Filosofi Sapu Lidi yang Menggambarkan Kerjasama Kompak

Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kementerian PUPR memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Khususnya selama era kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2019 dan 2019-2023), Pemerintah Indonesia fokus menggarap pembangunan infrastruktur.

Walhasil program-program yang dijalankan oleh berbagai unit dan sektoral di Kementerian PUPR memiliki peran krusial untuk kesuksesan Indonesia. Namun, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh eksekusi yang baik, tetapi juga kemampuan dalam berkomunikasi dengan publik untuk menyampaikan informasi secara efektif.

Kolaborasi di dalam lingkungan Kementerian PUPR harus dilakukan. Bahkan kolaborasi lintas kementerian dan pentahelix dibutuhkan. Kolaborasi ini mutlak diperlukan untuk memastikan program-program yang telah direncanakan dan dijalankan Kementerian

PUPR tersampaikan dengan baik ke masyarakat serta memiliki dampak positif.

Selama tahun 2022, Kementerian PUPR telah mengolah dan menyusun 729 bahan informasi pimpinan yang digunakan dalam agenda rapat pimpinan. Bahan informasi ini digunakan untuk pembuatan Laporan Menteri PUPR kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang kabinet, pembuatan Laporan Menteri PUPR kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), pembuatan Laporan Menteri PUPR untuk Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator (Menko) dan lintas Kementerian/Lembaga lainnya.

Contoh Rakor bersama Menko dan lintas Kementerian atau Lembaga adalah saat Rakor Strategi, Program Sosialisasi, dan/atau Kampanye Publik yang sedang digalakkan pemerintah. Salah satunya adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2022 yang melibatkan semua humas di Kementerian atau Lembaga.

Tahun 2021 757 Bahan Informasi Penyediaan Bahan Informasi Pimpinan						
Tahun 2022 729 Bahan Informasi	Bulan	Legislatif	Presiden/Wakil Presiden	Rapat Koordinasi Menteri	Lain-lain	Total
	Januari	2	18	7	25	52
	Februari	2	9	9	27	47
	Maret	-	9	9	62	80
	April	3	12	8	42	65
	Mei	6	9	-	42	57
	Juni	3	12	3	38	56
	Juli	-	10	11	42	63
	Agustus	1	10	4	41	56
	September	3	15	1	54	73
	Oktober	-	4	6	44	54
	November	2	4	3	63	72
	Desember	3	8	3	40	54
	Total	25	120	64	520	729

Kolaborasi Kementerian PUPR dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

Tidak melulu kolaborasi lintas Kementerian/ Lembaga, kolaborasi internal di tubuh Kementerian PUPR juga harus digarap dan jalankan dengan baik. Apalagi kalau menyangkut kepentingan umum. Kolaborasi internal pun harus terlaksana dengan mulus agar bisa melayani publik dengan maksimal.

Salah satu kolaborasi krusial di internal Kementerian PUPR, yaitu antara Kementerian PUPR (Badan Pengatur Jalan Tol dan Biro Komunikasi Publik) berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam sosialisasi Penetapan Tarif Tol Awal dan Penyesuaian Tarif Tol.

Setiap 2 (dua) tahun sekali, dilakukan evaluasi dan penyesuaian tarif tol berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Isu ini menjadi semakin krusial, karena infrastruktur jalan

tol menyangkut pergerakan atau perpindahan orang dan barang yang secara tidak langsung bisa berpengaruh ke hajat hidup orang banyak sehingga terdapat potensi resistansi publik yang dapat berujung pada krisis komunikasi.

Untuk meminimalisir resistansi terhadap penyesuaian tarif tol tersebut, diinisiasi panduan sosialisasi komunikasi publik penyesuaian Tarif Tol yang dilakukan dengan pendekatan 3 (tiga) *Steps Approach*, yakni Sosialisasi Manfaat, Sosialisasi Besaran Tarif Tol, dan Sosialisasi Waktu Pemberlakuan Tarif Tol. Selain konten, *stakeholder* dan saluran komunikasi yang digunakan juga turut dipetakan dalam panduan agar sosialisasi yang dilakukan oleh BUJT memiliki standar yang sama.

Tentunya tidak hanya sekadar sosialisasi yang diatur, pada tiap akhir tahapan, BUJT juga diminta untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi respon publik terhadap pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya antisipatif dan responsif terhadap perkembangan isu.



Focus Group Discussion

- Pemprov/Pemkab/Pemkot
 - Pengamat/Pakar
 - Akademisi
- Asosiasi Logistik
 - Asosiasi/ Pemilik Angkutan Umum

Kolaborasi Kementerian PUPR dengan Pemda

Selanjutnya, sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran signifikan dalam menyukseskan program nasional. Pasalnya Pemda-lah yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah. Makanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini, kementerian, dengan Pemda sangatlah dibutuhkan untuk menyukseskan program nasional.

Begitu juga dengan Kementerian PUPR. Ada begitu banyak program kerja Kementerian ini di daerah. Kolaborasi dengan Pemda setempat dibutuhkan agar program kerja Kementerian PUPR dapat berjalan mulus dan yang paling penting, berdampak bagi masyarakat daerah. Salah satu program Kementerian PUPR yang melibatkan Pemda adalah terkait Pemenuhan Ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Layak Huni. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka *backlog* perumahan.

Terkait Persoalan itu, Kementerian PUPR pernah mengundang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah Ir. Arief Djatmiko, MA dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc menjadi narasumber Podcast Sigap Membangun Negeri episode 46 “Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyediaan Perumahan”.



Salah satu program Kementerian PUPR yang melibatkan Pemda adalah terkait Pemenuhan Ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Layak Huni.



Podcast Sigap Membangun Negeri : Kolaborasi Stakeholder dalam Penyediaan Perumahan

Kolaborasi Kementerian PUPR dengan Media

Kebebasan pers di negara demokrasi seperti Indonesia sangatlah di junjung tinggi. Tak main-main, pers menjadi pilar keempat di dalam sistem negara demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Alhasil, media yang menjadi tempat bernaung pers menjadi lembaga independen yang punya peran krusial dalam menjaga kebebasan, keadilan, serta akuntabilitas dalam masyarakat.

Bagi institusi atau lembaga pemerintah, media bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam berkomunikasi ke publik. Ini terjadi lantaran sifat media yang bisa menyebarkan pesan secara cepat ke khalayak luas. Jika dimanfaatkan dan digunakan dengan baik serta maksimal, media bisa menjadi alat untuk membangun reputasi atau branding sebuah merk, organisasi atau institusi.



PUPR Goes To Campus di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Oktober 2022

Atas dasar itu, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan media untuk berkomunikasi dengan publik. Kolaborasi diperlukan agar Kementerian PUPR bisa menyampaikan kebijakan, capaian, progress, rencana dan program yang akan atau sedang berlangsung kepada publik secara efektif dan akurat.

Sebagai bagian dari kolaborasi dengan media, Biro Komunikasi Publik sudah pasti selalu mengadakan *media briefing*, *media gathering*, *press tour*, *press conference* dan menyediakan *press realase* atau siaran berita.

Kolaborasi dengan Civitas Akademika

Branding sejak dini. Ya, kalimat ini bisa saja pas untuk menggambarkan tujuan kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan insan akademika, dalam hal ini lembaga perguruan tinggi dan sekolah. Dengan dikoordinir Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR bisa mengenalkan sejak dini tugas, fungsi dan tanggung jawabnya kepada putra-putri generasi bangsa yang sedang mengenyam pendidikan.





PUPR Goes To My School di SDN Kereo, Kota Tangerang, Banten pada 15 Maret 2023

Lagi pula *Branding* Kementerian PUPR sejak dini sesuai dengan Renstra Biro Komunikasi Publik PUPR 2020-2024, yang mengamanatkan Biro Komunikasi Publik untuk menjalankan dua tugas. Pertama, meningkatkan *awareness* publik terhadap Kementerian PUPR. Kedua, meningkatkan *engagement* publik terkait kebijakan, program, kegiatan dan konten Kementerian PUPR.

Untuk menjalankan dua tugas itu Kementerian PUPR berkolaborasi dengan civitas akademika menyelenggarakan PUPR *Goes to Campus*, PUPR *Goes to My School*, Jelajah Kampus PUPRm dan Bedah Buku. Melalui PUPR *Goes to Campus*. Kementerian PUPR berkunjung ke kampus-kampus untuk menyebarkan informasi terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia

kepada kalangan mahasiswa. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kolaborasi Biro Komunikasi Publik PUPR dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi di Tanah Air.

PUPR Goes to My School. Kali ini, Kementerian PUPR datang ke sekolah dasar (SD) untuk memberikan edukasi tentang pembangunan infrastruktur dan kinerja Kementerian PUPR kepada siswa-siswa SD. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi dengan beberapa SD di Indonesia.

Company Visit to PUPR. Berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya, di *Company Visit to PUPR* ini, Kementerian PUPR menerima kunjungan lembaga pendidikan dari berbagai

jenjang, mulai SD, sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga universitas ke kantor PUPR. Lewat kunjungan ini, Kementerian PUPR memberikan edukasi tentang pembangunan infrastruktur dan kinerja Kementerian PUPR kepada pelajar dan mahasiswa.

Bedah Buku. Kementerian PUPR dengan dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi Publik berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menyelenggarakan Beda Buku. Adapun buku-buku yang dibeda bertema pembangunan infrastruktur yang menjadi koleksi perpustakaan Kementerian PUPR. *Audiens* yang dibidik dari Bedah Buku adalah mahasiswa, media, dan kelompok masyarakat.



Webinar Bedah Buku Hortus Seantero Kampus di Kampus Pattimura Kementerian PUPR pada 29 Desember 2022

Kolaborasi Internal Kementerian PUPR

Realitasnya sehari-sehari, kolaborasi lintas unit, sektoral dan balai di Kementerian PUPR memang bukan barang baru lagi, tetapi sudah lazim terjadi.

Apalagi Kementerian PUPR memiliki peran krusial untuk mewujudkan program prioritas Presiden Jokowi yang selama memimpin Indonesia (2014-2019 dan 2019-2023) fokus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Program yang dijalankan oleh berbagai unit dan departemen di Kementerian PUPR memegang peranan penting untuk kemajuan Indonesia. Namun, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh eksekusi yang baik, tetapi juga kemampuan dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat. Singkatnya, sekeren apapun program dan capaiannya, jika tidak didukung oleh komunikasi publik yang mumpuni, maka tidak akan terdengar gaungnya hingga ke akar rumput atau rakyat biasa.

Atas dasar itu, dibutuhkan strategi dan tata kelola dalam penyampaian informasi Kementerian PUPR ke publik. Strategi dan tata kelola yang disusun harus sejalan dengan

upaya membangun *branding* Kementerian PUPR. Tentu saja, dibutuhkan kolaborasi internal yang solid dalam mewujudkannya.

Contoh kolaborasi internal yang dimaksud, seperti kolaborasi unit organisasi dan balai di Kementerian PUPR dalam membuat dan mengoordinasikan *agenda setting* narasi di media sosial, koordinasi dan kolaborasi terkait hubungan media (*press release*, *press conference*, *press tour*), persiapan peresmian proyek infrastruktur (desain dan konten panel informasi, desain undangan, prasasti), dan *event* komunikasi publik (pameran, *PUPR Goes to My School*)

Tidak hanya itu, Sekjen Kementerian PUPR juga bertindak mewakili Badan Publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Sedangkan Tim Pertimbangan PPID memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

Untuk diketahui, setiap tahun selalu ada pelaporan sengketa informasi publik. Pihak yang mengadukan kasus sengketa terdiri dari perorangan, LSM dan lembaga. Berikut Koordinasi penyelesaian Pengaduan kasus sengketa informasi publik.

	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Informasi
2017	BBWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan dan BBWS VIII di Sumatera Selatan
2018	Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
2019	Pada periode ini, tidak ada laporan sengketa atau keberatan terhadap pelayanan informasi publik akibat informasi yang dikecualikan
2020	Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Informasi
2021	BPPW Sulawesi Barat Ditjen Cipta Karya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, BBWS Citarum, BBWS Citanduy, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah.
2022	BPJN Ditjen Bina Marga Kalimantan Tengah, Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Timur, BBWS Brantas Ditjen Sumber Daya Air, BPPW Ditjen Cipta Karya Bengkulu, BBWS Ciliwung–Cisadane Ditjen Sumber Daya Air, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Ditjen Cipta Karya, BBWS Cimanuk Cisanggarung Ditjen Sumber Daya Air, BWS Sumatra II Medan Ditjen Sumber Daya Air, BWS Sumatra VII Bengkulu Ditjen Sumber Daya Air



Sekjen Kementerian PUPR juga bertindak mewakili Badan Publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

Sedangkan Tim Pertimbangan PPID memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

Koordinasi dengan DPR

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan menjadi beberapa bagian, yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR/DPD) dan Yudikatif (Mahkamah Konstitusi/MK, Mahkamah Agung/ MA, dan Komisi Yudisial/ KY).

Lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar. Keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Baik eksekutif dan legislatif saling membutuhkan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, presiden berserta para menteri sebagai bagian dari eksekutif membutuhkan peran dari legislatif untuk pembentukan undang-undang, penetapan anggaran tahunan kementerian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program eksekutif.

Sebenarnya masih banyak lagi hubungan mitra yang tercipta antara legislatif dengan eksekutif. Yang jelas komunikasi antar kedua lembaga negara ini membuat pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik.



Rapat Kerja Kementerian PUPR bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Karena sebagai mitra, DPR sering mengadakan pertemuan rutin dengan kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Komisi V DPR RI yang membawahi bidang infrastruktur dan perhubungan, rutin mengagendakan rapat membahas Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran Sesuai Nota Keuangan RAPBN.

Di luar dari agenda itu, Komisi V DPR RI bisa sewaktu-waktu meminta pertemuan dengan Menteri PUPR untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan infrastruktur. Agenda pertemuan rutin Menteri PUPR bersama jajarannya dengan Komisi V DPR bisa berjalan mulus berkat campur tangan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Campur tangan ini terlihat dari upaya Biro Komunikasi Publik dalam berkoordinasi dengan DPR untuk membuat jadwal pertemuan. Campur tangan ini juga terlihat dari peran vital Biro Komunikasi Publik dalam menyediakan bahan informasi untuk Menteri

PUPR dan pimpinan lain di Kementerian PUPR sebagai penunjang dan referensi mereka menjalani rapat dengan DPR.

Koordinasi Kunjungan Kerja DPR ke Proyek Infrastruktur

Tak melulu soal rapat, Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI juga bersama-sama turun langsung ke lapangan meninjau proyek pembangunan infrastruktur, baik yang baru dimulai, sedang berlangsung, dan sudah selesai atau resmi beroperasi.

Bukan cuma dari kalangan eksekutif dan legislatif saja, Kementerian PUPR mesti pula berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sebab dalam pelaksanaan kunjungan kerja ke proyek infrastruktur di suatu daerah, kepala daerah, baik itu Wali Kota, Bupati dan Gubernur Provinsi sering hadir menemani eksekutif dan legislatif.



Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI didampingi oleh Kementerian PUPR

Agar kunjungan kerja ke proyek infrastruktur berjalan lancar, Kementerian PUPR juga harus berkolaborasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Komisi V DPR, Pemda setempat untuk menyediakan bahan informasi yang akan digunakan mereka.

”

Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI juga bersama-sama turun langsung ke lapangan meninjau proyek pembangunan infrastruktur, baik yang baru dimulai, sedang berlangsung, dan sudah selesai atau resmi beroperasi.

Koordinasi DPRD dan Pemerintah Daerah dengan Kementerian PUPR

Dalam membangun infrastruktur, salah satu mitra kerja yang tidak boleh terlupakan adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mengapa? Karena membangun suatu infrastruktur tidak bisa dikerjakan sendiri melainkan harus berkolaborasi. Ini agar pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sinergis dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sinergisme infrastruktur yang terbangun akan mendukung pertumbuhan wilayah di mana infrastruktur itu berada. Kementerian PUPR memfasilitasi kunjungan DPRD dan Pemerintah Daerah ke Kementerian PUPR dengan menghubungkan mereka ke Unit Organisasi yang tepat. Dengan demikian, tercipta ruang diskusi yang optimal untuk membahas mengenai infrastruktur bidang PUPR

PEKERJAAN
KUMAHAN RAKYA





06

Pelayanan Sebagai Kunci

Pelayanan Sebagai Kunci

Pada awalnya, Biro Umum menemukan tantangan standarisasi bagaimana merawat dan memelihara fasilitas dengan baik. Hal ini menimbulkan ide sederhana berupa terminologi kata yang akhirnya disepakati bersama untuk menilai sesuatu itu baik atau tidak.

KAMPUS PUPR ASIK

Sepenggal kalimat tersebut menjadi paradigma lazim yang banyak ditemukan dalam laku kehidupan kita. Dalam konteks spesifik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR memiliki tanggung jawab untuk memelihara bangunan gedung dan rumah jabatan, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan termasuk lansekap, penyediaan utilitas bangunan dan kawasan. Selain itu, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR juga memiliki tugas tambahan, yaitu mendukung teknis pemeliharaan kalayang dan rumah susun yang menghadapi kesulitan dan tantangan yang perlu diselesaikan.

Asik, Diksi yang Mudah Dipahami

Pada awalnya, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR menghadapi tantangan standarisasi terkait perawatan dan pemeliharaan fasilitas. Ini mendorong konsep sederhana untuk menetapkan terminologi yang disepakati bersama guna menilai kualitas sesuatu sebagai baik atau tidak. Dalam gaya kekinian, sesuatu yang dianggap tidak baik dan tidak menarik disebut dengan istilah "*Elu ga asik...*". Sebaliknya, seniman idola Bapak Menteri Basuki Hadimuljono, Iwan Fals, mengekspresikan kegembiraan dengan lirik "*Sekali lagi...asiikk*" dalam lagunya "Bento".

”

‘Merawat dan memelihara lebih sulit daripada membangun’

”

Berdasarkan terminologi sederhana tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR merumuskan tagline "KAMPUS PUPR ASIK" pada tahun 2022, yang jika diurai hurufnya dapat bermakna "KAMPUS PU PRASIK". Ini dibuat dengan pemahaman baik buruknya performa bangunan dan lingkungan Kampus Kementerian PUPR yang berakar pada Bagian Prasarana Fisik. Dengan demikian, standar penilaian sebagai *key performance indicator* (KPI), dapat dengan mudah ditetapkan, seperti penilaian pelanggan terhadap kinerja, seperti keasikan taman, gedung, acara, dan sebagainya.

Kampus PUPR ASIK memiliki filosofi sebagai berikut :

- a. **PRudence**, yaitu kehati-hatian dalam mengeksekusi program dan administrasi kegiatan agar akuntabel dalam pemeriksaan auditor.
- b. **Adaptif**, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan serta beradaptasi dengan perubahan dan memiliki semangat untuk memaknai perubahan sebagai peluang yang lebih baik.
- c. **Solutif**, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah serta mencari *win-win solution*. Semangat sebagai *problem solver* dengan keyakinan semua masalah pasti ada jalan keluarnya dengan doa dan ikhtiar.
- d. **Inovatif**, yaitu memiliki ide, konsep, atau metode baru, termasuk memberikan *playground* kepada penemu (*inventor*) anak bangsa untuk berkontribusi memberikan teknologi baru di Kampus PUPR.
- e. **Kreatif**, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan.

Kementerian PUPR tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya kerja kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholders*. Kita percaya bahwa keberhasilan ditentukan oleh *superteam* bukan *superman*. Lebih lanjut ASIK dimaknai sebagai Aku Siap Kolaborasi!!!

Safety First!!

Dalam pemeliharaan bangunan dan gedung di Kampus PUPR, adanya berbagai risiko kecelakaan kerja menjadi perhatian utama. Risiko tersebut melibatkan pekerjaan di ketinggian, penanganan kelistrikan, hingga membersihkan *ground water* tank dengan kedalaman tertentu. Untuk memastikan keselamatan kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR telah melengkapi alat-alat keselamatan kerja seperti rompi (*safety vest*), topi (*safety cap*), dan sepatu (*safety shoes*) sesuai dengan standar desain yang ditetapkan.

Rompi bukan sekadar simbol 'gagah-gagahan', melainkan juga menandakan kesiapan untuk menjalankan tugas yang terkait dengan fasilitas, menciptakan keterikatan emosional yang dapat memotivasi untuk memberikan pelayanan dengan kebanggaan. Pentingnya penggunaan alat keselamatan ini tidak hanya sebagai representasi layanan yang mudah diakses, melainkan juga sebagai wujud komitmen internal. Komitmen ini tidak hanya berfokus pada perlindungan jasmani, tetapi juga mencakup aspek perilaku, sikap, tutur kata, dan tindakan (*code of conduct*) yang diatur dalam suatu kode etik.

Concrete-Pro

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah anggaran yang terbatas. Namun, ini menjadi peluang untuk merancang konsep dan strategi inovatif. Perlu metodologi prioritas dengan kreatifitas dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan. Meskipun permintaan terus meningkat, dengan fokus pada prioritas, tantangan ini dapat dihadapi dengan keyakinan dan meningkatkan efisiensi. Prioritasi tersebut dikenal dengan istilah *Concrete-Pro* (*Concept – Criteria – Program*). Istilah ini digunakan untuk memudahkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan selain membuat daftar panjang (*longlist*) yang akan dijadikan acuan penganggaran.

”

Dengan kawasan kerja yang nyaman akan mendukung kualitas kerja. Apa yang sudah dibangun harus dipelihara dan dijaga kebersihannya.

M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

”

Concept (CONcrete-pro)

Merupakan konsep penataan Kampus PUPR secara umum yang terdiri dari :

- a. Nyaman
Kenyamanan dipenuhi dengan memberikan desain yang mempertimbangkan skema warna, bentuk, kelengkapan fasilitas, dan tata informasi serta kelengkapan fasilitas difabel.
- b. Menstimulasi Kreatifitas Kerja
Diwujudkan dalam bentuk optimalisasi ruang terbuka sebagai berikut.
 - Ruang untuk beristirahat di luar ruang.
 - Akses penghubung antarbangunan.
 - Objek visual yang dapat dinikmati dari dalam ruang agar menstimulasi kreatifitas kerja.
- c. Ramah Lingkungan
Dalam pengelolaan Kampus PUPR memenuhi kaidah berikut.
 - Mempertimbangkan *rain water harvesting*, *recycling*, dan *reuse*.
 - Mempertimbangkan kesinambungan siklus alami.

- Mempertimbangkan pembentukan iklim mikro setempat.
- Mempertimbangkan sistem hemat energi.

Criteria

Kriteria disusun sebagai ukuran dasar penilaian atau penetapan suatu kegiatan. 5 (lima) kriteria tersebut, yaitu:

- a. *Zero Negative Space*
Berfokus pada konsep "Menuju Ruang Positif," tujuan pemeliharaan di Kampus PUPR melibatkan identifikasi dan meminimalkan area yang tidak produktif, non-fungsional, dan gelap di dalam kampus, serta mengubahnya menjadi ruang yang fungsional dan menyenangkan.
- b. *(Bring) Happiness Everywhere*
Parameter utama dalam giat pemeliharaan bangunan dan lingkungan di Kementerian PUPR melalui paradigma *Quality Working Life* (QWL), penekanannya adalah menjaga lingkungan kerja yang kondusif di Kampus PUPR, mendorong keseimbangan antara



Ruang yang Semula "Idle" yang Dikembangkan Menjadi Taman Cantik dengan Identitas Iprove



Taman Dan Sculpture I Love Pupr, Berada Pada Area yang Menghadirkan Konektivitas Visual Antara Bangunan Gedung. Sekaligus Sebagai Sarana Interaksi, Pameran dan Jaringan Aspirasi Partisipatory Planning Kampus Puprlprove



Penguatan Logo Identitas PUPR di Taman

pekerjaan dan kehidupan pribadi. Upaya-upaya dilakukan untuk mengubah kampus menjadi pusat rekreasi bagi karyawan dan keluarga mereka selama akhir pekan, mendorong kesinambungan kehidupan kerja yang harmonis

c. *Building Performance*

Memprioritaskan kinerja bangunan, Kampus PUPR bertujuan untuk memposisikan semua aspek strukturnya menjadi ruang 'depan' tanpa ruang 'belakang'. Pendekatan ini dipamerkan dalam kompetisi nasional dan internasional, dengan Gedung G memenangkan 2nd *Runner Up Winner* dalam '*ASEAN Energy Award 2023*', yang menandainya sebagai satu-satunya gedung pemerintah di ASEAN yang masuk dalam lima besar pemenang.

d. *Connectivity Outer Zone*

Kemudahan akses dan pencapaian menuju Kampus PUPR juga menjadi concern utama. Bagaimana pegawai mengakses kendaraan umum (bus, MRT, ojek online) maupun kendaraan pribadi menjadi atensi. Tentunya kolaborasi bersama Pemerintah

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah dilakukan, sebagai contoh trotoar di Jalan Patimura sudah lebih layak dan selanjutnya trotoar dari Stasiun MRT ASEAN atau terminal busway Al Azhar yang saat ini kondisinya masih tidak ideal dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif bersama pihak Pemprov DKI Jakarta.

e. *Empowering Axial-Sub Axial*

Kampus PUPR mempunyai sumbu utama, yaitu Taman Gedung Utama hingga *stoomwals*, serta beberapa sumbu pendukung yang menghubungkan antarbangunan. Sumbu-sumbu inilah yang menjadi fokus dan lokus dalam pemeliharaan utama sarana dan prasarana lingkungan.

Arahan program tersebut akan menentukan kegiatan yang menjadi prioritas sekaligus sebagai justifikasi teknis. Kegiatan-kegiatan prioritas melampaui proses Konsep – Kriteria – Program, agar fungsi pemeliharaan bangunan dan lingkungan menjadi lebih jelas dan terarah.



Aktivitas Makan Siang Menteri PUPR Beserta Pegawai di Taman Utama Kampus PUPR



Kunjungan Komunitas Sebumi, Mengenal Lebih Jauh Tentang Kampus PUPR



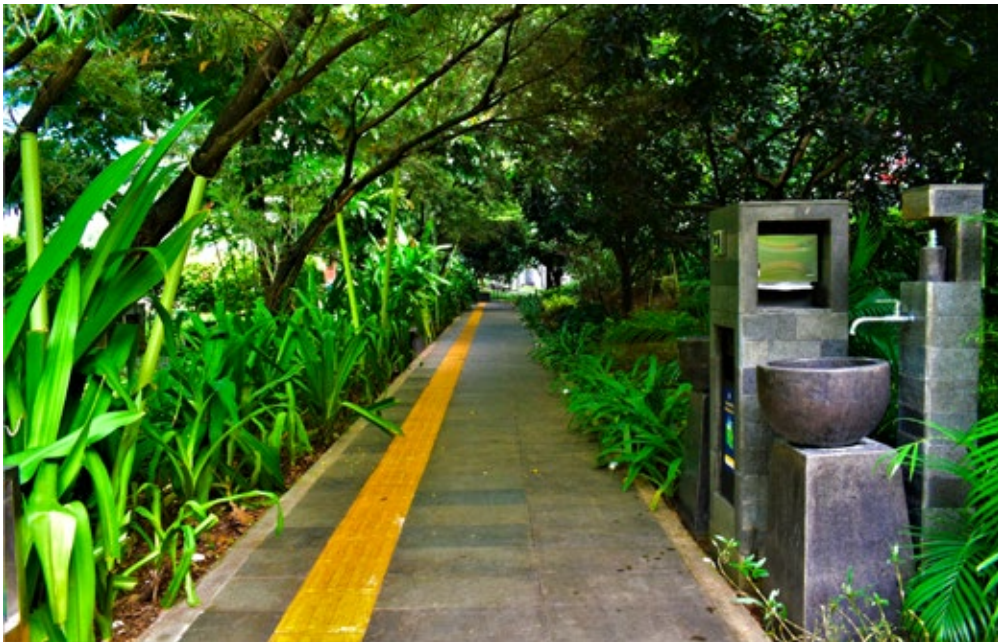
Gedung Utama dan Gedung G Dibalik Rimbunnya Pepohonan



*Pedestrian dan Jalur Sepeda Yang
Terhubung dengan Jalur di Luar Area
Kampus Pupr*



Stoomwals yang Ikonik



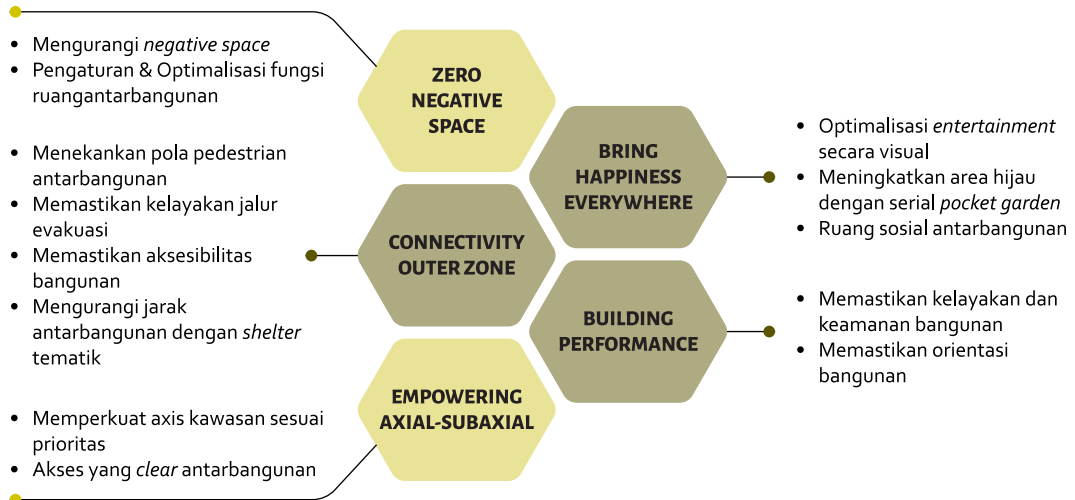
Jalur Pedestrian Penghubung antar Elemen Ruang dan Bangunan



Jalur Penghubung Antar Elemen Ruang dan Bangunan



Lansekap Kampus PUPR yang Tertata Rapih



Jenis-Jenis Satwa yang Dipelihara di Kampus PUPR

- f. Capaian Produk Regulasi
- Produk pengaturan diperlukan untuk mengatur konsensus bersama terutama dalam hal pemeliharaan bangunan gedung, gerakan hemat energi, manajemen keselamatan kebakaran gedung hingga kepedulian terhadap sampah. Berikut ini produk pengaturan selama 10 tahun terakhir.
- Surat Edaran Menteri PU Nomor 01/SE/M/2014 tentang Pemanfaatan Bangunan Gedung Kantor di Kementerian Pekerjaan Umum
 - Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 935/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Kementerian PUPR



Fasilitas Tempat Beristirahat yang Terdapat di Taman Kampus PUPR



Sudut-Sudut Taman Kampus PUPR yang Ikonik

g. Capaian Terobosan: *Breakthrough*

- *Fun Outdoor Meeting*

Hal ini merupakan konsep baru rapat di luar ruangan. Spot *outdoor* di Kampus PUPR didesain dengan konsep *social space* yang memungkinkan pegawai PUPR berinteraksi hingga rapat di luar. Diharapkan konsep rapat yang *chill* seperti ini dapat menstimulasi kreativitas dalam bekerja.

- Air Siap Minum Berbasis Embun Harmag

Teknologi ini merupakan karya anak bangsa dengan paten internasional di beberapa negara besar. Mesin berlabel Harmag ini dapat mengubah embun melalui proses kondensasi menjadi air siap minum. Di Kampus PUPR telah terpasang 1 (satu) unit air siap minum berbasis embun dengan memanfaatkan AHU dari mesin pendingin gedung G lantai 8 dan 2 (unit) mesin untuk menyaring kelembapan udara di area *outdoor* menjadi air siap minum. Atas

petunjuk Menteri PUPR, beberapa mesin tersebut juga telah ekspansi ke IKN dan juga Politeknik PUPR Semarang.

- Festival Peduli Sampah

Kegiatan ini secara masif mengajak seluruh warga Kampus PUPR untuk peduli terhadap sampah. Rangkaian kegiatan ini berwujud kompetisi nasabah Bank Sampah, dimana warga Kampus PUPR berlomba untuk menabung sampah, hingga perhelatan PUPR Fashion Week yang merupakan peragaan busana dari bahan-bahan daur ulang.

- Supervisi dan Replikasi Taman Kampus PUPR di Poltek PUPR

Kegiatan pendampingan dengan konsep replikasi taman Kampus PUPR dilakukan di Poltek PUPR Semarang sesuai arahan Menteri PUPR. Kegiatan ini cukup mendapatkan apresiasi hingga *outdoor space* Kampus Poltek PUPR Semarang.



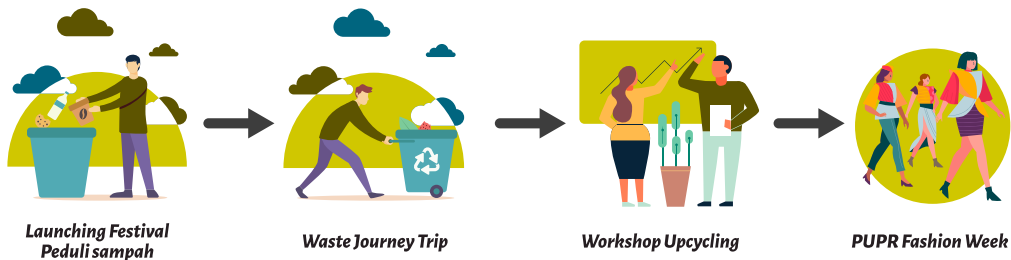
RTH Kampus PUPR yang juga Berfungsi sebagai Fasilitas untuk Menerima Tamu dan Mitra Kerja



RTH Kampus PUPR Kerap menjadi Ruang untuk Kegiatan Rapat dengan Mitra Kerja



Unit Air Siap Minum Berbasis Embun dengan Memanfaatkan AHU



Berbagai Aktifitas Pegawai Kementerian PUPR di RTH Kampus PUPR

Menjaga Legacy

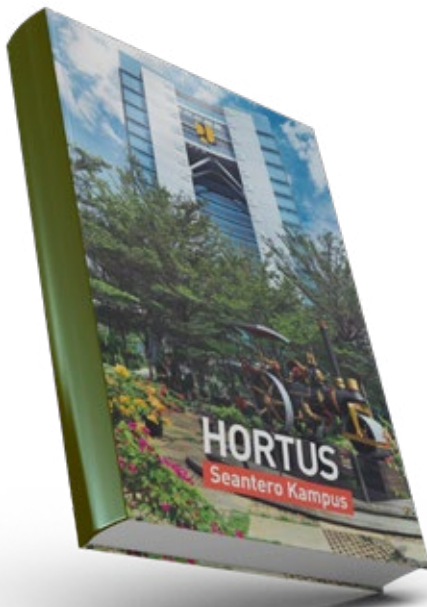
Kampus Hijau PUPR yang berada di Jalan Patimura 20 (atau lebih populer disebut P20) menyimpan sejuta kenangan dan sejarah yang mengiringi perjalanan infrastruktur di Indonesia. Di sinilah rumah para *engineer* hebat, administrator andal serta *auditor* yang kompeten. Sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi 'membangun' di seluruh pelosok negeri. Bagaimana mungkin

membangun infrastruktur hebat dan andal jika rumah kita sendiri tidak merepresentasikan stigma itu.

Untuk itulah, ditulis 2 (dua) buku yang di masa depan diharapkan menjadi *legacy* bagi rumah kita bersama, ketika saatnya harus berpisah dengan Kampus Hijau PUPR P20 menuju ke Ibukota Negara Nusantara kebanggaan kita semua.

Kedua buku tersebut adalah:

- Hortus Seantero Kampus
Buku ini adalah buku *glossary* koleksi vegetasi Kampus PUPR yang terdiri atas 105 jenis tanaman dan bekerjasama dengan Majalah Trubus.
- Kampus Hijau PUPR: Perkantoran Humanis Nan Ramah Lingkungan
Buku ini merupakan tulisan populer yang menjadi *guidance*, cita-cita serta eksplorasi ide dan gagasan dalam mewujudkan Kampus Hijau PUPR.



”

Pemanfaatan tanaman-tanaman ini tidak serta merta memenuhi lahan kosong. Keberadaan tanaman menjadi aspek penting yang tidak terlupakan sebagai ruang terbuka hijau dan memberikan nilai estetis untuk melengkapi kumpulan bangunan di kampus ini.

*M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR*

”

Sudahkah Menjadi Asik?

Ketika diksi telah disepakati, *safety* telah terpenuhi, konsepsi telah membumi, pencapaian tidak hanya sekedar narasi dan *legacy* menjadi barang bukti, terbersit pertanyaan sudahkah menjadi asik? KPI termudah adalah, tidak ada komentar dari

pimpinan untuk pekerjaan dan hasil karya yang bermanfaat. Itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, ketika beberapa orang sudah menilai ASIK, maka cita-cita besar untuk membuat ASIK Balai-Balai Kementerian PUPR yang ada di provinsi menjadi sebuah keniscayaan.

Smart Satpam

Kehadiran Satpam diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kampus Kementerian PUPR. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya pada satuan pengamanan yang diatur dalam undang-undang.

Satpam PUPR, menerapkan “*Smart*” Satpam, yaitu Sigap, Menarik, Antusias, Ramah dan Tegas.

- 1) Sigap: Posisi sigap dan siap menjalankan tugas.
- 2) Menarik: Tampil sopan, rapi dan bersih.
- 3) Antusias: Selalu antusias menanggapi pertanyaan.

- 4) Ramah: Berlaku ramah dengan memberikan senyum.
- 5) Tegas: Bersikap tegas dalam menjalankan aturan dan menyampaikannya dengan baik.

Smart Satpam didukung oleh personil yang memadai. Satpam di Kantor Pusat Kementerian PUPR pada Januari 2023 sebanyak 224 orang, dibagi dalam 3 regu, di bawah komando Komandan Peleton dan Komandan Regu. Dalam rangka konsolidasi dan evaluasi, pada saat hari kerja, diadakan apel pagi pukul 07.30 WIB serta dilanjutkan dengan timbang terima dengan regu yang berjaga sebelumnya.



Kegiatan Pelatihan dan Kesiapan Satpam untuk Meningkatkan Kemampuan dalam Pengamanan di Kampus PUPR

Smart Card

Untuk meningkatkan keamanan kartu tanda pengenal pegawai Kementerian PUPR pun diganti dengan desain baru. Terwujudnya desain baru kartu tanda pengenal adalah dari hasil lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-77 Tahun 2022 Republik Indonesia, yang diikuti oleh seluruh pegawai PUPR.

Setelah dilakukan seleksi ketat, yang melibatkan juri eksternal Arnold Sandjaya dari *Student Creativity Development Specialist*, Binus University, dan beberapa pejabat eselon I Kementerian PUPR, terpilih 3 (tiga) desain untuk disampaikan kepada Menteri PUPR yang secara langsung memilih pemenangnya. Pemenang karya desain kartu tanda pengenal atas nama Amanda Larissa dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Untuk mempercepat proses pencetakan, para pegawai PUPR di seluruh Indonesia melakukan foto sekaligus pencetakan kartu di masing-masing koordinator balai yang ada di provinsi. Ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi kerja Kementerian PUPR hingga detail yang sederhana.

Menjaga Aset, Merawat Fasilitas

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama untuk menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing, serta menjadi kesempatan besar jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul. SDM yang unggul tidak terlepas dari generasi yang sehat, kuat, cerdas dan berakhlak mulia.

Penyediaan Layanan Kesehatan di lingkungan kerja tidak hanya untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi membuat seseorang lebih produktif dan berperilaku sehat. Selain itu juga mampu meningkatkan mutu kerja dan memberikan kontribusi positif bagi instansi/ lembaga maupun masyarakat secara luas. Paradigma sehat harus ditanamkan bagi seluruh pegawai.

Fasilitas Layanan Kesehatan Pegawai

Fasilitas Kesehatan Pegawai merupakan bentuk upaya peningkatan kualitas SDM Kementerian PUPR. Layanan Kesehatan menunjang produktifitas pegawai dengan menjamin kesehatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan output yang dihasilkan.

Layanan Utama Klinik PUPR

Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan fasilitas, layanan dan kenyamanan Fasilitas Layanan Kesehatan yang ada di kampus PUPR, di antaranya dengan peningkatan kapasitas layanan klinik menjadi Klinik Utama di tahun 2022 dan melakukan renovasi pada klinik yang menjamin kenyamanan dan keamanan pegawai yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan.



Peningkatan Fasilitas Klinik Utama Kementerian PUPR untuk Memberikan Layanan Kesehatan

Taman Pengasuhan Anak

Layanan Taman Pengasuhan Anak merupakan fasilitas yang disediakan oleh Biro Umum dalam mendukung pegawai, terutama pegawai wanita yang memiliki anak dalam bekerja. Layanan ini merupakan salah satu program yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR.

Program ini menyediakan fasilitas bagi ibu pekerja untuk membawa anaknya ketika bekerja, namun tetap dapat memenuhi hak anak. Fasilitas yang tersedia berupa tempat yang nyaman dengan sarana edukasi dan bermain yang aman bagi anak usia prasekolah. Dilengkapi juga dengan fasilitas ibu menyusui dan tempat tidur anak serta kamar mandi ramah anak, dan makanan bergizi bagi anak.

Kegiatan Anti Narkoba (Pencegahan Penggunaan Zat Adiktif di Tempat Kerja)

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis *extraordinary crime* yang terorganisir lintas Negara/Internasional

dan dapat menjadi ancaman serius karena merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kegiatan yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kementerian PUPR melibatkan pendekatan dari berbagai sisi. Pendidikan anti-narkoba secara rutin melalui lokakarya dan seminar sangat penting, dengan menekankan dampak negatif narkoba dan konsekuensi hukumnya. Kebijakan organisasi yang jelas, termasuk konsekuensi atas pelanggaran, harus diterapkan, bersama dengan pemeriksaan narkoba secara berkala.

Kegiatan ini melibatkan dan memberdayakan generasi muda serta kolaborasi dengan organisasi eksternal untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan. Pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan memastikan keberhasilan program. Promosi gaya hidup sehat dan kegiatan rekreasi yang positif berkontribusi pada lingkungan kerja yang bebas narkoba dan produktif, sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yang bebas narkoba.



Ibu Bekerja Anak Sejahtera. Layanan Taman Pengasuhan Anak ditujukan untuk Mendukung Produktivitas Ibu Bekerja



Kegiatan Anti Narkoba

Pengendalian COVID (Tetap Berkarya Walau Wabah Mendera)

Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia beberapa waktu lalu memberikan pelajaran kepada kita betapa berharganya kesehatan. Dunia menjadi lumpuh dan kesehatan merupakan salah satu modal pembangunan yang harus dijaga.

Kementerian PUPR berusaha tetap produktif, bersama-sama menanggulangi wabah COVID-19 dan meminimalisasi akibat yang ditimbulkan. Dengan melakukan program vaksinasi, menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pegawai yang terdampak, serta melakukan pemantauan kesehatan pegawai dan keluarganya.



Vaksinasi COVID-19 Dosis Lengkap Diselenggarakan secara Massal dan Berkelanjutan bagi Seluruh Pejabat dan Pegawai Kementerian PUPR dan Keluarganya



Penyediaan Fasilitas Isomer bagi Pegawai Kementerian PUPR Dan Keluarganya yang Terkena COVID-19

Medical Check-Up (Kesehatan Terjaga PUPR Berjaya)

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Program *Medical Check Up* oleh Kementerian PUPR dilakukan setiap tahun untuk memantau kondisi kesehatan pegawai Kementerian PUPR dan mendeteksi kelainan yang mungkin ada sejak dini, sehingga bisa lebih cepat diatasi dan tidak berkembang menjadi penyakit yang serius. Karena kesibukannya, pegawai

terkadang lalai akan kondisi kesehatannya sehingga berakibat buruk dan memengaruhi kinerja pegawai.

Program ini berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian PUPR dan kapasitas pelayanan MCU bagi 1.000 peserta setiap tahunnya. Jenis pelayanan yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi, pemeriksaan laboratorium, EKG, dan radiologi.



Kegiatan MCU dilaksanakan sebagai Usaha Preventif dan Mendeteksi Dini Kondisi Kesehatan Pegawai. diharapkan dengan Kegiatan ini Kesehatan Pegawai Terjaga dan Terhindar dari Penyakit Serius.

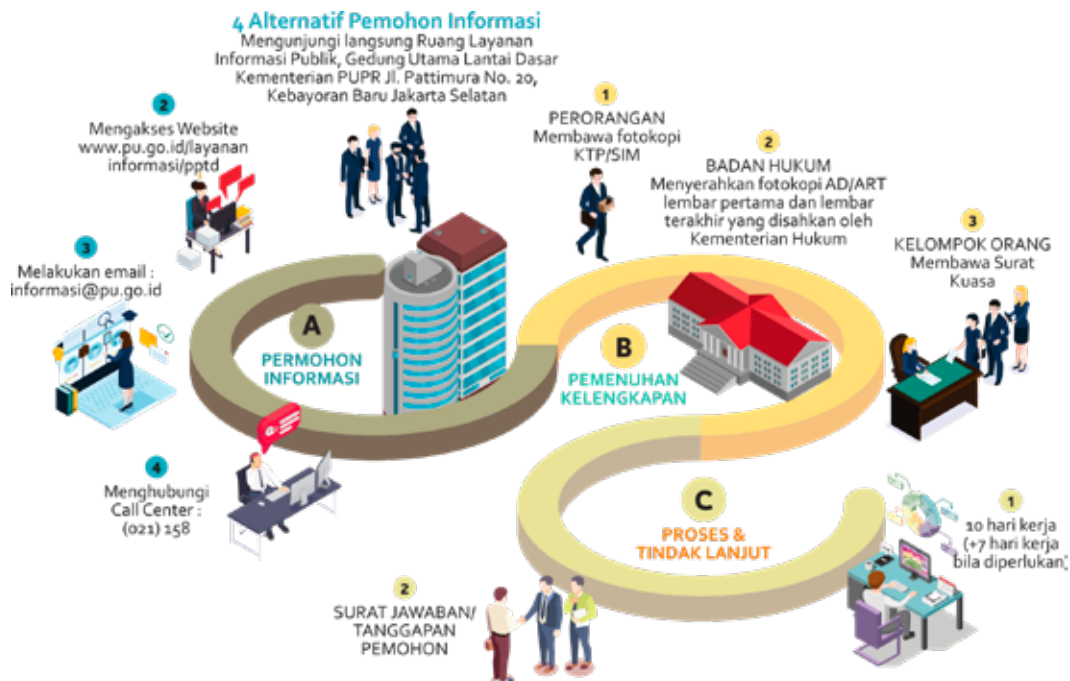
KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Kementerian PUPR bukan hanya bekerja membangun infrastruktur. Kementerian ini juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik prima. Pelayanan publik yang berkualitas dianggap sebagai bukti kehadiran negara untuk rakyat. Masyarakat yang puas dengan pelayanan publik menunjukkan keberhasilan pemerintah dan menciptakan hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, Kementerian PUPR menghadapi transformasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan

digitalisasi. Melalui portal resmi, masyarakat dapat mengakses layanan publik terpadu, menyampaikan pengaduan, dan memanfaatkan perpustakaan online, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.

Kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan Kementerian PUPR menggunakan big data untuk memahami dan mengidentifikasi masalah, serta merencanakan solusinya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan Kementerian PUPR selama hampir satu dekade dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi ini.





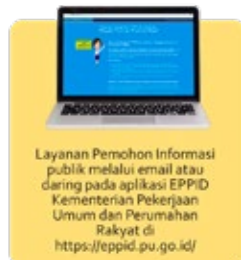
Berkat kehadiran sistem informasi berteknologi, Kementerian PUPR berhasil mempercepat proses permintaan data dan

perizinan terkait proyek-proyek infrastruktur dan perumahan. Alhasil waktu pelaksanaan proyek bisa lebih cepat dan efisien.

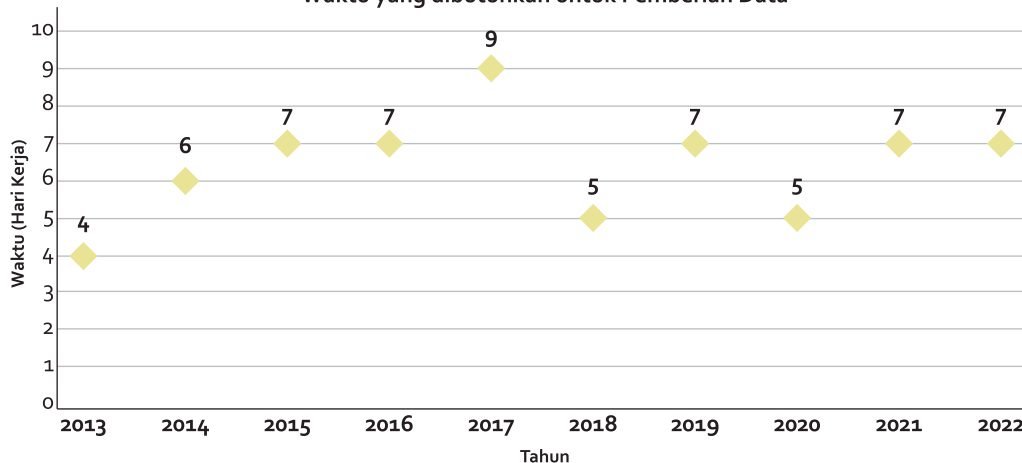
ALUR PROSES PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK & PENGADUAN SECARA DARING



Laman Layanan Daring Permohonan Informasi Publik & Pengaduan



Waktu yang dibutuhkan untuk Pemberian Data



Pengembangan sistem informasi di Kementerian PUPR merupakan langkah progresif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan

efisiensi pelayanan publik. Hal ini terbukti dengan berhasilnya memangkas birokrasi dan mengoptimalkan sumber daya manusia.

Korpri sebagai Wadah Perekat

Dibentuk pada tahun 1971 melalui Keputusan Presiden, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dilandasi pertimbangan perlu adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa, dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dalam mengisi kemerdekaan sebagai alat untuk menyelenggarakan tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KORPRI berfungsi sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota, pembina jiwa korps (korsa), serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara.

KORPRI Kementerian PUPR dibentuk melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 44/PRT/M/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR. Secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian.

Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR masa bakti 2023-2028 dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-15/KU/III/2023 dan untuk memudahkan komunikasi antar-Unit Organisasi ditetapkan Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR Masa Bakti 2023-2028 melalui Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-15/KU/III/2023 tertanggal 5 Maret 2023.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional/PORNAS

Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. Di tahun 2023, PORNAS KORPRI XVI diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Diikuti oleh 31 Kementerian, 32 Lembaga, 38 Provinsi seluruh Indonesia. Cabang olah raga yang dipertandingkan meliputi futsal,



Partisipasi Kementerian PUPR dalam Pekan Olahraga Nasional/PORNAS XVI 2023 di Provinsi Jawa Tengah

gateball, senam KORPRI, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, bola voli, balap sepeda, dan catur.

Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah dengan melakukan pembenahan gedung-gedung olahraga/*venue* serta kelengkapan sarana prasarana pendukung lainnya.

Tak kalah penting, pada tanggal 15-17 Mei 2023 telah dilakukan *Chef de Mission* (CdM) ke-2 di Hotel Ibis Semarang dengan mengundang seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang akan mengikuti pertandingan.

PORNAS KORPRI bukan hanya soal memperebutkan gelar juara, tetapi tentang silaturahmi dan persaudaraan. Peserta PORNAS KORPRI harus menjaga sportivitas



Prosesi Pelepasan Kontingen Kementerian PUPR dan Pembukaan PORNAS KORPRI XVI 2023 di Provinsi Jawa Tengah

yang terkait dengan kejujuran. Inilah yang harus diterapkan, tak hanya selama pertandingan berlangsung tetapi berlanjut saat menjalankan tugas sehari-hari.

Pada pembukaan PORNAS XVI KORPRI tahun 2023 di Kota Semarang, Jawa Tengah yang diselenggarakan hari Jumat, 14 Juli 2023, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono turut hadir bersama Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arid Fakrullah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pada PORNAS KORPRI 2023, Kementerian PUPR mengirim sebanyak 135 atlet untuk 9 cabang olah raga yakni futsal, gateball, senam KORPRI, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, bola voli, balap sepeda, dan catur. Selain itu juga dikirimkan 38 orang *official*, pelatih, dan tim kesehatan. Seluruh atlet, *official*, pelatih, dan tim kesehatan mengikuti Pelepasan Kontingen Kementerian PUPR yang dihelat di Lapangan *Gateball* Kampus Pattimura oleh Bapak Sekretariat Jenderal pada 11 Juli 2023.

Sebelumnya, Menteri PUPR juga memberikan semangat secara langsung kepada kontingen ASN Kementerian PUPR yang akan bertanding dalam PORNAS XVI KORPRI tahun 2023 di Auditorium Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang.

Menteri PUPR meminta kepada seluruh atlet Kementerian PUPR agar memiliki kepercayaan diri dan mempertahankan semangat daya juang yang tinggi untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Menteri Basuki meminta agar kontingen PUPR yang datang bukan hanya untuk kuliner, tapi bertanding dengan semangat, sportif untuk menang, bukan untuk kalah. Alhasil, kontingen Kementerian PUPR mendapatkan medali perak dan perunggu di cabang olah raga catur dan medali perunggu di cabang bulutangkis.

Facilitasi Penyelenggaraan MTQ KORPRI

Kegiatan MTQ KORPRI diselenggarakan dua tahun sekali sebagai ajang penyejuk, perekat persatuan, dan forum silaturahmi yang mengandung nilai positif bagi anggota KORPRI. Selain itu juga sebagai media dakwah dan syiar agama Islam dalam membangun pondasi yang kokoh bagi Korpri untuk menciptakan ASN yang berakhlak dan berintegritas. Tujuannya untuk membumikan ajaran Al-Quran serta menegakkan syiar Islam agar memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa.

Kementerian PUPR turut serta berpartisipasi mengirimkan peserta untuk 8 cabang yang dilombakan yang diselenggarakan pada rangkaian kegiatan MTQ VI Korpri Tingkat Nasional tahun 2022 di Kota Padang, Sumatera Barat.



Penyelenggaraan MTQ KORPRI Tahun 2022

KEPEDULIAN SOSIAL DAN PELOPOR KEBERSAMAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Koperasi KORPRI PUPR Sejahtera

Koperasi Konsumen KORPRI PUPR didirikan atas amanah Surat Keputusan KUMHAM Nomor AHU-005972-AH.01.26 tanggal 13 Oktober 2020 dengan Akte Notaris Nomor 17 tanggal 13 Oktober 2020, serta terdaftar di Kementerian Koordinator dan UKM dengan Nomor resiter 3171060020407. Dalam AD/ART, namanya Koperasi KORPRI PUPR Sejahtera dan berkedudukan di Gedung Heritage Kementerian PUPR yang beralamat di Jl. Pattimura No.20, Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan peluang usaha bagi anggota meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan seluruh anggota KORPRI PUPR umumnya. Susunan Pengurus Koperasi PUPR Sejahtera terdiri atas pelindung yaitu Menteri PUPR, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan para Direktur Jenderal/Kepala Badan. Selain itu, dibentuk juga pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, bidang usaha, bidang perencanaan, sistem dan humas serta koordinator Unit Organisasi.

Koperasi KORPRI PUPR Sejahtera memiliki prinsip keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan manajemen koperasi dilakukan secara demokratis dan transparan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, pemberian imbalan jasa terbatas.



Rapat Anggota Koperasi KORPRI PUPR Sejahtera

Koperasi juga harus mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, sehingga hakikatnya menjadi motivasi bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan dan kekuatan diri sendiri untuk mencapai tujuan.

Bidang usaha yang dijalankan, yaitu penyediaan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan anggota (*costumer good*), kegiatan simpan pinjam, pengadaan dan penjualan barang-barang lain serta usaha lainnya. Usaha koperasi yang berjalan dari mulai tahun 2021-2023 ini adalah kerjasama dengan JNE, *foto copy*, dan toko dengan sistem konsinyasi/bagi hasil dan kerjasama lainnya.

Jumlah anggota koperasi ini dari tahun 2021-2022 sebanyak 415 orang, bertambah di tahun 2023 sebanyak 271 orang yang masih

dalam proses verifikasi. Anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik koperasi sekaligus pengguna jasa koperasi.

Untuk lebih mengembangkan usaha lainnya, koperasi membuka kesempatan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR menjadi anggota dengan syarat tertentu dan *login* KKPS dengan menggunakan akun *eHRM* melalui website resmi Koperasi Korpri PUPR Sejahtera ke koperasikorpri.pu.go.id.

Sentuhan KORPRI di Masa Pandemi "Covid"

Kementerian PUPR hadir memberikan sentuhan perhatian kepada seluruh pegawai yang berdampak Covid dengan memberikan dana yang terkumpul melalui Rekening KORPRI PUPR Peduli Covid, berupa:



Pemberian Bantuan Kemanusiaan dalam Kegiatan KORPRI PUPR Peduli

- Pemberian tali kasih kepada pegawai yang sakit dan meninggal karena Covid.
- Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat sekitar kantor yang terdampak Covid, yaitu pedagang kaki lima, tukang ojek, penyapu jalanan, dan lain-lainnya.
- Penyerahan sumbangan uang tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tim Kesehatan dan Pengelola Wisma Atlit yang dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit untuk Covid.
- Pembagian sembako untuk para penggali kubur, sopir ambulans di Jabodetabek oleh yang dilakukan serempak di seluruh Indonesia oleh Balai Besar/Balai masing-masing.
- KORPRI Peduli Bencana, mengumpulkan dana secara sukarela dari para anggota Korpri dan telah disalurkan ke masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur/NTT, Malang, dan Cianjur.

Donasi/Tali Asih Anggota

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti PU, Kementerian PUPR membuka kesempatan berbagi melalui Donasi PUPR Peduli untuk pensiunan Insan PUPR yang disalurkan oleh Ikatan Pensiunan PU (IPPU). Selain itu,

untuk biaya pendidikan yang disalurkan oleh Yayasan Pendidikan PUTERA di bawah binaan Kementerian PUPR.

Penggalangan donasi pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai) yang berkedudukan di Jakarta dan sekitarnya dikoordinasikan oleh Sekretariat masing-masing Unit Organisasi.

Setiap donasi yang masuk dipantau melalui tautan di Website. Sedangkan penggalangan donasi pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai) yang berkedudukan di luar Jakarta dan sekitarnya dikoordinasikan oleh Koordinator Komunikasi Balai Provinsi di masing-masing wilayah kerjanya.

Penyaluran donasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, sedangkan di luar Jabodetabek oleh Koordinator Komunikasi Balai Provinsi didukung para Narahubung Korpri Kementerian PUPR di masing-masing daerah. Penyaluran Donasi PUPR Peduli dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke email korpri@pu.go.id dan itjen@pu.go.id



Kegiatan Penyerahan Donasi dari Kementerian PUPR Dalam Rangka Hari Bhakti PU ke-77

MENGOPTIMALKAN FUNGSI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PENYALUR KEPENTINGAN ANGGOTA

Fasilitas Layanan Konseling: Curhat Sahabat KORPRI

ASN sebagai makhluk individu sekaligus sosial pasti mempunyai masalah yang dapat berdampak pada motivasi kerja. Untuk itu, diperlukan wadah untuk mengadu agar dapat diselesaikan dengan baik dan nyaman untuk pegawai. Kementerian PUPR melakukan fungsi ke dalam sebagai penampung, pengolah, dan penyalur keinginan serta pengayom bagi para anggota KORPRI PUPR beserta keluarganya, baik secara material maupun spiritual.

Kementerian PUPR membangun dan menyediakan layanan aduan dan konseling KORPRI dalam bentuk aplikasi untuk memudahkan ASN di seluruh penjuru tanah air agar mendapatkan layanan dan solusi tanpa harus datang ke kantor PUPR di Jakarta.



Untuk saat ini hotline yang tersedia untuk "Curhat Sahabat Korpri" ada di nomor 0811-2500-9000. Layanan ini akan dikembangkan dalam bentuk mobile aplikasi yang *responsive gadget* di tahun mendatang dalam 1 (satu) layanan atau "*one services*".

Pendampingan Bantuan Hukum Anggota

Kementerian PUPR menyediakan pendampingan bantuan hukum atas masalah yang dialami, baik masalah kedinasan maupun pribadi dan keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan konseling oleh tim internal bahkan oleh psikolog sebagai perlindungan kepada ASN yang membutuhkan. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui konseling dilakukan bersama-sama dengan Biro Hukum, jika sampai masuk ke ranah litigasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan bantuan hukum untuk anggota yang mempunyai masalah baik di ranah non-litigasi (mediasi atau konseling), maupun di ranah litigasi telah disiapkan oleh Kementerian PUPR. Pemberian bantuan dalam lingkup permasalahan hukum yang dialami ASN karena keterlibatannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pendampingan yang diberikan berupa nasehat, pertimbangan, pengertian, dan pengetahuan hukum.

Pembekalan Calon Purnatugas ASN PUPR

Pensiun atau purnatugas seringkali dianggap sebagai sebuah kenyataan yang tidak menyenangkan, sehingga menjelang masanya tiba sebagian orang sudah merasa cemas atau panik karena tidak tahu kehidupan seperti apa yang harus dihadapi kemudian hari. Ketakutan yang berlebihan atau *post power syndrome* dapat dialami oleh calon pensiunan.

Salah satu yang perlu ditekankan kepada calon pensiunan, yaitu masa pensiun bukanlah akhir dari segala-galanya, sehingga tidak melakukan aktifitas seperti sedia kala. Tetapi, masa pensiun membuka kehidupan baru dengan harapan dapat menciptakan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri serta lingkungan dan bisa membuat usaha dengan memanfaatkan pendapatan dan kemampuan yang diperoleh. Untuk itu, dibutuhkan bekal pengetahuan maupun keterampilan, termasuk pengetahuan berbagai tren usaha yang berkembang serta rencana pengelolaan keuangan yang baik.

Mengingat pentingnya makna nilai-nilai untuk menambah kualitas hidup para Pegawai Negeri Sipil/PNS menjelang masa pensiun, maka penting untuk menempatkan nilai spiritual dalam berbagai hal demi mencapai kebahagiaan dan kesiapan calon pensiunan seperti yang diharapkan. Selain itu, harus diyakini bahwa pensiun hanyalah perpindahan peran saja. Peran sesungguhnya adalah sebagai hamba dan khalifah-Nya. Untuk itu, kita harus mengubah mindset menjadi: "Walaupun pensiun, namun terus tetap berkarya".

PNS perlu mempersiapkan dirinya untuk bisa menjalani masa pensiun dengan tenang dan nyaman. Persiapan pensiun harus dilakukan sejak dini, untuk membantu menyiapkan diri baik dari sisi mental maupun finansial. Persiapan mental sebelum pensiun harus dimatangkan agar tidak memberikan dampak buruk secara psikologis.

Hal yang tidak boleh dilupakan dalam mempersiapkan pensiun adalah harus menjaga kesehatan agar tetap prima dengan berolahraga dan melakukan tes kesehatan secara rutin. Kehidupan ini hanyalah sementara, oleh karena itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan persiapan pensiun lebih dini diharapkan dapat menjalani masa pensiun secara asik tanpa panik.

Di tahun 2023, Kementerian PUPR telah menyelenggarakan pembekalan kepada calon pensiunan di lingkungan Kementerian PUPR sebanyak 2 (dua) angkatan, yakni tanggal 7-9 Juni 2023 di Bandung dan tanggal 27-29 Juli 2023 di Yogyakarta dengan mengundang calon pensiunan untuk periode tahun 2022 dan tahun 2023. Narasumber yang diundang adalah SAMPU Bidang Antar-Lembaga, IPPU, Praktisi, TASPEN, dan kontribusi Bank di lingkungan Kementerian PUPR.

Pembekalan yang diberikan kepada calon pensiunan PUPR di Bandung meliputi kisah pengalaman dalam masa pensiun, proses mengajukan pencairan dana Taspen, kiat mengatur keuangan, belajar sekaligus praktik menjadi pengusaha toko online, memotivasi dengan kiat memasuki masa pensiun dengan bahagia, kesiapan mental, fisik dan finansial.

Di Bandung, para calon pensiunan mengunjungi UMKM yang berhasil melakukan budidaya anggur dan pembuatan ubi cilembu di Desa Cilembu Sumedang, berkunjung ke Waduk Jatigede di Sumedang yang dibangun oleh BBWS Citanduy, Direktorat Sumber Daya Air.

Di Yogyakarta, para calon pensiunan mengunjungi UMKM pembuatan tas dan sepatu kulit di Prambanan, pembuatan keripik dari buah papaya sekaligus mampir ke Candi Plaosan, dan melihat Jembatan Gantung di Kampung Girsang, Klaten yang dibangun BBPJJN Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, Direktorat Bina Marga. Ini membuat para calon pensiunan merasa bangga pernah menjadi bagian keluarga PUPR.

Hasil evaluasi pembekalan menunjukkan bahwa pembekalan yang dibutuhkan antara lain:

- Seputar pengaruh psikologi pada jiwa setelah pensiun;
- Cara berbisnis/berusaha dari hobi dan kesenangan semasa pensiun;
- Praktik berjualan online;
- Komunikasi yang efektif dengan pengetahuan yang kreatif;
- Kemampuan mengelola perubahan;
- Motivasi untuk mengubah paradigma baru untuk kiat mengembangkan bakat atau hobi yang positif dan bermanfaat bagi orang lain;
- Kunjungan ke lokasi kegiatan yang cocok untuk pensiunan dengan bahasan kasus di lapangan.



Pembekalan Persiapan Calon Pensiunan PNS Kementerian PUPR

MEMBANGUN KARAKTER YANG BERINOVASI, BERMORAL TINGGI, DAN BERJIWA SENI

HUT KORPRI dan Berbagi Pengalaman bagi Generasi Muda PUPR.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI, diselenggarakan sosialisasi peningkatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk pembinaan kepada ASN agar bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna.

Kementerian PUPR ikut serta dalam penyelenggaraan pembinaan KORPRI setiap tahun dengan tema yang beragam. Tahun 2021 mengangkat tema "ASN Bersatu, Korpri Tanggung, Indonesia Tumbuh". Tema tersebut menyimpan harapan peningkatan wawasan kebangsaan untuk diimplementasikan dalam melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa.

Bersatunya seluruh ASN diharapkan dapat menjadi kekuatan dan pemikiran yang dahsyat demi menjaga NKRI.

Pada tahun 2022 tema yang dipilih adalah "KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri." Tema ini bermakna harapan agar anggota KORPRI tetap bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa dan prasyarat pembangunan nasional.

Di tahun 2023, tema yang diusung adalah "ASN sebagai Pilar Utama Pemersatu Bangsa." Tema tersebut dilatarbelakangi oleh pencapaian Negara Indonesia yang dipandang baik oleh dunia. Pada tanggal 28 November 2023 akan dilaksanakan Upacara Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI PUPR sekaligus merayakan peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI yang jatuh pada tanggal 29 November.



Kegiatan Tahunan Dalam Rangka Pembinaan KORPRI



Upacara Memperingati Hari Bakti PUPR

Upacara Hari Besar

Momentum hari-hari besar diperingati dengan upacara di halaman Kampus PUPR dengan inspektur upacara para Pejabat Tinggi Madya secara bergantian. Dalam 1 (satu) tahun rutin diadakan upacara hari besar untuk menumbuhkan semangat dan rasa nasionalisme insan PUPR agar terus berkinerja tinggi dan lebih produktif, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Hari KORPRI tanggal 29 November diperingati untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para anggota dan dapat diimplementasikan dalam melaksanakan pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa.

Tak kalah meriah, Hari Bakti PU setiap tanggal 3 Desember di halaman Kampus PUPR, di halaman Gedung Sate Bandung, baik di Pusat maupun Daerah, diperingati secara rutin dengan berbagai perayaan seperti tali asih, penghargaan, lomba (PUPR Idol, berbagai olah raga, karya ilmiah, donor darah, pesta rakyat, dan lain-lain). Makna penting dari peringatan ini adalah mengenang jasa 7 (tujuh) orang pemuda yang gugur dalam upaya mempertahankan gedung Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang sekarang sering disebut Gedung Sate Bandung.

iProVe Sebagai Penguatan Karakter

Dalam era ketidakpastian yang kompleks atau dikenal sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PUPR dihadapkan pada tantangan untuk dapat merespons perubahan dengan adaptabilitas dan tetap menjalankan tugas secara profesional. Munculnya kondisi tersebut menuntut perubahan kualitas perilaku, yang tercermin dalam nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Proses internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK di Kementerian PUPR tidak hanya bersifat statis, melainkan berlangsung secara berkelanjutan. Internalisasi tersebut melibatkan penguatan konsep **iProVe (Integritas, Profesional, Orientasi Visi, dan Etika Akhlakul Karimah)** sebagai bagian dari operasionalisasi nilai dasar. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selalu adaptif terhadap perubahan budaya kerja turut mendukung proses internalisasi ini.

Sosialisasi nilai dasar juga menjadi fokus dalam upaya membangun penerimaan dan keterlibatan seluruh individu di lingkungan Kementerian PUPR. Pemahaman mengenai makna pekerjaan,

sikap terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, waktu, alat kerja, etika kerja, dan perilaku dalam mengambil keputusan menjadi aspek-aspek yang diharapkan tercermin dalam aktualisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Sebagai garda terdepan dalam pengembangan kompetensi ASN di bidang PUPR, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR memainkan peran utama dalam proses internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK. BPSDM menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, didukung oleh modul yang disiapkan secara cermat guna mendukung pemahaman dan implementasi nilai-nilai tersebut.



Prestasi Itu Milik Bersama

Selama satu dekade terakhir, Kementerian PUPR telah meraih sejumlah prestasi dan penghargaan yang mengukuhkan posisinya sebagai pelaku utama dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. Prestasi-prestasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan proyek-proyek skala besar, inovasi dalam desain dan teknologi konstruksi, serta kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Kementerian PUPR tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target pembangunan nasional, tetapi juga menunjukkan standar tinggi dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagai lembaga yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal, pencapaian ini menjadi cerminan dari dedikasi Kementerian PUPR dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. Dengan prestasi dan penghargaan yang diraih selama satu dekade terakhir, Kementerian PUPR terus bergerak maju untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Pemberian layanan publik yang memuaskan masyarakat, tercermin dari sejumlah penghargaan yang diterima oleh Kementerian PUPR atas kualitas pelayanannya.

1. Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 untuk Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa—Kementerian PUPR: Solusi Nyata Penanganan Covid-19 di Indonesia (2020).

2. Penghargaan TOP 45 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK untuk Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian PUPR (2019).
3. Penghargaan Gold Winner Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Sub-Kategori Kementerian, Anugerah Humas Indonesia 2019.
4. Penghargaan Gold Winner Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Sub-Kategori Kementerian, Anugerah Humas Indonesia 2019.
5. Penghargaan TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK), Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 untuk Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian PUPR.
6. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Indonesia (2018).
7. Penghargaan atas Peran Pemanfaatan Informasi Publik dalam Pelayanan Arus Mudik 2018 dengan Kategori Responsif (2018).

Pola komunikasi yang terus-menerus selama dekade tersebut telah meningkatkan citra dan reputasi Kementerian PUPR di mata publik, diakui dengan keberhasilan mendapatkan 56 penghargaan dari berbagai organisasi eksternal, seperti Anugerah Humas Indonesia dan Public Relation Indonesia Awards (PRIA). Penghargaan tersebut mencakup Institusi Terpopuler, Pemimpin Terpopuler, serta prestasi dalam panduan merek, media sosial, dan media cetak.

Tahun	Penghargaan
2013	Peringkat Kedua Kategori Keterbukaan Informasi Publik
2014	Peringkat Keenam Kategori Keterbukaan Informasi Publik
2015	Peringkat Kedua Kategori Keterbukaan Informasi Publik
2016	Peringkat Pertama Kategori Keterbukaan Informasi Publik
2017	Peringkat Keenam Kategori Keterbukaan Informasi Publik
2019	Gold winner Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik
2021	Anugerah Badan Publik (Kategori Informatif)
2022	Anugerah Humas Indonesia Anugerah Monev Keterbukaan Informasi Publik

Capaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Kementerian PUPR adalah langkah positif dalam membangun pemerintahan yang baik dan berdaya saing. Pencapaian ini juga dapat

memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan pondasi demokrasi sehat serta berkelanjutan.

DAFTAR PENGHARGAAN BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2015 - TAHUN 2023

Tahun 2023			
1	Penghargaan Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023	Ajang The 1 st Indonesia GPR Awards 2023 Humas Indonesia	16 Juni 2023
2	Penghargaan Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama 2023 Kategori Pemimpin Kementerian/Lembaga	Penghargaan 77 Tahun Serikat Perusahaan Pers	11 Agustus 2023
3	Penghargaan Stand Terfavorit	UMKM Expo Nasional 2023 10-13 Agustus 2023	13 Agustus 2023
4	Apresiasi Local Media Summit 2023 kategori Pemerintah	Suara.com dan International Media Support	11 Oktober 2023
5	Penghargaan Pemimpin Terpopuler di Media Sosial 2023 Kategori Menteri	Jambore PR INDONESIA ke-9 2023	27 Oktober 2023
6	Kementerian PUPR mendapat Peringkat Keempat dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 Lingkup Kementerian/Lembaga	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	24 November 2023

Tahun 2022			
1	Penghargaan Silver Winner Kategori Kementerian Sub Kategori Media Cetak Majalah KIPRAH Vol III Oktober 2021	PR Indonesia Awards 2022	25 Maret 2022
2	Penghargaan Gold Winner Kategori Kementerian Sub Kategori Brand Guidelines	PR Indonesia Awards 2022	25 Maret 2022
3	Penghargaan Gold Winner Kategori Kementerian Sub Kategori Media Sosial	PR Indonesia Awards 2022	25 Maret 2022
4	Penghargaan Gold Winner Kategori The Best of Government InMA 2022 untuk Majalah KIPRAH Kementerian PUPR	InHouse Magazine Awards (InMA)	29 Maret 2022
5	Peringkat Ketiga Anugerah Layanan Investasi 2022 Kategori Kementerian/ Lembaga Terbaik atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Kementerian Investasi/BPKM	12 Oktober 2022
6	Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2022 Kategori Pemimpin Terpopuler di Media Digital Sub Kategori Menteri	Humas Indonesia	28 Oktober 2022
7	Pemenang Anugerah Humas Indonesia 2022 Kategori Institusi Terpopuler di Media Digital Sub Kategori Kementerian	Humas Indonesia	28 Oktober 2022
8	Bronze Winner Kategori Kanal Digital, Sub-Kategori Media Sosial Twitter	Anugerah Humas Indonesia 2022	28 Oktober 2022
9	Bronze Winner Kategori Kategori Pelayanan Informasi Publik Sub-Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik	Anugerah Humas Indonesia 2022	28 Oktober 2022
10	Apresiasi Kategori Pengelolaan Komunikasi Terbaik	Tempo Ministry Award 2022	9 Desember 2022
11	Apresiasi Kategori Pengelolaan Media Sosial Terbaik	Tempo Ministry Award 2022	9 Desember 2022
12	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Kategori Kementerian sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif	Komisi Informasi Pusat	14 Desember 2022
13	Kementerian PUPR mendapat Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) -A "Sangat Baik" Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	15 Desember 2022
14	Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Ombudsman RI	22 Desember 2022

Tahun 2021			
1	Penghargaan Bronze Winner Kategori The Best of Government InMA 2021 untuk Majalah KIPRAH, Vol.105th Edition October- November 2020	The 10 th Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA) 2021	24 Februari 2021
2	Penghargaan Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020	Public Relations Indonesia Awards 2021	31 Maret 2021
3	Penghargaan Silver Winner Sub Kategori Media Sosial	Public Relations Indonesia Awards 2021	31 Maret 2021
4	Penghargaan sebagai Badan Publik kategori informatif dengan nilai 97,76 (peringkat 4 dari 24 K/L)	Anugerah Badan Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat	28 Oktober 2021
5	Penghargaan Terbaik I Kategori Siaran Pers (Media Online) Kementerian/ Lembaga, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri	Anugerah Media Humas (AMH) 2021	4 November 2021
6	Penghargaan The Most Popular Leader in Social Media 2021 Kategori Menteri untuk Menteri PUPR	Jambore PR Indonesia #7 2021	10 Desember 2021
7	Penghargaan Predikat Kepatuhan Zona Hijau Kategori Kementerian	Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 oleh Ombudsman RI	29 Desember 2021

Tahun 2020			
1	Penghargaan Gold Winner Kategori The Best of Government InMA 2020 untuk Majalah Kiprah Kementerian PUPR	The 9 th Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA) 2020	7 Februari 2020
2	Penghargaan Silver Winner Kategori Kementerian, Sub Kategori Media Cetak untuk Majalah Kiprah Vol 100 Tahun XIX/ Edisi September 2019	The 5 th PR Indonesia Awards 2020	20 April 2020
3	Penghargaan The Most Popular in Media Awards Category Mainstream Media Monitoring Kategori Kementerian	The 5 th PR Indonesia Awards 2020	20 April 2020
4	Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID- 19 untuk Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa – Kementerian PUPR: Solusi Nyata Penanganan COVID-19 di Indonesia	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	26 Agustus 2020
5	Penghargaan PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2020 Kategori Menteri	The 6 th Jambore PR INDONESIA	9 September 2020.
6	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan Predikat Informatif	Komisi Informasi Pusat	25 November 2020
7	Penghargaan Iconomics Indonesia	Iconomics Research and Consulting	18 Desember 2020

Tahun 2019			
1	Juara Kedua The Best Inhouse Magazine in Government Category untuk Majalah KIPRAH	Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) 2019 Grid Story Factory dan Grid Voice dari Kelompok Kompas Gramedia	27 Maret 2019
2	Penghargaan Public Relations Awards (PRIA) 2019 Kategori Terpopuler di Media Subkategori Kementerian	PR Indonesia Awards	28 Maret 2019
3	Penghargaan TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 untuk Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian PUPR	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	18 Juli 2019
4	Penghargaan Manajemen Informasi Arus Mudik 2019 Kategori Informatif dan Inovatif.	Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Informasi Pusat	19 Juli 2019
5	Penghargaan Gold Winner Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Sub Kategori Kementerian	Anugerah Humas Indonesia 2019	30 Agustus 2019
6	Penghargaan Gold Winner Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Sub Kategori Kementerian	Anugerah Humas Indonesia 2019	30 Agustus 2019
7	Penghargaan Kategori Terpopuler di Media Online 2019, Sub Kategori Kementerian	Anugerah Humas Indonesia 2019	30 Agustus 2019
8	Pemenang Government Social Media Award 2019 Kategori Best use of Humor	Government Social Media Summit 2019	24 September 2019
9	Pemenang Government Social Media Award 2019 Kategori Best use of Images [Kementerian]	Government Social Media Summit 2019	24 September 2019
10	Penghargaan TOP 45 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) untuk Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP) Kementerian PUPR	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	15 Oktober 2019
11	Penghargaan sebagai Kementerian/ Lembaga terbaik dalam kategori media sosial	Anugerah Media Humas (AMH) 2019	25 Oktober 2019
12	Pemenang Insan PR Indonesia 2019 Gold Winner Kategori Kepala Biro untuk Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.	Awarding Jambore PR Indonesia #5 2019	31 Oktober 2019
13	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori Kementerian dengan Kualifikasi Informatif	Komisi Informasi Pusat	21 November 2019

Tahun 2018			
1	Penghargaan Gold Winner kategori The best of government InMA 2018 kepada Majalah KIPRAH Kementerian PUPR	The 7th Inhouse Magazine Awards (InMA) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia	7 Februari 2018
2	Penghargaan Kementerian Terpopuler di Media Tahun 2017	PR Indonesia Award (PRIA) tahun 2018	29 Maret 2018
3	Penghargaan Silver PR Indonesia Kategori Inhouse Magazine	PR Indonesia Award (PRIA) tahun 2018	29 Maret 2018
4	Penghargaan Juara 1 Stand Terbaik Indonesia Procurement Forum And Expo (IPFE) 2018	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	24-26 Juli 2018
5	Penghargaan Kategori Responsif atas Peran Pemanfaatan Informasi Publik dalam Pelayanan Arus Mudik 2018	Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Kominfo	8 Agustus 2018
6	Penghargaan Stand Terbaik 1 Kategori Futuristik	Sumatera Selatan Expo 2018 dalam rangka Asian Games 2018	16-25 Agustus 2018
7	Penghargaan Juara 1 Lomba Publikasi dalam rangka Pertemuan IMF-WB Tahun 2018 di Nusa Dua Bali	Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Tahun 2018 (Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Keuangan)	Oktober 2018
8	Penghargaan Kategori Kementerian dengan Keterbukaan Informasi Badan Publik menuju Informatif Tahun 2018	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018	5 November 2018
9	Penghargaan Best Communicators untuk Menteri PUPR Kategori Menteri	Jambore Public Relations	9 November 2018
10	Penghargaan Silver Winner Best Communicator Award untuk Kategori Kepala Biro Humas	Jambore Public Relations	9 November 2018
11	Penghargaan Terbaik I Kategori Penerbitan Media Internal untuk Majalah Kiprah Kementerian PUPR edisi "Sinergitas Infrastruktur Pariwisata"	Anugerah Media Humas 2018	4 Desember 2018
12	Penghargaan Terbaik III Kategori Siaran Pers Kementerian/LPNK/BUMN/PTN	Anugerah Media Humas 2018	4 Desember 2018
13	Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Ombudsman Indonesia	10 Desember 2018

Tahun 2017			
1	Penghargaan "Gold Winner" kategori The Best Government inhouse Magazine atau Majalah Internal Pemerintah Terbaik	The 6 th Inhouse Magazine Awards (InMA) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia	
2	Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik melalui program Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Bidang Konstruksi.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
3	Penghargaan Peringkat ke-VI kategori Kementerian	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 oleh Komisi Informasi Pusat.	
4	Penghargaan sebagai The Best Exhibitor	Indonesia's International Agribusiness Expo.	
5	Juara I Stand Terbaik kategori Perusahaan	Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan Tahun 2017	
6	Penghargaan sebagai The Best Booth Design	Indonesia Science Expo 2017.	
7	Juara I Stand Terbaik Kategori Pemerintah Daerah	Indonesia Climate Change Forum & Expo 2017	

Tahun 2016			
1	Penghargaan Stand Terbaik I Kategori Kementerian/Lembaga	Pameran Indonesia Climate Change Education Forum & Expo 2016,	
2	Penghargaan Stand Terbaik II	Pameran Hari Air Dunia XXIV Tahun 2016 yang diselenggarakan di Jakarta 10-12 Mei 2016	
3	Silver Winner untuk kategori the Best of Government Inhouse Magazine	Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2016 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia	
4	Peringkat ke-1 kategori Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik 2016	Komisi Informasi Pusat	20 Desember 2015

Tahun 2015			
1	Juara I Stand Terbaik	Pameran Hari Air Dunia Tahun 2015 di Jakarta	9-10 Mei 2015
2	Juara I Kategori Kementerian/Lembaga	Pameran 5 th Indonesia Climate Change Education Forum yang dilaksanakandi Jakarta	14-17 Mei 2015
3	Piagam Penghargaan Terbaik Dua	Pameran Nasional Potensi Daerah SAIL TOMINI 2015 yang dilaksanakan di Teluk Tomini Sulawesi Tengah	16-19 September 2015
4	Peringkat ke-2 kategori Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015	Komisi Informasi Pusat	15 Desember 2015

Epilog

Dalam epilog yang disajikan dalam buku "Setjen Melayani: Reformasi dan Dedikasi" ini, kita melihat sorotan terakhir terhadap perjalanan luar biasa Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Sebagai penutup yang penuh makna, kita merenung pada peran utama Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Selanjutnya, kita menyaksikan bagaimana Sekretariat Jenderal tidak hanya berkutat dalam administrasi semata, tetapi juga menjadi pendamping setia dalam pembinaan dan dukungan yang melibatkan segenap aspek, mulai dari ketatausahaan hingga hubungan masyarakat. Di akhir buku ini, kita merasakan kehadiran Sekretariat Jenderal sebagai pilar kestabilan, membina dan mengawal segala aspek yang menjadikan Kementerian PUPR sebuah entitas yang kuat dan terorganisir dengan baik.

Dalam pencapaiannya, Sekretariat Jenderal tak hanya menjadi administrator, melainkan pionir dalam mengawal koordinasi kegiatan Kementerian. Dalam epilog ini, kita menggali bagaimana Sekretariat Jenderal memimpin perubahan dan berkolaborasi untuk menata rencana, program, dan anggaran Kementerian, menjadikannya penentu arah yang memberikan dampak positif.

Peran Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal juga melibatkan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Dalam epilog yang memikat ini, kita menyelami bagaimana Sekretariat Jenderal tidak hanya menjadi pengurus, tetapi juga arsitek dalam membangun struktur organisasi yang efektif dan adaptif.

Epilog "Cerita Inspiratif Sistem Pelayanan: Transformasi & Kolaborasi" bukan hanya menjadi penutup, tetapi juga penanda perjalanan yang telah diukir. Setjen tidak hanya melayani dalam artian administratif, melainkan sebagai agen perubahan, pelopor dedikasi, dan penjaga nilai-nilai luhur. Dalam setiap langkahnya, kita merenung pada kesungguhan dan semangat yang menjadi pendorong utama di balik keberhasilan dan kemajuan Kementerian PUPR.





Sebagaimana judul buku "Catatan Inspiratif Sistem Pelayanan: Tranformasi & Kolaborasi", Kementerian PUPR melalui unit organisasi Sekretariat Jenderal berupaya menghadirkan pelayanan terbaik sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam menopang kelancaran dan efisiensi seluruh aktivitas kementerian. Buku ini berupaya menyajikan profil Sekretariat Jenderal yang memainkan peran administratif sekaligus menjadi garda terdepan dalam membina dan memberikan dukungan yang mencakup berbagai aspek. Sekretariat Jenderal tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh melalui pembinaan, penataan organisasi, dan tata laksana yang efektif serta menjadikannya penentu arah yang memberikan dampak positif bagi kementerian.

Sekretariat Jenderal juga menjadi kunci koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang juga menjelma sebagai penjaga integritas dan advokat hukum kementerian. Keberadaannya tak terlepas dari pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara, mengawal pengadaan barang/jasa, mengelola kegiatan kementerian, koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pemberian dukungan kepegawaian, keuangan, implementasi dokumentasi, publikasi dan pengarsipan, penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah, pengelolaan sistem informasi serta penyiapan telaah kebijakan. Dengan demikian Sekretariat Jenderal tidak hanya melayani dalam aspek administratif, melainkan sebagai agen perubahan, pelopor dedikasi, dan penjaga nilai-nilai luhur serta dalam setiap langkahnya, kita merenung pada kesungguhan dan semangat yang menjadi pendorong utama di balik keberhasilan dan kemajuan Kementerian PUPR.

Buku ini mengajak pembaca untuk meresapi perjalanan Sekretariat Jenderal dalam melayani dan berdedikasi pada reformasi. Dengan sorotan pada kompleksitas dan tantangan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal Melayani menjadi cermin reformasi dan dedikasi yang mengubah peran administratif menjadi tonggak utama dalam mencapai tujuan Kementerian PUPR. Peran Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal tidak hanya menjadi pengurus, tetapi juga arsitek dalam membangun struktur organisasi yang efektif dan adaptif. Buku "Catatan Inspiratif Sistem Pelayanan: Tranformasi & Kolaborasi" ini menjadi penanda perjalanan Kementerian PUPR yang telah terukir.